



PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

“Profil Demografi Perempuan Kepala Keluarga di DIY”



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya buku Profil Perkembangan Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai rencana. Sebuah buku yang disusun berdasarkan kajian ilmiah berisi potret demografi kependudukan dari perspektif administrasi kependudukan berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Hasil pencatatan peristiwa kependudukan oleh Dinas Dukcapil terekam di *database* SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Terpusat. Di dalamnya tidak hanya memuat biodata penduduk, namun menyimpan riwayat kelahiran, kematian, pindah, datang, dan peristiwa kependudukan lain yang dialami setiap penduduk. Data-data berbasis registrasi tersebut sangat kaya akan informasi yang memiliki nilai strategis bagi pemenuhan kebutuhan statistik vital di daerah dan nasional. Buku ini merangkum berbagai informasi kependudukan berdasarkan hasil olah data SIAK yang selanjutnya kami gunakan sebagai sumber utama analisis.

Untuk memperkuat kajian, profil ini didukung dengan data-data lintas sektor yang dikelola oleh OPD di DIY dan menyadur publikasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah DIY. Keberadaan data non-SIAK sangat membantu dalam mempertajam narasi berbasis fakta dan data yang sebelumnya tidak kami temukan di data SIAK.

Dalam penyajiannya, buku Profil Perkembangan Kependudukan DIY tahun 2023 ini terbagi menjadi beberapa bab. Setiap bab berisi analisis deskriptif yang dilengkapi statistik untuk memudahkan para pembaca memahami substansi informasi yang kami sampaikan. Di bab ketujuh kami menyuguhkan materi tematik yang khusus disusun untuk mengulas fenomena aktual kependudukan di DIY sebelum diakhiri dengan kesimpulan umum sebagai bab penutup. Ada pun materi tematik yang diangkat kali ini adalah "Profil Demografi Perempuan Kepala Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta".

Kami berharap keberadaan buku ini menjadi salah satu sumber referensi bermutu bagi seluruh pemangku kepentingan dil lingkungan pemerintah daerah, civitas akademika, dan masyarakat pegiat kependudukan dalam memahami dinamika demografi terkini di DIY. Pada level tata kelola pemerintahan, potret demografi menjadi sarana untuk mengevaluasi implementasi kebijakan sekaligus sebagai informasi penting dalam rangka menyiapkan rencana pembangunan berbasis populasi penduduk.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku Profil Perkembangan Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023. Kami menyadari buku ini masih jauh dari sempurna dan karenanya kami terbuka terhadap saran dan kritik para pembaca demi meningkatkan kualitas materi buku ini.

Yogyakarta, Agustus 2024

a.n. GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.

NIP 196505121986021002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	3
C. Manfaat	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Sumber Data	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II DESKRIPSI WILYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	7
A. Letak Dan Kondisi Topografi.....	8
B. Demografi	12
C. Penggunaan Lahan	14
D. Ekonomi Dan Potensi Daerah	16
E. Sosial Budaya	22
BAB III JUMLAH KOMPOSISI PENDUDUK DAN STRUKTUR KELUARGA	28
A. Jumlah Penduduk	29
B. Distribusi Dan Kepadatan Penduduk	32
C. Rasio Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan	33
D. Piramida Peduduk.....	36
E. Median Penduduk.....	39
F. Rasio Beban Tanggungan.....	41
G. Struktur Keluarga	44
1. Kepala Keluarga	44
2. Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga	46
3. Status Perkawinan	48

4. Kepemilikan Akta Perkawinan	50
5. Stuktur Agama Penduduk	52
H. Disabilitas	54
BAB IV KELAHIRAN, KEMATIAN, PENDUDUK DATANG DAN PERGI	56
A. Kepemilikan Akta Kelahiran.....	57
B. ASFR (<i>Age Spesific Fertility Rates</i>) dan TFR (<i>Total Fertility Rates</i>)	60
C. Angka Kematian Bayi	62
D. Angka Kematian Ibu	64
E. Penduduk Datang dan Pergi	65
BAB V PENDIDIKAN	70
A. Struktur Pendidikan Terakhir Penduduk	71
B. Struktur Pendidikan Penduduk Menurut Gender	74
C. Angka Partisipasi Kasar	78
D. Angka Partisipasi Murni	79
E. Angka Putus Sekolah	81
F. Rasio Sekolah Negeri / Swasta	85
G. Rasio Guru - Murid	87
H. Jumlah Ruang Sekolah	90
I. Perbandingan Siswa Per Kelas	91
BAB VI KETENAGAKERJAAN	96
A. Angkatan Kerja	96
B. Jenis Pekerjaan Angkatan Kerja	99
C. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja.....	101
D. Partisipasi Angkatan Kerja	105
E. Pengangguran Terbuka	107
F. Bukan Angkatan Kerja.....	108
BAB VII PROFIL DEMOGRAFI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	111
A Pendaahuluan.....	111
B. Profil Demografi Perempuan Kepala Keluarga di DIY.....	112

D. Implikasi dan Kebijakan	118
BAB VIII PENUTUP	122
Kesimpulan	122
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (%).....	20
Tabel 3. 1.	Jumlah Penduduk Per Kabupaten di DIY Tahun 2018-2023.....	30
Tabel 3. 2.	Pertumbuhan Penduduk Per Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022.....	31
Tabel 3. 3.	Distribusi dan Kepadatan Penduduk DIY, 2023.....	32
Tabel 3. 4.	Jumlah Penduduk Menurut Gender dan Rasio Laki-laki/Perempuan di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023	33
Tabel 3. 5.	Kelompok Umur dan Rasio Laki-laki/Perempuan di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023	35
Tabel 3. 6.	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023	45
Tabel 3.7.	Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan dengan Kepala Keluarga di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	47
Tabel 3.8	Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan Kepala Keluarga di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023.....	53
Tabel 3.9.	Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023	55
Tabel 4.1.	Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-4, 5-17, dan 0-17 di Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2022.....	60
Tabel 4. 2.	Jumlah Perempuan Usia 15-49 Tahun, Jumlah Kelahiran Hidup dan ASFR di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022.....	61
Tabel 4. 3.	Jumlah Perempuan Usia 10-64 Tahun, Jumlah Kelahiran Hidup, ASFR dan TFR di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	62
Tabel 4. 4.	Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022 ...	65
Tabel 5. 1.	Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan Terakhir di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023	73
Tabel 5. 2.	Jumlah Murid Putus Sekolah di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023.....	84

Tabel 5. 3.	Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupten/Kota se-DIY Tahun 2022.....	86
Tabel 5. 4.	Rasio Ideal Guru - Murid di Setiap Jenjang Pendidikan.....	88
Tabel 5. 5.	Jumlah Ruang Kelas Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Sekolah di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022.....	91
Tabel 5.6.	Standar Jumlah Rombongan Belajar dan Maksimal Siswa per Rombongan Belajar di Setiap Satuan Pendidikan.....	91
Tabel 6. 1.	Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023	97
Tabel 6. 2.	Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023	100
Tabel 6. 3.	Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023.....	104
Tabel 6. 4.	Jumlah Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan dan Gender Di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022	109
Tabel 7. 1.	Perempuan Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1.	Peta Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	8
Gambar 2. 2.	Peta Ketinggian Daerah Istimewa Yogyakarta	11
Gambar 2. 3.	Peta Jumlah Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peta Kepadatan Penduduk Provinsi di Indonesia	13
Gambar 2. 4.	Diagram Persentase Penggunaan Lahan di DIY Tahun 2021	15
Gambar 2. 5.	Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2019-2023 (dalam persen)	16
Gambar 2. 6.	PDRB Per Kapita Harga Berlaku DIY 2020-2022	17
Gambar 2. 7.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia di DIY 2020-2022.....	22
Gambar 3. 1.	Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo (a.), Bantul (b.), Gunung Kidul (c.), Sleman (d.), Kota Yogyakarta (e.) dan DIY (f.) 2022	37
Gambar 3. 2.	Umur Median Penduduk di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021, 2022 dan 2023	40
Gambar 3. 3.	Proporsi Penduduk Produktif dan Non Produktif di DIY Tahun 2023	42
Gambar 3. 4.	Rasio Ketergantungan per Kabupaten Kota di DIY Tahun 2023	43
Gambar 3. 5.	Persentase Kepala Keluarga Menurut Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023.....	46
Gambar 3.6.	Persentase Status Perkawinan Penduduk di DIY Tahun 2023.....	48
Gambar 3.4.	Persentase Kepemilikan Akta Pernikahan di Kabupaten/ Kota se-DIY Tahun 2022	51
Gambar 4. 1.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di DIY Tahun 2021-2023	58
Gambar 4. 2.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Golongan Usia di Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2023	59
Gambar 4. 3.	Angka Kematian Bayi (IMR) di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021-2023	63
Gambar 4. 4.	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun	

	2021-2023	64
Gambar 4. 5.	Penduduk Pergi AntarKabupaten/Kota dan AntarProvinsi Dari DIY Tahun 2023	67
Gambar 4. 6.	Penduduk Datang AntarKabupaten/Kota dan AntarProvinsi Dari DIY Tahun 2021-2022	68
Gambar 5. 1.	Diagram Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir di DIY Tahun 2023.....	72
Gambar 5. 2.	Diagram Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir Berdasar Gender di DIY Tahun 2023.....	75
Gambar 5. 3.	Proporsi Jumlah Pendidikan Terakhir Menurut Gender di Kabupaten (a) Kulon Progo, (b) Bantul, (c) Gunungkidul, (d) Sleman, (e) Kota Yogyakarta, dan (f) DIY Tahun 2021 dan 2022	77
Gambar 5. 4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat di Kabupaten/Kota se-DIY tahun 2023.....	79
Gambar 5. 5.	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat di Kabupaten/Kota se-DIY tahun 2023.....	80
Gambar 5. 6.	Jumlah Siswa Putus Sekolah di DIY Tahun 2023.....	82
Gambar 5. 7.	Rasio Sekolah Negeri dengan Swasta di DIY Tahun 2023	87
Gambar 5. 8.	Rasio Guru - Murid di SD dan MI Berdasarkan Jenis Sekolah (Negeri/Swasta) di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023.....	88
Gambar 5. 9.	Rasio Guru - Murid di SMP dan MTs Berdasarkan Jenis Sekolah (Negeri/Swasta) di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023.....	89
Gambar 5. 10.	Rasio Guru - Murid di SMA, SMK dan MA Berdasarkan Jenis Sekolah (Negeri/Swasta) di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 dan 2022.....	90

Gambar 5. 11. Jumlah Siswa/Ruang di SD/MI Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023.....	92
Gambar 5. 12. Jumlah Siswa/Ruang di SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023	93
Gambar 5. 13. Jumlah Siswa/Ruang di SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023	94
Gambar 6. 1. Persentase Angkatan Kerja Laki-laki dengan Perempuan di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023.....	98
Gambar 6. 2. Persentase Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan di DIY Tahun 2023	102
Gambar 6. 3. Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja per Kabupaten Kota se-DIY 2023.....	106
Gambar 6. 4. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Tahun 2023.....	108
Gambar 6. 4. Persentase Bukan Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten/Kota se-DIY di Tahun 2023.....	110
Gambar 7. 1. Distribusi Kelompok Umur Perempuan Kepala Rumah Tangga di DIY 2023	113
Gambar 7. 2. Perempuan Kepala Rumah Tangga di DIY Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan, 2023	114
Gambar 7. 3. Perempuan Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Pekerjaan di DIY, 2023	116

1. Latar Belakang

Penyusunan profil perkembangan kependudukan sangat penting karena data kependudukan adalah dasar utama dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Dengan memiliki data yang akurat dan terperinci, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Data kependudukan mencakup berbagai aspek seperti jumlah penduduk, distribusi, komposisi umur, dan pertumbuhan penduduk, yang semuanya sangat berpengaruh pada perencanaan sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur.

Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 mengatur penyusunan profil perkembangan kependudukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kondisi perkembangan dan prospek kependudukan di suatu daerah. Profil ini disusun berdasarkan data registrasi kependudukan dan data dari lintas sektor yang terkait. Data tersebut diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta data dari sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Penyusunan profil ini penting untuk menggambarkan masalah kependudukan yang dihadapi daerah dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih baik.



Selain sebagai alat perencanaan, profil perkembangan kependudukan juga berfungsi sebagai alat evaluasi bagi pemerintah daerah. Dengan adanya profil ini, pemerintah dapat menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan melihat dampak dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 juga menyebutkan bahwa profil perkembangan kependudukan harus disusun secara berkala dan berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Hal ini memastikan bahwa data yang digunakan selalu mutakhir dan relevan dengan kondisi terkini.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melakukan penyusunan profil perkembangan kependudukan secara kontinu sejak tahun 2017. Penyusunan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, baik dari data registrasi kependudukan maupun dari lintas sektor terkait. Setiap tahunnya, profil ini diperbarui dan dipublikasikan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi kependudukan di DIY. Pengalaman DIY dalam menyusun profil kependudukan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan data yang akurat dan dapat diandalkan untuk perencanaan pembangunan.

Pada tahun 2024, DIY kembali menyusun profil perkembangan kependudukan dengan menggunakan data dasar tahun 2023. Penyusunan profil ini tidak hanya memuat informasi dasar mengenai jumlah dan distribusi penduduk, tetapi juga mencakup analisis mengenai struktur umur, rasio ketergantungan, mobilitas penduduk, dan aspek sosial ekonomi lainnya. Dengan demikian, profil ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kependudukan di DIY dan menjadi dasar untuk perencanaan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Selain itu, penyusunan profil ini juga mencakup isu khusus yang relevan dengan kondisi terkini. Pada tahun 2024, isu yang dibahas adalah profil perempuan kepala rumah tangga di DIY. Deskripsi profil perempuan

kepala rumah tangga di DIY menjadi penting karena memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika sosial dan ekonomi yang unik di wilayah tersebut. Mengingat DIY dikenal memiliki kultur yang kaya dan beragam, memahami kondisi perempuan kepala rumah tangga dapat membantu mengidentifikasi tantangan khusus yang mereka hadapi, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Selain itu, deskripsi ini bisa menjadi dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka, memastikan bahwa program pemerintah dapat menjangkau dan memberdayakan mereka secara efektif.

B. Tujuan

Buku profil ini disusun sebagai upaya menyajikan informasi dan realitas kependudukan dengan mencermati dinamika kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Manfaat

Profil kependudukan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk mencermati perubahan dan implikasinya pada pembangunan, terutama terhadap kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Telaah dan analisis dalam buku ini dapat dimanfaatkan untuk memahami implikasi dinamika dan perubahan penduduk pada struktur umur, mobilitas, ketenagakerjaan dan pendidikan. Selain itu pada isu khusus yang dibahas, dengan mengetahui profil perempuan kepala rumah tangga, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan kependudukan ke depan.

D. Ruang Lingkup

Profil kependudukan ini memuat pengolahan dan analisis data agregat penduduk kabupaten/kota yang mencakup jumlah, persebaran dan kepadatan penduduk, komposisi (umur), struktur keluarga, komponen

yang terkait pada perubahan penduduk (angka kelahiran total TFR, kematian bayi, kematian ibu), pendidikan, dan ketenagakerjaan, penduduk datang/pindah dan kondisi kesehatan di DIY sebagai bagian dari faktor yang memengaruhi perubahan penduduk akibat kematian dan kelahiran. Profil ini disusun dengan menggunakan data registrasi kependudukan yang bersumber dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan data dari lintas sektoral seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Analisis dalam profil ini juga menggunakan data historis untuk menelaah perubahan jumlah penduduk dan dinamikanya selama beberapa tahun terakhir. Ruang lingkup yang komprehensif ini memastikan bahwa profil perkembangan kependudukan DIY dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk perencanaan kebijakan dan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan profil kependudukan ini bersumber dari:

1. Data konsolidasi dan Bersih (DKB) Kemendagri semester II tahun 2023.
2. Data pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan di database SIAK Dukcapil kabupaten/kota se-DIY tahun 2023.
3. Data registrasi sektoral, antara lain bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan dan sosial dengan data dasar tahun 2023.

F. Sistematika Penulisan

Buku profil kependudukan ini memuat delapan pokok bahasan yaitu:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup sumber data, dan sistematika penulisan.

Bab II Deskripsi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Membahas tentang kondisi umum wilayah mencakup letak dan topografi, demografi, penggunaan lahan, ekonomi dan potensi, serta sosial dan budaya

Bab III Jumlah, Komposisi Penduduk dan Struktur Keluarga

Membahas materi kuantitas penduduk terkait jumlah, komposisi dan struktur keluarga.

Bab IV Kelahiran, Kematian, Penduduk Datang dan Pindah

Menelaah aspek komponen kualitas penduduk kelahiran (angka kelahiran total), kematian (bayi dan ibu), penduduk datang dan pindah dari dan ke DIY.

Bab V Pendidikan

Membahas berbagai data statistik terkait kondisi pendidikan seperti, angka kelulusan setiap jenjang pendidikan, angka partisipasi kasar dan murni, angka putus sekolah, rasio guru dan murid, rasio sekolah negeri dan swasta.

Bab VI Ketenagakerjaan

Menelaah kondisi ketenagakerjaan, yang ada mencakup angkatan kerja, angkatan kerja yang bekerja, pengangguran terbuka, bukan angkatan kerja, partisipasi angkatan kerja, dan struktur pekerjaan angkatan kerja

BAB VII Profil Perempuan Kepala Rumah Tangga di DIY

Membahas tentang profil perempuan kepala rumah tangga di DIY. Variabel yang dibahas meliputi profil demografis perempuan kepala rumah tangga berdasarkan kelompok umur, pendidikan terakhir dan pekerjaan.

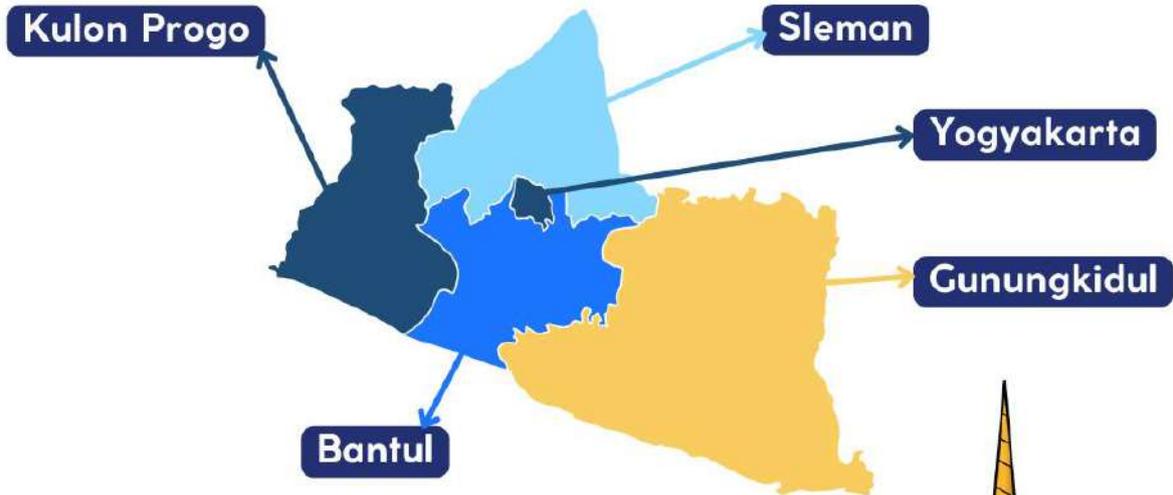
BAB VIII Penutup

Memberikan informasi kesimpulan terkait hasil analisis dalam penyusunan buku profil perkembangan kependudukan ini.

Daftar Pustaka

Memuat dokumen, dan buku yang digunakan dalam proses penyusunan buku profil perkembangan kependudukan.

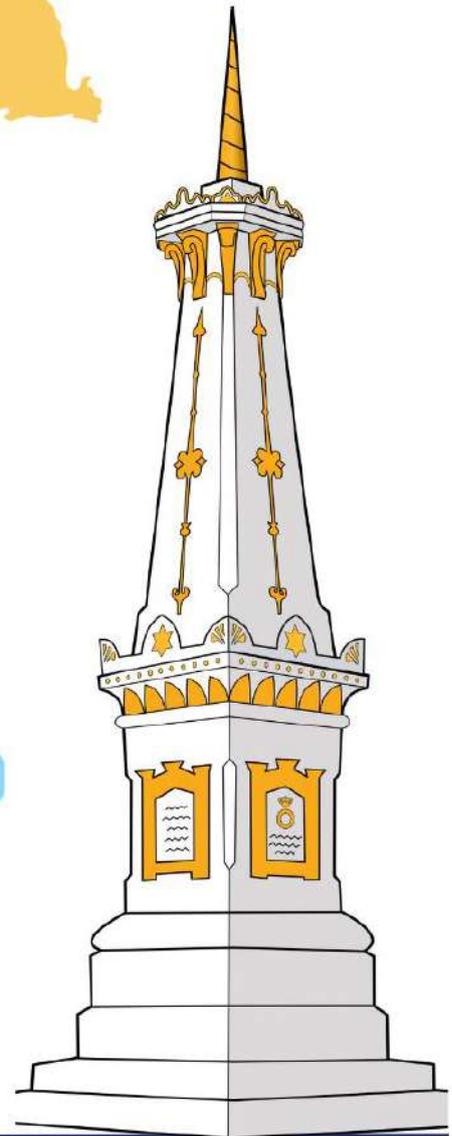
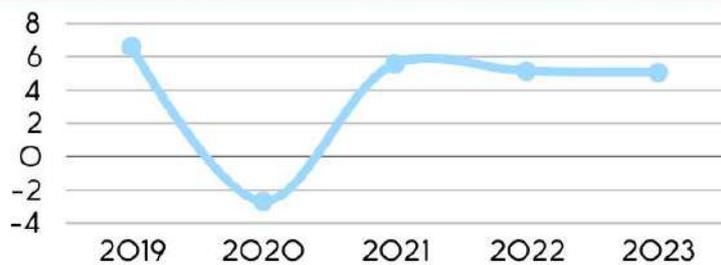
BAB. 02 | Deskripsi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta



Persentase Penggunaan Lahan



Pertumbuhan Ekonomi DIY 2019-2023



Deskripsi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Letak dan Kondisi Topografi

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki luas sebesar 3.185,80 km² atau sekitar 0,16% dari luas Indonesia (Pemerintah Daerah DIY, 2022). Wilayah DIY terdiri dari 78 kapanewon/kemantren, 438, kalurahan/kelurahan, 4.673 pedukuhan/kampung, 6.905 RW, dan 27.290 RT. Gambar 2.1 menunjukkan Peta Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan pembagian wilayah administratif yang mencakup kabupaten dan kota. Wilayah DIY terdiri dari empat kabupaten yaitu Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul, serta satu kota yaitu Kota Yogyakarta.

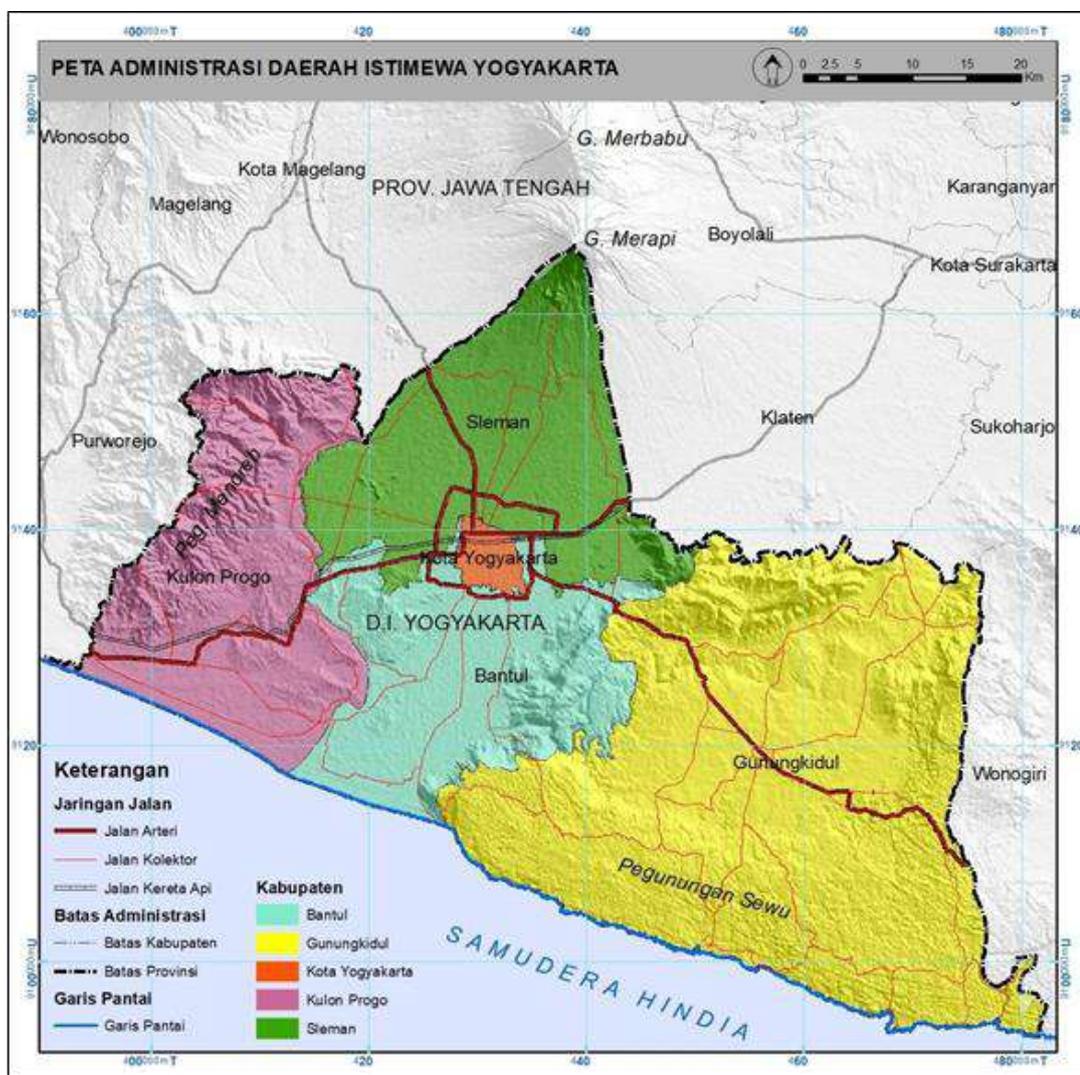


Daerah Istimewa Yogyakarta secara astronomis terletak diantara 110° 00' dan 110° 50' Bujur Timur, 7° 33' dan 8° 12' Lintang Selatan. DIY terletak di bagian tengah Pulau Jawa, di sisi bagian selatan. DIY berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di bagian utara, barat dan timur, serta Samudera Indonesia di bagian selatan. Batas dengan Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara;
- Kabupaten Klaten di bagian timur laut;
- Kabupaten Magelang di bagian barat laut; dan
- Kabupaten Purworejo di bagian barat;



Secara umum, Gambar 2.1 memberikan gambaran visual mengenai distribusi wilayah administrasi di DIY, yang memperlihatkan bagaimana setiap kabupaten/kota memiliki area geografis yang cukup jelas dan terdefinisi. Kabupaten Sleman yang terletak di bagian utara DIY terlihat memiliki area yang lebih luas dibandingkan dengan Kota Yogyakarta yang lebih kecil dan terletak di pusat wilayah. Selain itu, Gunungkidul di bagian tenggara dan Bantul di bagian selatan juga menunjukkan area yang luas, sementara Kulon Progo berada di barat daya.



Gambar 2. 1. Peta Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sumber: Single Basemap DIY, 2019)

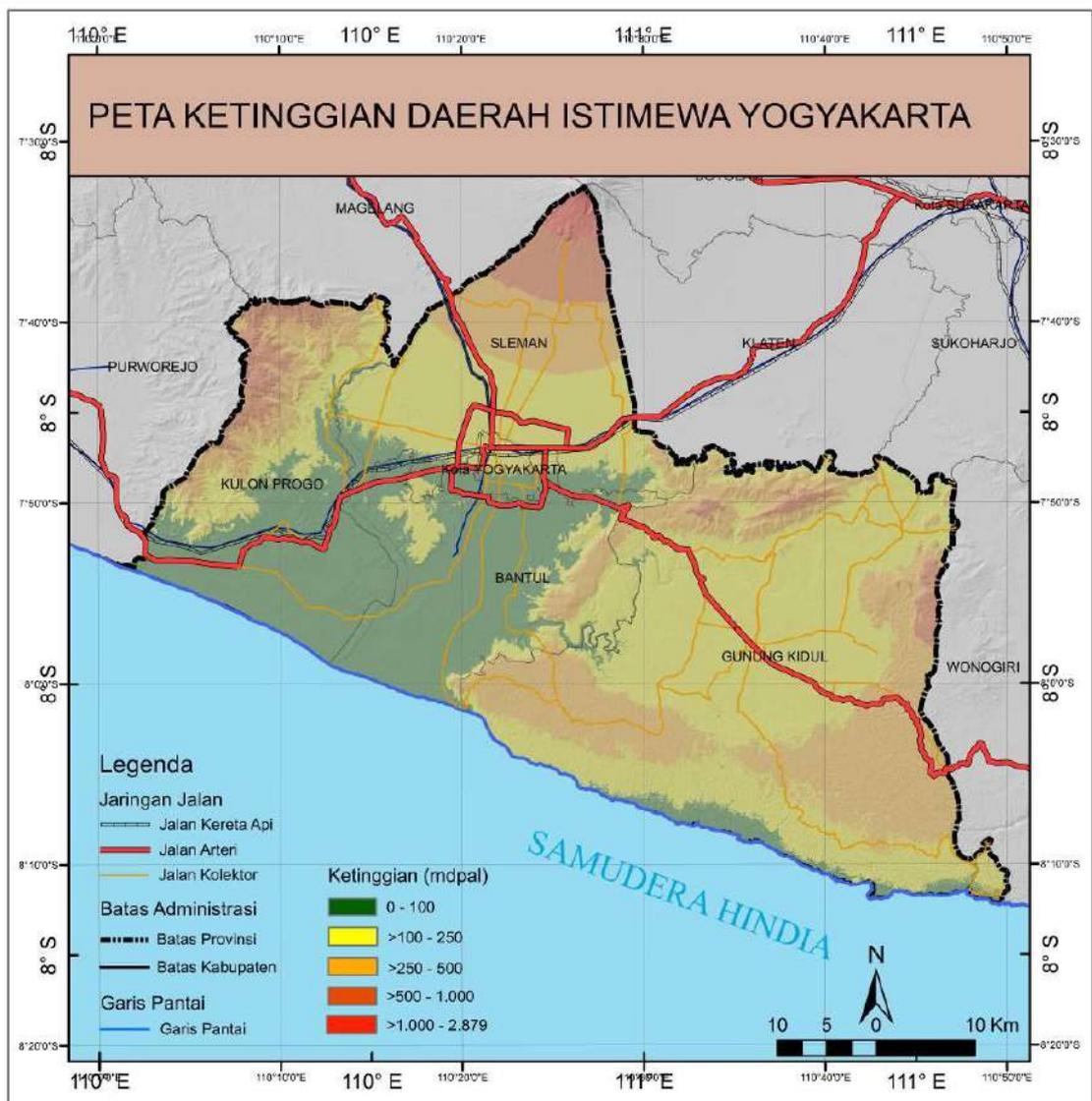
Dari segi topografi, wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori (Bappeda DIY, 2021). Pertama, sebagian besar wilayah DIY atau sebesar 65,65% terletak pada ketinggian 100-499 meter di atas permukaan laut. Kedua, 28,84% wilayah berada pada ketinggian kurang dari 100 meter. Ketiga, 5,04% wilayah dengan ketinggian 500-999 meter. Keempat, 0,47% wilayah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter. Jika dipetakan, kondisi topografi DIY akan terlihat seperti pada Gambar 2.2.

Berdasarkan satuan fisiografisnya, DIY terdiri atas empat satuan fisiografis:

1. Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian antara 150 - 700 meter. Satuan ini mencakup area seluas 1.656,25 km² di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan perbukitan batu gamping kritis, tandus, dan sering kekurangan air. Bagian tengah wilayah ini berupa dataran Basin Wonosari, bentang alam solusional dengan batuan induk batu gamping, karakteristik tanah dangkal, dan vegetasi penutup yang jarang.
2. Satuan Gunung Api Merapi dengan ketinggian antara 80 - 2.911 meter. Wilayahnya mencakup kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, termasuk Bentang Alam Vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi berfungsi sebagai hutan lindung dan kawasan resapan air.
3. Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo dengan ketinggian 0 - 80 meter, seluas 215,62 km². Wilayah ini merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY, dari Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul, berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini subur, dan juga terdapat bentang alam marine dan aeolin di wilayah pantai dari Kabupaten

Kulon Progo sampai Bantul, dengan Pantai Parangtritis terkenal sebagai laboratorium alam gumuk pasir.

4. Pegunungan Kulon Progo dengan ketinggian hingga 572 meter. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit, memiliki kendala lereng curam dan potensi air tanah yang kecil.



Gambar 2. 2. Peta Ketinggian Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sumber: Citra Digital Elevation Model, Shuttle Radar Topography Mission)

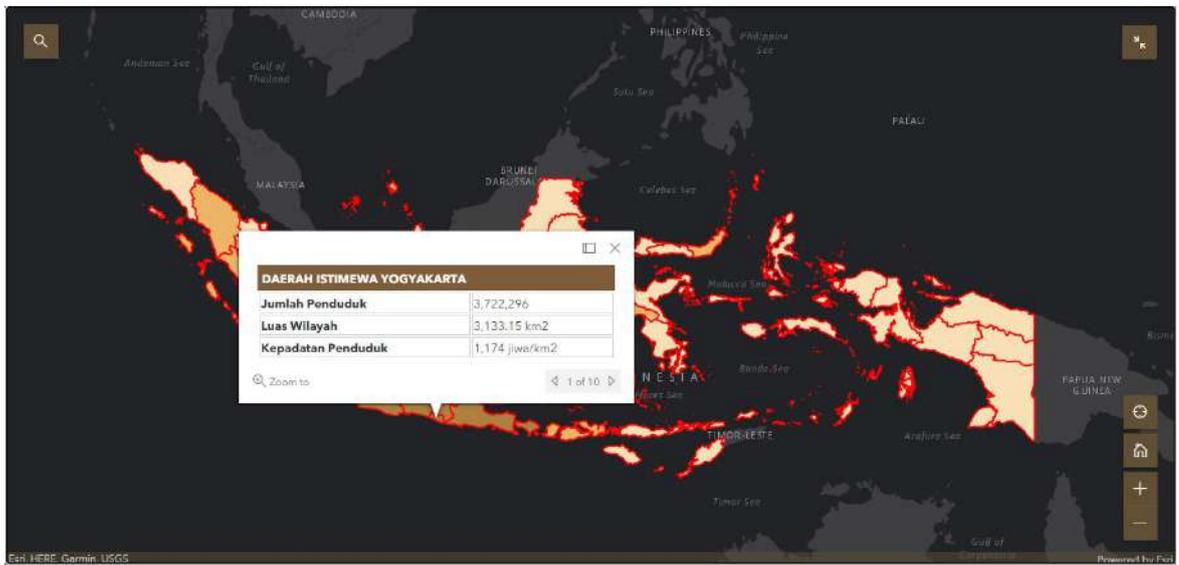
Isu menarik dari peta ini adalah jika dikaitkan dengan distribusi demografi dan bagaimana topografi memengaruhi pola permukiman di

setiap wilayah. Pertama, Sleman dan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang lebih dekat dengan pusat pendidikan dan ekonomi, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kedua, Bantul dengan akses jalan utama yang baik juga menunjukkan kepadatan yang cukup tinggi. Ketiga, Gunungkidul dengan topografi perbukitan memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Hal ini bisa terjadi karena faktor ketersediaan lahan dan aksesibilitas yang memengaruhi pola permukiman penduduk di daerah tersebut. Hal ini dikuatkan dengan melihat Gambar 2.2 dengan visualisasi topografi di DIY.

Kesimpulannya, peta administrasi DIY memberikan pandangan yang jelas mengenai pembagian wilayah dan distribusi geografis dari setiap kabupaten/kota di DIY. Perbedaan topografi dan aksesibilitas berperan penting dalam menentukan pola kepadatan penduduk dan perkembangan wilayah di setiap daerah. Dengan pemahaman ini, perencanaan pembangunan dan kebijakan demografis dapat disesuaikan dengan karakteristik unik dari masing-masing wilayah administratif di DIY.

B. Demografi

Pada bagian ini, kondisi demografi di DIY akan dilihat berdasarkan jumlah dan kepadatan penduduknya. Berdasarkan jumlahnya, penduduk di DIY pada 2023 sebesar 3.722.296 jiwa. Data ini bersumber dari data dasar Admuduk yang bersumber dari Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2023. Jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 28.462 jiwa dibanding tahun 2022. Berdasarkan kepadatannya, kepadatan di DIY pada 2023 sebesar 1.174 jiwa/km². Nilai ini naik dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.159 jiwa/km² (Gambar 2.3).



Gambar 2.3. Peta Jumlah Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peta Kepadatan Penduduk Provinsi di Indonesia

Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/1>, 2023

Kondisi demografi yang ditunjukkan oleh data kependudukan di DIY pada tahun 2023 dapat dianalisis berdasarkan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan penduduk dan peningkatan kepadatan. Berikut adalah analisis mengapa kondisi ini terjadi di DIY:

1. Urbanisasi dan Migrasi: DIY, terutama Kota Yogyakarta dan sekitarnya, adalah pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata. Banyak orang dari berbagai daerah datang ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan di universitas-universitas terkemuka atau untuk mencari peluang ekonomi. Hal ini menyebabkan peningkatan populasi melalui migrasi masuk, yang merupakan salah satu penyebab utama kenaikan jumlah penduduk (Anggit & Putri, 2022; Raharti & Jebarus, 2022; Rahajeng et al., 2023).

¹Sumber:

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/arcgis/apps/storymaps/stories/d5848b8209ac43a481c25bd7f43ff52fv>

2. Peningkatan Kelahiran: Pertumbuhan penduduk juga dapat disebabkan oleh tingkat kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kematian (Skirbekk, 2022). Program-program kesehatan dan keluarga berencana yang efektif dapat membantu meningkatkan angka kelahiran, sementara peningkatan akses ke layanan kesehatan mengurangi angka kematian, khususnya pada bayi dan ibu hamil.
3. Peningkatan Infrastruktur dan Layanan: Pembangunan infrastruktur yang baik, seperti transportasi, perumahan, dan layanan publik, menarik lebih banyak orang untuk tinggal di DIY. Hal ini dikarenakan peningkatan kualitas hidup dan fasilitas publik yang tersedia di akan berkontribusi pada meningkatnya jumlah penduduk (Fattakhov et al., 2020).

C. Penggunaan Lahan

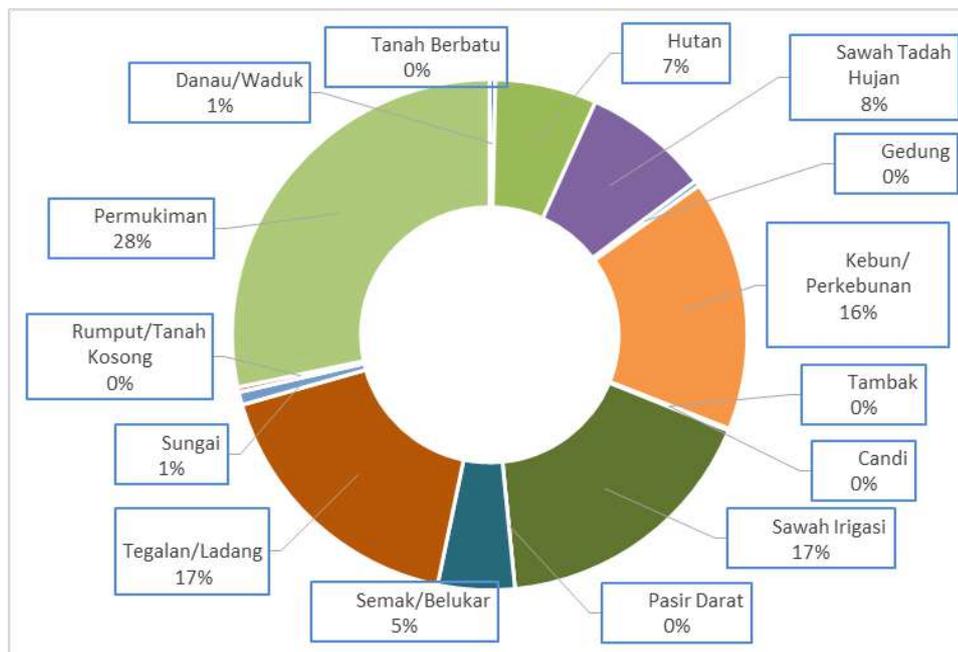
Data yang digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan lahan di DIY menggunakan data pada 2021 dengan sumber data dari Aplikasi Dataku, Dinas Perumahan dan Tata Ruang DIY, 2021. Data tahun ini dipilih karena ketersediaan data pada 2023 tidak lengkap seperti pada 2021. Berdasarkan Gambar 2.4, penggunaan lahan di DIY didominasi oleh permukiman dengan luasan sebesar 90.030,39 hektare². Persentasenya untuk permukiman sebesar 28 persen. Kemudian penggunaan lahan paling tinggi berikutnya dimanfaatkan untuk sawah irigasi (17 persen), tegalan/ladang (17 persen) dan kebun/perkebunan (16 persen).

Menggunakan data pada Aplikasi Dataku ini², menarik jika dibahas kondisi perubahan penggunaan lahan pada 2020 dan 2021. Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan sebesar 228,29 hektare dalam penggunaan lahan untuk permukiman antara tahun 2020 dan 2021. Peningkatan ini

² http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/637-lahan-di-diy

mencerminkan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang terus berlangsung di DIY. Kenaikan jumlah penduduk serta kebutuhan akan perumahan dan fasilitas terkait permukiman dapat menjadi faktor pendorong utama perubahan ini. Pengembangan perumahan baru serta perluasan area permukiman mungkin juga disebabkan oleh migrasi masuk dan peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Pada penggunaan lahan pertanian, terjadi peningkatan seluas 247,10 hektare pada sawah irigasi. Hal ini menunjukkan adanya penambahan atau optimalisasi lahan irigasi yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan di DIY. Terjadi peningkatan pula seluas 43,12 hektare untuk penggunaan sawah tadah hujan. Penambahan ini mengindikasikan adanya perluasan atau pemanfaatan lahan yang lebih efektif untuk pertanian yang bergantung pada curah hujan.



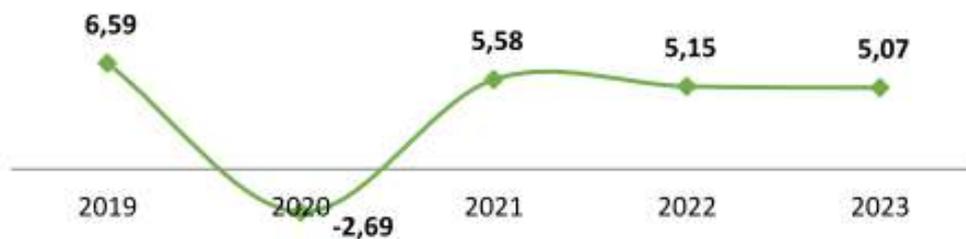
Gambar 2. 4. Diagram Persentase Penggunaan Lahan di DIY Tahun 2021 (Sumber: Aplikasi Dataku, Dinas Perumahan dan Tata Ruang DIY, 2021)

Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya peningkatan penggunaan lahan untuk permukiman serta peningkatan luas lahan pertanian baik untuk sawah irigasi maupun sawah tadah hujan antara tahun

2020 dan 2021. Peningkatan ini mencerminkan dinamika pembangunan yang mencakup kebutuhan akan perumahan dan pentingnya sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan. Tantangan yang mungkin dihadapi adalah bagaimana mengelola lahan secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan permukiman tanpa mengorbankan lahan pertanian yang vital.

D. Ekonomi dan Potensi Daerah

Kondisi ekonomi di DIY mengalami perubahan naik turun pada kurun waktu 2019-2023. Berdasarkan LKPJ 2023 DIY, kondisi ekonomi DIY menunjukkan tren peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, akibat dampak pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi DIY mengalami kontraksi sebesar -2,69%. Namun, ekonomi DIY berhasil rebound pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 5,58% dan melanjutkan pertumbuhan sebesar 5,15% pada tahun 2022 serta 5,07% pada tahun 2023 (Gambar 2.5).



Gambar 2. 5. Pertumbuhan Ekonomi DIY 2019-2023 (dalam persen)
(Sumber: LKPJ Gubernur DIY 2023)

Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2023 sebesar 5,07% ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, meskipun masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 5,34%. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh semua lapangan usaha yang mengalami ekspansi. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,29%, diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan

dengan pertumbuhan 10,27%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 8,72% .

Dinamika pertumbuhan ekonomi DIY ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, rebound ekonomi pasca-pandemi yang kuat, terutama dengan pemulihan di sektor pariwisata dan pendidikan yang menjadi tulang punggung ekonomi DIY. Kedua, adanya investasi yang signifikan, termasuk dari proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol dan jalur lintas selatan yang mendorong aktivitas ekonomi. Ketiga, kebijakan pemerintah daerah yang pro-bisnis dan fokus pada pengembangan infrastruktur serta pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di wilayah yang tertinggal turut memberikan kontribusi positif.

Pada tahun 2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) DIY menunjukkan dinamika yang menarik. PDRB ADHK DIY didominasi oleh kontribusi dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang secara bersama-sama menyumbang 59,81% dari total PDRB DIY. Sementara itu, gabungan kontribusi dari Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul hanya mencapai 40,19%. Berikut adalah rincian PDRB ADHK dan Pangsa terhadap DIY tahun 2023:

1. Kulon Progo: 9.907.951 Juta Rp (8,35%)
2. Bantul: 21.880.489 Juta Rp (18,44%)
3. Gunungkidul: 15.740.736 Juta Rp (13,27%)
4. Sleman: 39.551.388 Juta Rp (33,34%)
5. Yogyakarta: 31.401.154 Juta Rp (26,47%)

Beberapa isu menarik terkait PDRB ADHK tersebut antara lain:

1.) Peran Dominan Sleman dan Yogyakarta:

Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki infrastruktur yang lebih baik, pusat pendidikan, serta fasilitas kesehatan dan komersial yang lebih lengkap dibandingkan dengan wilayah lainnya. Ini menjadikan kedua wilayah ini sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, menarik investasi dan penduduk dari luar daerah.

2.) Ketimpangan Pembangunan:

Perbedaan kontribusi yang signifikan antara wilayah yang lebih maju (Sleman dan Yogyakarta) dengan wilayah yang kurang maju (Kulon Progo, Gunungkidul, Bantul) mencerminkan ketimpangan pembangunan. Wilayah selatan DIY, khususnya Gunungkidul dan Kulon Progo, masih menghadapi tantangan infrastruktur dan aksesibilitas yang memengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi .

3.) Kebijakan Pemerataan Pembangunan:

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah DIY telah mengimplementasikan kebijakan pemerataan pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di wilayah yang relatif tertinggal, terutama di Kawasan Selatan, melalui kemitraan investasi dan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY menurut lapangan usaha menunjukkan dinamika yang beragam pada tahun 2023. Beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang signifikan, sementara yang lain tumbuh dengan laju yang lebih lambat. Berikut adalah deskripsi pertumbuhan PDRB DIY berdasarkan lapangan usaha utama:

1. Jasa Keuangan dan Asuransi:

Sektor ini mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,29%. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas perbankan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya yang tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

2. Transportasi dan Pergudangan:

Pertumbuhan sektor ini mencapai 10,27%. Pertumbuhan yang tinggi ini disebabkan oleh peningkatan mobilitas penduduk dan barang, serta meningkatnya aktivitas logistik yang didorong oleh perkembangan ekonomi dan pariwisata.

3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum:

Sektor ini tumbuh sebesar 8,72%, dipicu oleh bertambahnya peningkatan jumlah wisatawan domestik dan internasional, serta peningkatan jumlah akomodasi dan restoran yang beroperasi di DIY.

4. Industri Pengolahan:

Pertumbuhan sektor ini mencapai 4,26%, yang menunjukkan pemulihan industri manufaktur di DIY. Peningkatan ini disebabkan oleh perbaikan permintaan dan investasi di sektor industri.

5. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor:

Sektor ini tumbuh sebesar 4,29%, disebabkan oleh peningkatan ini dipicu oleh peningkatan aktivitas perdagangan dan membaiknya daya beli masyarakat.

6. Pengadaan Listrik dan Gas:

Pertumbuhan sektor ini adalah 7,32%. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan konsumsi listrik dan gas seiring dengan pemulihan ekonomi.

7. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan:

Sektor ini hanya tumbuh sebesar 1,14%, yang merupakan pertumbuhan terendah di antara semua sektor. Pertumbuhan yang rendah ini diduga disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak mendukung dan tantangan dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Terjadinya dinamika pertumbuhan ekonomi pada 2019-2023 di DIY dapat disebabkan beberapa hal. Pertama adalah terjadinya pemulihan ekonomi Pasca-Pandemi. Sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan karena pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Pembukaan kembali ekonomi, peningkatan mobilitas, dan pemulihan sektor pariwisata berkontribusi signifikan terhadap hal ini. Kedua adalah bertambahnya investasi dan infrastruktur. Peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur di DIY, termasuk pembangunan jalan tol dan fasilitas publik

lainnya, mendorong pertumbuhan di berbagai sektor seperti transportasi, perdagangan, dan industri pengolahan. Ketiga peningkatan pariwisata di DIY. Sektor pariwisata yang mulai bangkit kembali pasca-pandemi meningkatkan permintaan untuk akomodasi, makan minum, dan transportasi. Inisiatif promosi pariwisata dan peningkatan fasilitas wisata turut mendukung pertumbuhan ini. Keempat adalah faktor kebijakan pemerintah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah yang mendukung peningkatan investasi, pengembangan UMKM, dan penguatan sektor keuangan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB DIY pada tahun 2023 mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat dan kontribusi signifikan dari sektor-sektor utama seperti jasa keuangan, transportasi, dan pariwisata.

Tabel 2.1.

Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (%)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,03	4,19	0,61	5,12	1,14
Pertambangan dan Penggalian	3,04	-9,22	-3,11	1,72	3,25
Industri Pengolahan	5,73	-4,38	0,37	1,76	4,26
Pengadaan Listrik, Gas	5,43	-0,10	2,40	6,82	7,32
Pengadaan Air	8,90	0,51	6,82	3,29	3,43
Konstruksi	14,39	-15,64	10,82	4,81	4,81
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,16	-4,52	1,51	4,82	4,29
Transportasi dan Pergudangan	3,55	-20,21	1,93	18,26	10,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,89	-16,91	7,55	12,40	8,72
Informasi dan Komunikasi	7,45	19,70	16,69	3,54	4,68
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,62	-1,09	1,45	5,24	10,29
Real Estate	5,93	1,27	0,57	2,82	3,70
Jasa Perusahaan	6,75	-14,89	8,09	7,16	8,28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,30	-2,22	-0,39	2,95	2,44
Jasa Pendidikan	6,57	4,47	5,00	0,98	4,38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,61	19,18	4,47	3,99	6,32
Jasa lainnya	6,25	-15,74	21,53	15,04	6,97
PDRB	6,60	-2,69	5,53	5,15	5,07

Sumber: BPS DIY, 2024

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ DIY) tahun 2023, beberapa sektor unggulan menjadi kontributor utama dalam perekonomian daerah (Pemerintah Daerah DIY, 2024). Sektor industri pengolahan menyumbang 11,82% terhadap PDRB DIY pada tahun 2023 dan tumbuh sebesar 4,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Subsektor dominan dalam sektor ini adalah industri makanan dan minuman dengan PDRB sebesar Rp7,35 triliun, industri tekstil dan pakaian jadi dengan PDRB sebesar Rp1,59 triliun, serta industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik dengan PDRB sebesar Rp859,35 miliar.

Selain itu, sektor akomodasi dan makan minum juga menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan, dengan pertumbuhan sebesar 8,72% pada tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya jumlah wisatawan dan aktivitas pariwisata di DIY. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, meskipun kontribusinya menurun, tetap menjadi pilar penting dalam perekonomian DIY. Namun, sektor ini hanya tumbuh sebesar 1,14% pada tahun 2023, mengalami penurunan signifikan dari 5,12% pada tahun 2022, yang sebagian besar disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak mendukung sehingga masa tanam terganggu.

Kondisi ini terjadi karena berbagai faktor. Banyak sektor, terutama pariwisata dan akomodasi, mengalami pemulihan yang signifikan setelah dampak buruk pandemi COVID-19. Pembukaan kembali destinasi wisata dan peningkatan mobilitas penduduk berkontribusi pada pertumbuhan ini. Pemerintah DIY juga menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong investasi di sektor-sektor strategis, termasuk industri pengolahan dan pariwisata, dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan fasilitas umum lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pertumbuhan sektor pertanian yang lebih rendah sebagian besar disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak mendukung, yang memengaruhi masa tanam dan hasil panen, menunjukkan pentingnya ketahanan dan adaptasi sektor pertanian terhadap perubahan iklim.

E. Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya di DIY dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Gini dan Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan. Nilai IPM³ akan merepresentasikan pengukuran kondisi sosial secara menyeluruh tentang keberhasilannya dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DIY 2023, IPM di DIY mengalami peningkatan signifikan (Lihat Gambar 2.7). Pada tahun 2023, IPM DIY mencapai angka 81,09, naik dari 79,95 pada tahun 2020. Angka ini menempatkan DIY dalam kategori "sangat tinggi" dalam pembangunan manusia sejak tahun 2021, yang sebelumnya berada pada kategori "tinggi" ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

Secara umum, capaian IPM DIY selalu berada di atas capaian IPM nasional. Pada tahun 2023, IPM nasional mencapai angka 74,39, yang lebih rendah dibandingkan dengan IPM DIY yang mencapai 81,09. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di DIY lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional.



Gambar 2. 7. Nilai Indeks Pembangunan Manusia di DIY 2020-2023
(Sumber: BPS DIY, 2023)

³ <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>

Peningkatan IPM di DIY terjadi pada semua dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Beberapa indikator yang berkontribusi pada peningkatan IPM DIY meliputi pengeluaran riil per kapita yang tumbuh sebesar 3,05% pada tahun 2023, peningkatan angka harapan hidup saat lahir (UHH) yang tumbuh sebesar 0,09%, dan harapan lama sekolah (HLS) yang meningkat sebesar 0,06%. Selain itu, rata-rata lama sekolah (RLS) juga mengalami peningkatan sebesar 0,82%.

Perbandingan dengan capaian nasional menunjukkan bahwa DIY memiliki keunggulan dalam pembangunan manusia. Sementara IPM nasional terus meningkat, perbedaannya dengan DIY tetap signifikan, mencerminkan keberhasilan DIY dalam berbagai program pembangunan manusia yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan ini juga mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah DIY dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya melalui berbagai inisiatif di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Nilai IPG⁴ digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketertinggalan pencapaian laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DIY tahun 2023, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. IPG DIY pada tahun 2022 mencapai angka 94,99, yang terus meningkat dari 94,73 pada tahun 2018. Angka ini menunjukkan bahwa DIY berada di atas rata-rata nasional dalam hal kesetaraan gender dan pembangunan berbasis gender.

Nilai IPG DIY yang tinggi mencerminkan keberhasilan daerah ini dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui berbagai inisiatif dan program yang mendukung kesetaraan gender. Beberapa dimensi penting yang berkontribusi pada IPG termasuk kesehatan, pendidikan, partisipasi

⁴ <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html>

ekonomi, dan politik. Sebagai contoh, Kabupaten Sleman memiliki nilai IPG tertinggi di antara kabupaten/kota lain di DIY, mencapai 81,65 pada tahun 2022, sedangkan Kabupaten Bantul memiliki nilai IPG terendah sebesar 65,03. Kota Yogyakarta juga menunjukkan nilai yang cukup tinggi yaitu 75,5, meskipun sedikit di bawah capaian nasional .

Perbandingan dengan capaian nasional menunjukkan bahwa IPG DIY lebih unggul dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada tahun 2022, nilai IPG nasional adalah 76,59, sedangkan DIY mencapai 76,87. Ini menandakan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah DIY untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan lebih efektif dibandingkan dengan rata-rata nasional. Upaya-upaya ini mencakup peningkatan akses perempuan ke pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi dan politik .

Kondisi sosial berikutnya yang dipotret adalah melihat apakah ada kesenjangan/ ketimpangan pendapatan antarpenduduk. Indikator yang digunakan adalah indeks gini. Pada tahun 2023, Indeks Gini di DIY tercatat sebesar 0,449, menunjukkan penurunan sebesar 0,01 poin dibandingkan dengan Indeks Gini pada September 2022 yang mencapai 0,459. Meskipun terdapat penurunan, angka ini masih tergolong relatif tinggi dalam konteks ketimpangan pendapatan di DIY untuk periode Maret 2019 hingga Maret 2023.

Ketimpangan pengeluaran penduduk di DIY masih belum kembali ke tingkat sebelum pandemi Covid-19. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Indeks Gini di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 0,453, menunjukkan penurunan 0,015 poin dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 0,468. Namun, ketimpangan di perkotaan masih relatif tinggi sepanjang periode Maret 2019 hingga Maret 2023. Di pedesaan, Indeks Gini menunjukkan tren peningkatan sejak September 2021, dari 0,325 pada September 2021 menjadi 0,362 pada Maret 2023 (Pemda DIY, 2024).

Indeks Gini nasional pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,388, dengan DIY menjadi provinsi dengan Indeks Gini tertinggi di tingkat nasional. Hal ini menempatkan DIY bersama dengan provinsi lain seperti DKI Jakarta (0,431), Jawa Barat (0,425), dan Gorontalo (0,417) sebagai wilayah dengan ketimpangan yang cukup signifikan.

Tingginya Indeks Gini di DIY dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, belum meratanya distribusi pendapatan antar kelompok ekonomi. Golongan ekonomi atas masih mendominasi total pengeluaran masyarakat di DIY, menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah. Pada Maret 2023, tingkat pengeluaran dari kelompok "40 persen penduduk pengeluaran terendah" di perkotaan tercatat sebanyak 15,21% dari total konsumsi, sedikit meningkat dari 14,91% pada September 2022. Namun, proporsi konsumsi kelompok ini masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan secara keseluruhan. Sebaliknya, di pedesaan, konsumsi kelompok "40 persen terbawah" justru mengalami penurunan dari 20,42% pada September 2022 menjadi 19,76% pada Maret 2023.

Ketimpangan yang tinggi ini juga disebabkan oleh dominasi golongan ekonomi atas dalam total pengeluaran, serta perbedaan akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Upaya untuk mengurangi ketimpangan ini memerlukan kebijakan yang fokus pada pemerataan distribusi pendapatan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan peluang ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah DIY.

Dari aspek budaya, indikator yang digunakan adalah Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DIY tahun 2023, persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan di DIY menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2023, target budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY ditetapkan

sebesar 323 buah, dengan realisasi mencapai 368 buah. Capaian ini meningkat sebesar 9% dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar 337 buah.

Peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam pemeliharaan dan pengembangan budaya benda, serta komitmen Pemda DIY dalam mempromosikan kekayaan budaya baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Beberapa objek budaya yang mendapat apresiasi di tingkat nasional pada tahun 2023 meliputi Jembatan Kereta Api Mbeling di Kulon Progo, Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Situs Tamansari Kraton Yogyakarta, dan Gedung Pusat UGM Yogyakarta. Selain itu, Warisan Budaya Benda yang ditetapkan di tingkat internasional adalah Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta yang diakui sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO pada tanggal 18 September 2023.

Upaya pelestarian ini menunjukkan bahwa DIY tidak hanya fokus pada pemeliharaan fisik dari objek-objek budaya, tetapi juga pada promosi dan pengakuan internasional yang memperkuat identitas budaya lokal serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Hal ini sejalan dengan visi DIY untuk menjadi pusat budaya dan tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara, yang mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pelestarian budaya.

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DIY tahun 2023, persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan di DIY menunjukkan hasil yang positif. Sejak tahun 2013 hingga 2023, DIY telah menetapkan 181 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di tingkat nasional. Pada tahun 2023 saja, sebanyak 25 WBTB DIY berhasil ditetapkan sebagai WBTB Nasional, dan 1 WBTB DIY ditetapkan di tingkat internasional.

Budaya tak benda yang diakui ini mencakup berbagai domain, termasuk adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Contohnya, beberapa WBTB yang diakui pada tahun 2023 antara lain Sadranan Mbah Jobeh, Upacara Adat Kirim Dowa, Upacara Adat Wot Galeh, Nyadran Joyo Kusumo,

Jamasan Pusaka Kyai Londoh, Nyadran Situs Tirto/Ki Gonotirto, Upacara Grebeg Ngenep, Saparan Kalibuko Kalirejo Kokap, dan Labuhan Parangkusumo.

Peningkatan persentase budaya tak benda yang dilestarikan ini mencerminkan komitmen kuat Pemda DIY dalam merawat dan mempromosikan kekayaan budaya yang tak berwujud. Upaya pelestarian ini tidak hanya mendukung identitas budaya lokal, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap warisan budaya di tingkat nasional dan internasional

BAB.

03

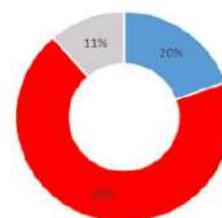
Jumlah Komposisi Penduduk dan Struktur Keluarga

Jumlah Penduduk DIY Tahun 2023



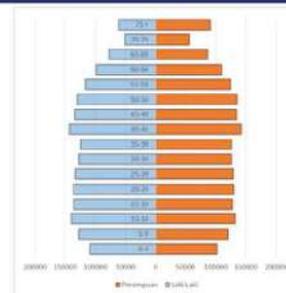
3.722.296 Jiwa

Rasio Ketergantungan



0-14 tahun 15-64 tahun 65 tahun ke atas

Piramida Penduduk DIY



Kepadatan Penduduk di DIY

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Distribusi Penduduk (%)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Kulon Progo	446.192	11,99	586,28	761,06
Bantul	972.161	26,12	506,85	1.918,04
Gunungkidul	776.622	20,86	1.485,36	522,85
Sleman	1.112.616	29,89	574,82	1.935,59
Kota Yogyakarta	414.705	11,14	32,50	12.760,15
Jumlah	3.722.296	100,00	3.185,81	1.168,40

Rasio Jenis Kelamin

98.0

sex ratio



1.842.667



1.879.629





BAB. 03

Jumlah Komposisi Penduduk dan Struktur Keluarga

1. Jumlah Penduduk

Kedudukan pembahasan jumlah penduduk dalam profil kependudukan sangat penting untuk memahami dinamika demografi suatu wilayah. Data ini memberikan gambaran tentang pertumbuhan penduduk, distribusi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan pembangunan yang efektif. Dengan mengetahui perubahan jumlah penduduk, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi.



Tabel 3.1 menunjukkan jumlah penduduk per kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tabel tersebut, jumlah penduduk di seluruh kabupaten/kota di DIY cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, jumlah penduduk DIY mencapai 3.722.296 jiwa. Kabupaten Sleman mencatat jumlah penduduk terbanyak dengan 1.112.616 jiwa, sementara Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 446.192 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk yang konsisten menyoroti dinamika demografi yang membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah. Pertumbuhan penduduk yang signifikan di Kabupaten Sleman menunjukkan perlunya pengembangan infrastruktur dan layanan publik yang memadai



Hal ini untuk mengakomodasi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Sementara itu, meskipun Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit, stabilitas dan peningkatan jumlah penduduk tetap menunjukkan potensi pengembangan lebih lanjut. Urbanisasi dan migrasi masuk ke Yogyakarta yang tinggi mencerminkan daya tarik daerah ini sebagai pusat pendidikan dan ekonomi, yang membutuhkan perencanaan kota yang lebih baik dan berkelanjutan.

Tabel 3. 1.
Jumlah Penduduk Per Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2018-2023					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	448.114	447.246	443.003	442.874	443.591	446.192
Bantul	939.718	949.325	954.706	956.513	964.245	972.161
Gunungkidul	765.284	769.907	774.609	774.441	775.246	776.622
Sleman	1.063.938	1.075.575	1.082.754	1.088.109	1.097.955	1.112.616
Kota Yogyakarta	413.961	414.055	416.117	415.509	412.797	414.705
DIY	3.631.015	3.656.108	3.671.189	3.677.446	3.693.834	3.722.296

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2018 - 2023

Gambaran perubahan jumlah penduduk di DIY menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Tren ini menegaskan pentingnya Yogyakarta sebagai magnet migrasi dan urbanisasi, yang memerlukan kebijakan proaktif dari pemerintah daerah untuk mengelola pertumbuhan ini dengan efektif. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan perencanaan kota yang berkelanjutan menjadi prioritas untuk menjaga kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk DIY yang terus meningkat.

Berdasarkan aspek pertumbuhan penduduk, Tabel 3.2 menunjukkan persentase perubahan penduduk per kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode 2018 hingga 2023. Tabel ini mencatat perubahan jumlah penduduk tahunan dan rata-rata pertumbuhan per tahun. Pada tahun 2023, rata-rata pertumbuhan penduduk DIY adalah 0,77%. Kabupaten Sleman mencatat pertumbuhan tertinggi dengan 1,33%,

sedangkan Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan -0,09% per tahun. Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,04% per tahun.

Tabel 3. 2.
Pertumbuhan Penduduk Per Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota	Perubahan Penduduk Tahun 2018-2023					Rata-rata per Tahun (%)
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	
Kulon Progo	-0,19	-0,95	-0,03	0,16	0,58	-0,09
Bantul	1,02	0,57	0,19	0,81	0,82	0,68
Gunungkidul	0,60	0,61	-0,02	0,10	0,18	0,29
Sleman	1,09	0,67	0,49	0,90	1,33	0,89
Kota Yogyakarta	0,02	0,50	-0,15	-0,65	0,46	0,04
DIY	0,69	0,41	0,17	0,44	0,77	0,50

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2018 - 2023

Pertumbuhan penduduk yang tidak merata di DIY menunjukkan perlunya perhatian khusus dari pemerintah daerah. Kabupaten Sleman, yang mencatat pertumbuhan tertinggi, membutuhkan pengembangan infrastruktur dan layanan publik yang lebih intensif untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penduduk. Sebaliknya, Kabupaten Kulon Progo, dengan pertumbuhan negatif, memerlukan kebijakan yang dapat mendorong stabilitas dan peningkatan jumlah penduduk, seperti pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup. Kota Yogyakarta, meskipun menunjukkan fluktuasi, tetap menjadi pusat pendidikan dan ekonomi yang menarik banyak penduduk baru, sehingga perencanaan kota yang lebih baik dan berkelanjutan sangat diperlukan. Perbedaan pertumbuhan ini menekankan pentingnya kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap daerah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan perencanaan kota yang berkelanjutan menjadi prioritas utama untuk mengelola pertumbuhan penduduk di DIY secara efektif.

B. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk sendiri ditunjukkan dengan nilai kepadatan penduduk (*population density*) yaitu banyaknya penduduk di suatu daerah dalam satuan kilometer persegi (BPS, 2023). Tabel 3.3 menampilkan data distribusi dan kepadatan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2023. Jumlah penduduk DIY tercatat sebanyak 3.722.296 jiwa dengan distribusi yang bervariasi di lima kabupaten/kota. Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 1.112.616 jiwa, dengan kepadatan 1.935,59 jiwa/km². Sebaliknya, Kabupaten Kulon Progo mencatat jumlah penduduk terendah dengan 446.192 jiwa dan kepadatan 761,06 jiwa/km². Kota Yogyakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi, mencapai 12.706,79 jiwa/km².

Tabel 3.3.

Distribusi dan Kepadatan Penduduk DIY, 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Distribusi Penduduk (%)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Kulon Progo	446.192	11,99	586,28	761,06
Bantul	972.161	26,12	506,85	1.918,04
Gunungkidul	776.622	20,86	1.485,36	522,85
Sleman	1.112.616	29,89	574,82	1.935,59
Kota Yogyakarta	414.705	11,14	32,50	12.760,15
Jumlah	3.722.296	100,00	3.185,81	1.168,40

Sumber: Kemendagri. Hasil Olahan DKB Semester II Tahun 2023

Kepadatan penduduk yang bervariasi di DIY disebabkan oleh beberapa faktor. Kota Yogyakarta, sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi, menarik banyak penduduk karena ketersediaan fasilitas yang lengkap dan aksesibilitas yang tinggi. Universitas-universitas besar dan pusat bisnis yang berada di kota ini menjadi magnet bagi pelajar dan pekerja dari berbagai daerah. Kabupaten Sleman, yang juga memiliki banyak fasilitas

pendidikan dan kesehatan, serta perkembangan perumahan yang pesat, mengalami kepadatan penduduk yang tinggi.

Sebaliknya, Kabupaten Kulon Progo memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah karena keterbatasan akses dan fasilitas. Meskipun demikian, potensi pengembangan ekonomi lokal melalui sektor pertanian dan industri kreatif tetap ada. Apalagi saat ini Bandara YIA dan kampus telah dibangun di sana. Kabupaten Gunungkidul, yang luas wilayahnya terbesar, juga menunjukkan kepadatan yang lebih rendah karena topografinya yang berbukit-bukit dan ketersediaan lahan yang belum optimal dimanfaatkan. Kabupaten Bantul, dengan kepadatan yang relatif tinggi, menunjukkan adanya kombinasi antara aksesibilitas yang baik dan pengembangan infrastruktur yang cukup maju.

C. Rasio Penduduk Laki-laki dan Perempuan

Rasio jenis kelamin menyatakan perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi dan waktu tertentu (Long *et al.*, 2021). Rasio jenis kelamin digunakan untuk menganalisis distribusi jenis kelamin dalam perencanaan pengembangan berwawasan gender, diharapkan muncul kesadaran akan pentingnya memperhatikan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.

Tabel 3. 4.
Jumlah Penduduk Menurut Gender dan Rasio Laki-laki/Perempuan
di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Penduduk		Rasio Jenis Kelamin
	L	P	
Kulon Progo	221.249	224.943	98,4
Bantul	483.891	488.270	99,1
Gunungkidul	384.550	392.072	98,1
Sleman	550.915	561.701	98,1
Kota Yogyakarta	202.062	212.643	95,0
Jumlah	1.842.667	1.879.629	98,0

Sumber: Kemendagri. hasil olahan DKB semester II tahun 2023

Tabel 3.4 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki (L) dan perempuan (P) di berbagai kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta rasio jenis kelamin (jumlah laki-laki per 100 perempuan). Data tersebut mencakup lima wilayah yaitu Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta, dengan total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan masing-masing ditampilkan bersama dengan rasio jenis kelamin.

Kondisi yang menonjol dari tabel tersebut adalah bahwa rasio jenis kelamin di semua wilayah cenderung berada di bawah 100. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki di setiap wilayah tersebut. Kota Yogyakarta memiliki rasio jenis kelamin terendah yaitu 95,0, yang berarti terdapat 95 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Rasio tertinggi terdapat di Bantul dengan 99,1, namun masih di bawah 100.

Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor demografis dan sosial. Perbedaan angka kelahiran dan kematian antara laki-laki dan perempuan, serta migrasi, dapat memengaruhi rasio jenis kelamin. Misalnya, perempuan cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang bisa menyebabkan populasi perempuan lebih besar pada usia yang lebih tua. Selain itu, migrasi penduduk bisa berperan, terutama jika lebih banyak perempuan yang menetap di wilayah tersebut dibandingkan laki-laki, atau jika laki-laki cenderung lebih banyak bermigrasi keluar untuk bekerja.

Tabel tersebut memperlihatkan rasio jenis kelamin (laki-laki per 100 perempuan) berdasarkan kelompok umur di berbagai wilayah di DIY, yaitu Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Data ini dipecah menjadi kelompok umur dari 0-4 tahun hingga 75 tahun ke atas. Selain itu, tabel juga menampilkan jumlah penduduk total di setiap wilayah dan rasio jenis kelamin total.

Tabel 3. 5.
Kelompok Umur dan Rasio Laki-laki/Perempuan di Kabupaten/Kota
se-DIY Tahun 2023

Golongan Umur	Rasio Laki-Laki/Perempuan (%)					
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
Umur 0-4	110,45	106,07	106,48	106,84	107,51	107,05
Umur 5-9	106,19	105,62	106,55	105,44	105,41	105,78
Umur 10-14	107,44	106,57	108,20	105,19	102,41	106,07
Umur 15-19	104,57	104,63	106,77	104,01	104,64	104,86
Umur 20-24	102,93	102,57	106,37	103,86	103,91	103,93
Umur 25-29	104,70	100,23	106,75	102,21	100,10	102,66
Umur 30-34	100,36	97,94	104,24	97,83	97,40	99,34
Umur 35-39	98,40	99,27	104,20	97,05	95,57	98,98
Umur 40-44	100,19	102,66	103,04	99,32	95,63	100,59
Umur 45-49	99,41	101,02	97,94	97,53	93,62	98,28
Umur 50-54	96,97	96,60	94,99	95,49	89,72	95,18
Umur 55-59	92,46	93,74	89,86	91,91	87,08	91,45
Umur 60-64	91,17	92,55	88,09	88,49	84,04	89,29
Umur 65-69	91,33	98,07	89,09	91,11	83,26	91,40
Umur 70-74	87,05	90,46	90,33	85,10	79,06	87,42
Umur 75 keatas	66,42	66,47	66,00	72,98	56,66	67,11
Rasio Total Jumlah Penduduk	98,20	99,02	98,02	98,01	95,08	97,96
Jumlah Penduduk	443.591	964.245	775.246	1.097.955	412.797	3.693.834

Sumber: Kemendagri. hasil olahan DKB semester II tahun 2023

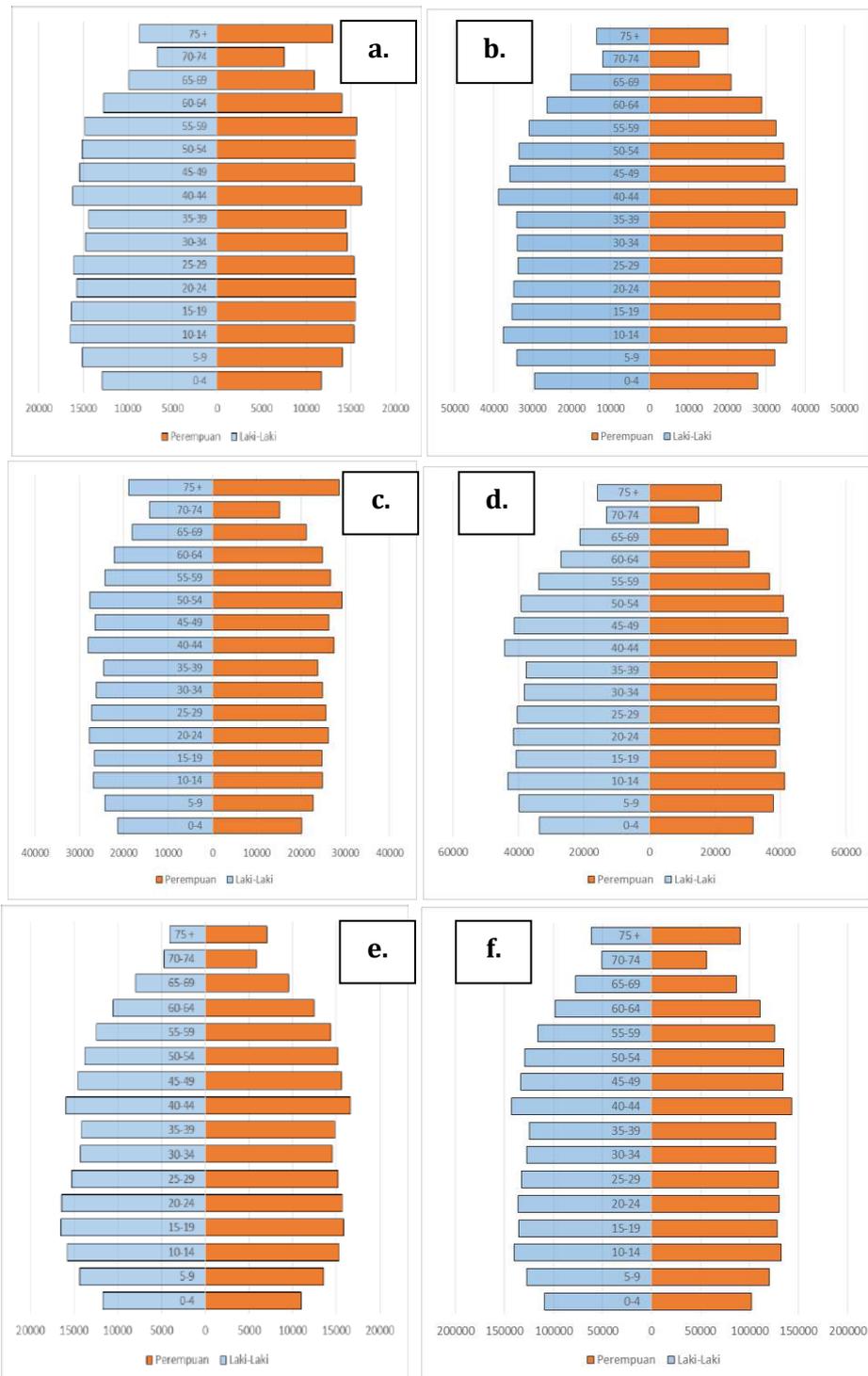
Kondisi yang menonjol dari tabel ini adalah bahwa rasio jenis kelamin cenderung menurun dengan bertambahnya usia di hampir semua wilayah. Pada kelompok usia muda, khususnya 0-4 tahun hingga 19-24 tahun, rasio jenis kelamin seringkali berada di atas 100, yang berarti jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun, setelah usia 25 tahun, rasio ini mulai turun, terutama pada kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas), di mana rasio jenis kelamin cenderung berada di bawah 100. Rasio terendah ditemukan pada kelompok usia 75 tahun ke atas di semua wilayah, dengan angka yang sangat rendah, seperti 57,66 di Kota Yogyakarta.

Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perbedaan angka harapan hidup antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan umumnya memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Selain itu, faktor risiko kesehatan yang lebih tinggi di kalangan laki-laki, seperti penyakit kronis dan perilaku berisiko, juga berkontribusi terhadap menurunnya jumlah laki-laki pada usia lanjut. Di usia muda, rasio lebih tinggi kemungkinan besar karena angka kelahiran laki-laki biasanya sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun, seiring bertambahnya usia, tingkat kematian yang lebih tinggi di kalangan laki-laki menyebabkan rasio tersebut menurun secara signifikan.

D. Piramida Penduduk

Analisis struktur umur populasi merupakan bagian penting dari analisis demografi. Komposisi populasi dapat digambarkan dengan grafik selain dengan metode numerik. Piramida penduduk adalah salah satu grafik yang paling banyak digunakan. Piramida penduduk adalah grafik batang yang merefleksikan populasi menurut jenis kelamin. Diagram ini memiliki sumbu vertikal (tegak) untuk rentang usia penduduk dan sumbu horizontal (datar) untuk menggambarkan jumlah populasi pada tiap rentang usia (Simosir dan Rajagukguk, 2015).

Bagian dasar piramida biasanya menunjukkan kelompok usia muda, dan bagian atas menunjukkan kelompok usia tua. Jenis kelamin ditunjukkan pada bagian kiri dan kanan piramida penduduk. Bagian kiri menunjukkan jumlah orang laki-laki, dan bagian kanan menunjukkan jumlah orang perempuan. Piramida penduduk digunakan untuk melihat pola pertumbuhan populasi, ketimpangan jenis kelamin, dan dampak sosial-ekonomi yang terkait (Simosir dan Rajagukguk, 2015). Berdasarkan Gambar 3.1, bentuk piramida penduduk di DIY masuk ke dalam kategori piramida stasioner menuju tua.



Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo (a.), Bantul (b.), Gunungkidul (c.), Sleman (d.), Kota Yogyakarta (e.) dan DIY (f.) Tahun 2023
 Sumber: Kemendagri. hasil olahan DKB semester II tahun 2023

Piramida penduduk DIY tahun 2023 menunjukkan struktur yang mencerminkan distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin. Grafik ini berbentuk kerucut dengan basis yang lebih lebar dan puncak yang mengecil. Penduduk laki-laki diwakili dengan warna biru, sementara penduduk perempuan diwakili dengan warna oranye. Basis piramida yang cukup lebar menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) cukup besar, mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran di DIY masih cukup tinggi. Populasi yang besar pada kelompok usia muda berarti bahwa pemerintah perlu fokus pada peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan anak.

Kelompok usia produktif (15-64 tahun) sangat dominan dalam piramida penduduk DIY, dengan puncak terbesar berada di kelompok usia 20-24 dan 25-29 tahun. Ini mencerminkan banyaknya generasi muda yang siap memasuki pasar kerja dan merupakan potensi besar bagi perekonomian DIY jika tenaga kerja ini dapat diberdayakan dengan baik. Di sisi lain, jumlah penduduk mulai menurun signifikan pada kelompok usia tua (65 tahun ke atas), namun masih terdapat populasi yang cukup berarti pada usia 70-74 dan 75+. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan harapan hidup di DIY, yang berarti kualitas layanan kesehatan cukup baik. Namun, peningkatan populasi usia tua juga memerlukan perhatian lebih pada layanan kesehatan dan sosial yang mendukung mereka.

Struktur piramida penduduk seperti ini sering ditemukan pada daerah yang sedang mengalami transisi demografi menuju populasi yang semakin menua. Ini sejalan dengan tren di banyak daerah di Indonesia, di mana kualitas hidup dan kesehatan yang meningkat menyebabkan penurunan angka kematian dan peningkatan angka harapan hidup. Dengan kelompok usia produktif yang besar, DIY memiliki potensi tenaga kerja yang besar. Jika dikelola dengan baik, ini dapat menjadi aset besar bagi perekonomian daerah. Namun, perlu adanya persiapan untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk usia tua di masa mendatang.

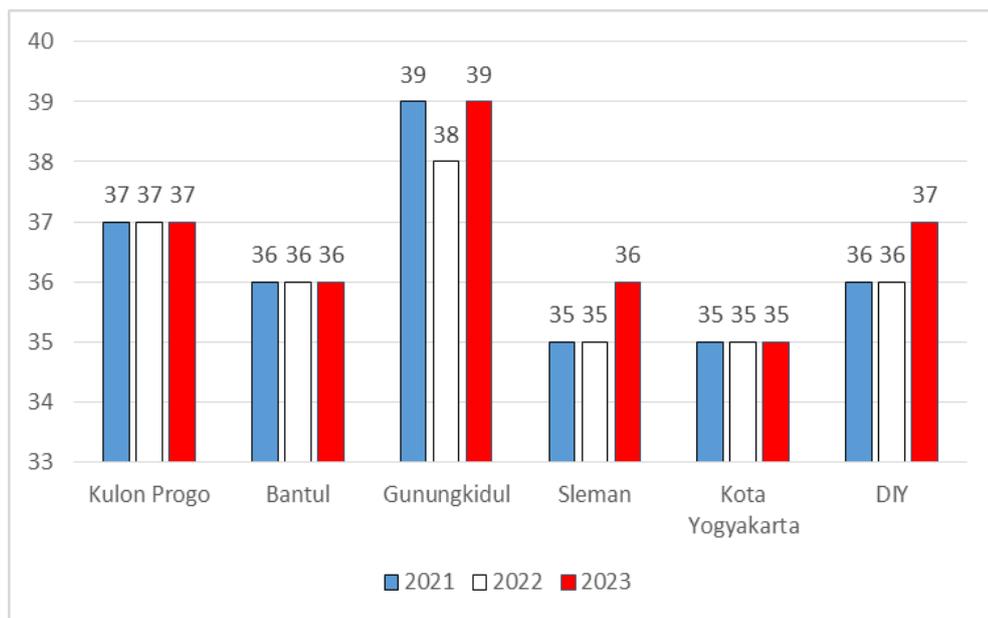
Peningkatan jumlah penduduk usia tua memerlukan perhatian lebih pada layanan kesehatan dan sosial. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan kelompok usia ini. Dengan banyaknya penduduk usia muda dan produktif, investasi dalam sektor pendidikan dan pelatihan sangat penting. Hal ini untuk memastikan bahwa kelompok usia muda ini dapat memasuki pasar kerja dengan keterampilan yang memadai. Secara keseluruhan, strategi kebijakan di DIY harus diarahkan untuk memanfaatkan potensi kelompok usia produktif sembari mempersiapkan diri untuk tantangan dari populasi yang menua.

E. Median Penduduk

Umur yang membagi populasi menjadi dua bagian yang sama adalah dikenal sebagai umur median. Setengah dari populasi berusia di bawah umur median dan setengahnya berusia di atas umur median. Untuk mengetahui tingkat pemusatan penduduk pada kelompok umur tertentu dan untuk melihat karakterisasi populasi yang menua, ukuran umur median dapat digunakan untuk menentukan kategori penduduk suatu wilayah. Kategori ini disebut penduduk muda jika umur median kurang dari 20 tahun, penduduk menengah (*intermediate*) jika umur median antara 20 dan 29 tahun, dan penduduk tua jika umur median lebih dari 30 tahun. Negara yang berkembang biasanya memiliki umur median yang lebih rendah daripada negara maju. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti harapan hidup yang lebih tinggi.

Umur median di DIY pada 2023 sebesar 37. Jika dibandingkan capaian dua tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Umur median di DIY dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan tren yang konsisten di semua kabupaten/kota. Di Kulon Progo, umur median tetap stabil di angka 37 tahun selama tiga tahun berturut-turut. Bantul juga menunjukkan kestabilan dengan umur median yang konsisten di angka 36 tahun. Di Gunungkidul, umur median sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah lain, yaitu di angka 39

tahun pada 2023. Sleman menunjukkan kenaikan pada tahun 2023 dengan umur median di angka 36 tahun. Kota Yogyakarta memiliki umur median yang sedikit lebih rendah, stabil di angka 35 tahun, sementara secara keseluruhan DIY menunjukkan umur median yang naik di angka 37 tahun pada 2024.



Gambar 3. 2. Umur Median Penduduk di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021,2022 dan 2023

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2021-2023

Berdasarkan data ini, dapat dilihat bahwa tidak ada fluktuasi signifikan dalam umur median di DIY dan kabupaten/kotanya selama periode tiga tahun tersebut. Umur median yang relatif stabil ini menunjukkan bahwa struktur umur penduduk DIY tidak mengalami perubahan demografis yang besar. Beberapa literatur demografi menunjukkan bahwa kestabilan dalam umur median bisa mengindikasikan tingkat kelahiran dan kematian yang juga stabil, serta sedikit perubahan dalam pola migrasi. Hal ini bisa diartikan bahwa DIY memiliki kondisi demografis yang relatif stabil dengan sedikit variasi dalam struktur umurnya.

Jika dibandingkan antarwilayah, umur median yang lebih tinggi di Gunungkidul menunjukkan bahwa daerah ini memiliki populasi yang lebih tua dibandingkan daerah lain di DIY. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti migrasi keluar yang lebih tinggi dari kalangan usia muda atau tingkat kelahiran yang lebih rendah. Sebaliknya, Kota Yogyakarta yang memiliki umur median lebih rendah diduga kuat disebabkan oleh adanya populasi mahasiswa yang besar, mengingat kota ini merupakan pusat pendidikan dengan banyak universitas dan institusi pendidikan tinggi.

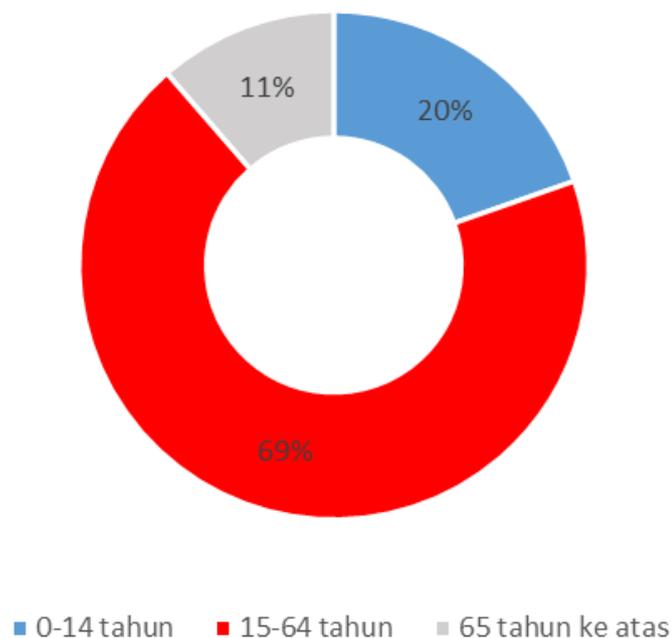
Implikasi dari temuan ini adalah bahwa kebijakan pemerintah DIY perlu mempertimbangkan kestabilan demografis ini dalam perencanaan jangka panjang. Dengan umur median yang stabil, program-program sosial dan ekonomi dapat dirancang untuk mempertahankan kesejahteraan penduduk. Namun, perhatian khusus perlu diberikan kepada daerah seperti Gunungkidul yang memiliki populasi lebih tua, sehingga diperlukan kebijakan yang mendukung kebutuhan khusus mereka, seperti layanan kesehatan untuk usia lanjut. Di sisi lain, Kota Yogyakarta mungkin memerlukan kebijakan yang mendukung populasi muda, seperti peluang pendidikan dan pekerjaan bagi mahasiswa dan lulusan baru. Dengan demikian, strategi kebijakan harus disesuaikan dengan karakteristik demografis masing-masing daerah untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh DIY.

F. Rasio Beban Tanggungan

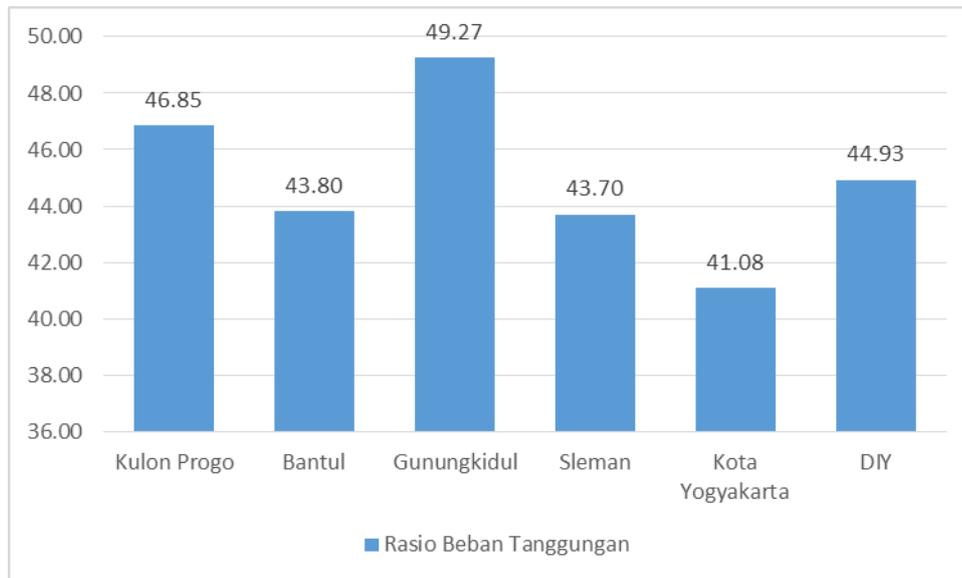
Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk produktif (usia kerja 15-64 tahun) dan penduduk tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan 65 tahun atau lebih). Rasio ini menunjukkan angka beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk produktif (usia kerja) (Setiawan, 2017). Karena rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan yang dibicarakan dalam studi demografi lebih sering disebut sebagai rasio ketergantungan usia karena lebih merupakan perbandingan antara

penduduk muda dan penduduk tua dengan penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan, meskipun tidak akurat secara ekonomi, dapat menunjukkan berapa banyak beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja (Lembaga Demografi FEUI, 2010).

Berdasarkan data demografi yang disajikan pada Gambar 3.3, dapat diamati variasi distribusi penduduk di DIY. Secara keseluruhan di DIY, jumlah penduduk usia muda mencapai 730.937 jiwa (20%), usia produktif 2.568.353 jiwa (69%), dan usia lanjut 423.006 jiwa (11%), dengan rasio beban tanggungan 44,93%. Pada Gambar 3.4, rasio beban tanggungan di Kulon Progo adalah 46,85%. Kabupaten Bantul memiliki rasio beban tanggungan sebesar 43,80%. Kabupaten Gunungkidul memiliki rasio beban tanggungan 49,27%. Kabupaten Sleman memiliki rasio beban tanggungan 43,70%. Kota Yogyakarta memiliki rasio beban tanggungan 41,08%.



Gambar 3. 3. Proporsi Penduduk Produktif dan Non Produktif di DIY Tahun 2023
Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2023



Gambar 3. 4. Rasio Ketergantungan per Kabupaten Kota di DIY Tahun 2023
 Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2023

Data-data ini menunjukkan bahwa DIY memiliki proporsi penduduk usia produktif yang tinggi, yang dapat menjadi potensi bagi pembangunan ekonomi daerah. Namun, tingginya rasio beban tanggungan di Gunungkidul (49,27%) menunjukkan bahwa daerah ini memiliki jumlah penduduk usia non-produktif (usia muda dan lanjut) yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain, yang dapat menjadi tantangan dalam hal penyediaan layanan sosial dan kesehatan. Sementara itu, Kota Yogyakarta memiliki rasio beban tanggungan terendah (41,08%), yang mungkin mencerminkan tingkat urbanisasi yang lebih tinggi dan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Jika dibandingkan dengan literatur yang ada, proporsi penduduk usia produktif yang tinggi di DIY sesuai dengan tren nasional di Indonesia, di mana terjadi bonus demografi yang dapat meningkatkan potensi ekonomi jika diiringi dengan kebijakan yang tepat. Namun, literatur juga menunjukkan bahwa rasio beban tanggungan yang tinggi, seperti yang terlihat di Gunungkidul, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menambah beban pada sistem sosial dan kesehatan.

Secara signifikan, temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan daerah yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, terutama di daerah dengan rasio beban tanggungan tinggi. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai, menjadi kunci dalam memanfaatkan potensi demografi DIY untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

G. Struktur Keluarga

1. Kepala Keluarga

Berdasarkan data jumlah kepala keluarga di DIY tahun 2023, terlihat perbedaan signifikan antara jumlah kepala keluarga laki-laki dan perempuan di setiap kabupaten/kota. Di Kabupaten Kulon Progo, jumlah kepala keluarga laki-laki mencapai 125.696 jiwa, sementara kepala keluarga perempuan berjumlah 31.079 jiwa, dengan total 156.775 kepala keluarga. Kabupaten Bantul mencatat 273.416 kepala keluarga laki-laki dan 68.836 kepala keluarga perempuan, dengan total 342.252 kepala keluarga. Di Kabupaten Gunungkidul, terdapat 220.574 kepala keluarga laki-laki dan 43.889 kepala keluarga perempuan, dengan total 264.463 kepala keluarga. Kabupaten Sleman mencatat jumlah kepala keluarga laki-laki sebesar 305.036 jiwa dan kepala keluarga perempuan sebesar 83.880 jiwa, dengan total 388.916 kepala keluarga. Kota Yogyakarta memiliki 105.453 kepala keluarga laki-laki dan 39.306 kepala keluarga perempuan, dengan total 144.759 kepala keluarga. Secara keseluruhan, DIY mencatat jumlah kepala keluarga laki-laki sebanyak 1.030.175 jiwa dan kepala keluarga perempuan sebanyak 266.990 jiwa, dengan total 1.297.165 kepala keluarga.

Hasil ini menunjukkan dominasi jumlah kepala keluarga laki-laki dibandingkan perempuan di setiap kabupaten/kota di DIY. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor budaya dan sosial yang masih kuat di masyarakat, di mana peran kepala keluarga lebih banyak diemban oleh laki-

laki. Dominasi ini terlihat konsisten di seluruh wilayah DIY, dengan proporsi kepala keluarga laki-laki yang jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Tabel 3. 6.

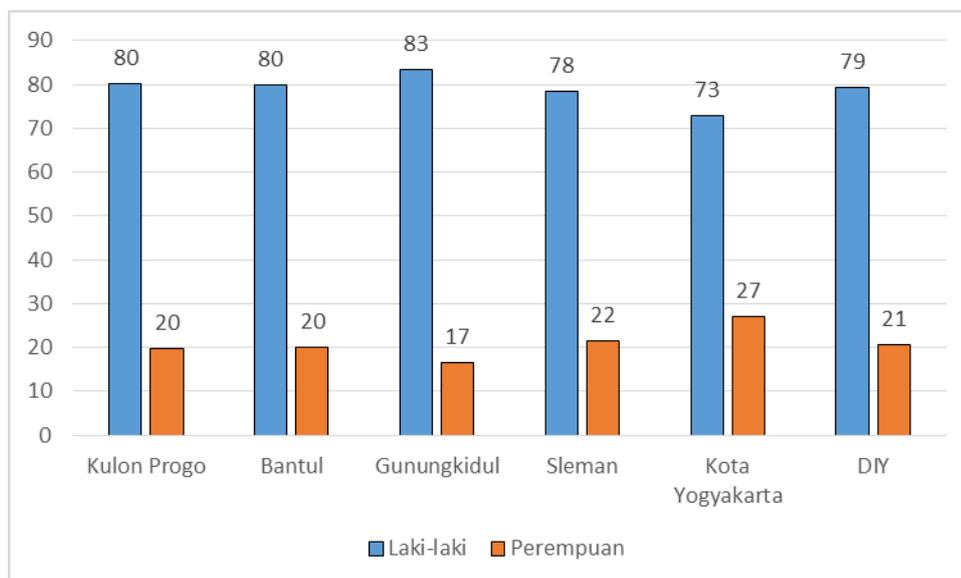
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Penduduk		Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
Kulon Progo	125.696	31.079	156.775
Bantul	273.416	68.836	342.252
Gunungkidul	220.574	43.889	264.463
Sleman	305.036	83.880	388.916
Kota Yogyakarta	105.453	39.306	144.759
DIY	1.030.175	266.990	1.297.165

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2023

Jika dibandingkan dengan literatur, dominasi kepala keluarga laki-laki ini mencerminkan pola yang umum di banyak daerah di Indonesia (Dimeng et al., 2024). Menurut studi, distribusi peran kepala keluarga yang berat sebelah ini sering kali terkait dengan norma budaya patriarki yang masih kuat, di mana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama (Zuhri & Amalia, 2022; Halizah & Faralita, 2023; Syahrizan & Siregar, 2024). Di sisi lain, literatur juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kepala keluarga perempuan dapat terjadi seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam tenaga kerja dan peran ekonomi (Renie, 2020; Putri & Anzari, 2021; Khairunnisa et al., 2022).

Secara signifikan, temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih inklusif untuk mendukung kepala keluarga perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat perlu diperkuat. Kebijakan ini tidak hanya akan membantu mencapai kesetaraan gender tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi keluarga di DIY.



Gambar 3.5 Persentase Kepala Keluarga Menurut Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2023

2. Status Hubungan dengan Kepala Keluarga

Untuk melihat struktur keluarga di wilayah yang dikaji, status hubungan dengan kepala keluarga dalam profil kependudukan sangat penting karena menunjukkan bagaimana individu atau keluarga lainnya yang bertempat tinggal di suatu rumah dan memiliki peran masing-masing dalam rumah tangga berhubungan dengan kepala keluarga. Sesuai dengan Lampiran Permendagri No. 65 Tahun 2010, klasifikasi berdasarkan hubungan dengan kepala rumah tangga akan diklasifikasikan menjadi suami, istri, anak, menantu, cucu, orang tua, mertua, keluarga lain, pembantu, dan lainnya.

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut status hubungan dengan kepala keluarga di Kabupaten/Kota se-DIY tahun 2023, terlihat variasi dalam komposisi keluarga di setiap wilayah. Secara keseluruhan di DIY, jumlah suami sebagai kepala keluarga mencapai 232 orang, istri sebanyak 891.724 orang, dan anak sebanyak 1.408.172 orang. Jumlah menantu tercatat 6.690

orang, cucu 36.185 orang, orang tua 20.843 orang, mertua 5.456 orang, famili lain 41.852 orang, pembantu 88 orang, dan lainnya 6.819 orang.

Tabel 3. 7.
Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan dengan Kepala Keluarga di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Hubungan dengan Kepala Keluarga	Kabupaten/Kota					DIY
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	
Suami	20	14	16	46	136	232
Istri	109.696	236.822	199.254	261.009	84.943	891.724
Anak	165.949	374.890	262.014	438.737	166.582	1.408.172
Menantu	242	176	5.355	506	411	6.690
Cucu	4.177	5.329	13.743	7.362	5.583	36.194
Orang Tua	3.430	2.589	10.325	2.318	681	19.343
Mertua	1.117	1.182	12.305	1.070	346	16.020
Famili Lain	4.309	8.011	7.282	9.945	10.302	39.849
Pembantu	12	3	7	38	28	88
Lainnya	465	893	1.858	2.669	934	6.819

Sumber: Kemendagri. hasil olahan DKB semester II tahun 2023

Hasil ini menunjukkan bahwa anak-anak merupakan kelompok terbesar dalam keluarga di DIY, mencerminkan tingginya angka kelahiran dan peran penting anak dalam struktur keluarga. Jumlah istri sebagai anggota keluarga juga sangat besar, menandakan peran dominan perempuan dalam mendukung keluarga. Sementara itu, jumlah orang tua dan mertua yang cukup signifikan menunjukkan adanya tanggung jawab keluarga dalam merawat generasi yang lebih tua.

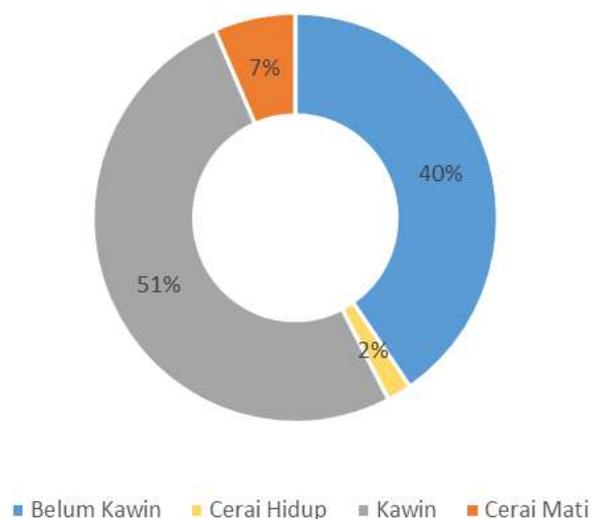
Literatur menunjukkan bahwa komposisi keluarga seperti ini umum ditemukan di banyak daerah di Indonesia, di mana struktur keluarga cenderung multigenerasional. Hal ini mencerminkan budaya yang kuat dalam menjaga ikatan keluarga dan tanggung jawab terhadap anggota keluarga yang lebih tua. Di sisi lain, literatur juga menunjukkan bahwa pergeseran demografis dan perubahan sosial dapat memengaruhi struktur keluarga,

seperti peningkatan keluarga inti dan perubahan peran gender dalam keluarga.

Secara signifikan, temuan ini mengindikasikan pentingnya kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan yang mencakup semua anggota keluarga. Perlunya perhatian khusus pada kelompok rentan seperti anak-anak dan orang tua juga menjadi penting untuk memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup yang baik bagi semua anggota keluarga di DIY.

3. Status Perkawinan

Status perkawinan adalah status hukum yang menggambarkan keadaan seseorang dalam hubungan pernikahan. Status perkawinan penduduk berdasarkan klasifikasi dari BPS dibagi menjadi status perkawinan belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Berdasarkan diagram status perkawinan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), distribusi status perkawinan menunjukkan bahwa 51% dari penduduk DIY berstatus kawin, 40% berstatus belum kawin, 7% berstatus cerai mati, dan 2% berstatus cerai hidup.



Gambar 3.6 Persentase Status Perkawinan Penduduk di DIY Tahun 2023
Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2023

Proporsi terbesar penduduk yang telah menikah (51%) mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk dewasa di DIY menjalani kehidupan berkeluarga. Sementara itu, persentase penduduk yang belum kawin sebesar 40% menunjukkan bahwa hampir setengah dari populasi berada dalam usia produktif namun belum memasuki jenjang pernikahan. Status cerai mati mencatat angka 7%, sedangkan cerai hidup sebesar 2%, menunjukkan adanya perceraian tetapi dalam jumlah yang relatif kecil.

Hasil ini menunjukkan bahwa pernikahan masih menjadi norma sosial yang dominan di DIY, dengan lebih dari separuh penduduk telah menikah. Tingginya persentase penduduk belum kawin juga mencerminkan fenomena sosial, seperti penundaan pernikahan yang mungkin disebabkan oleh faktor pendidikan, karier, atau alasan pribadi lainnya. Persentase perceraian yang relatif rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang menikah menunjukkan stabilitas pernikahan di wilayah ini.

Literatur menunjukkan bahwa tren pernikahan dan perceraian di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, agama, pendidikan, dan kondisi ekonomi (Alfa, 2019; Octaviani & Nurwati, 2020; Dewi et al., 2024). Penundaan pernikahan sering kali dikaitkan dengan peningkatan tingkat pendidikan dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Di sisi lain, angka perceraian yang rendah dapat mencerminkan nilai-nilai budaya yang kuat terhadap institusi pernikahan dan stigma sosial terhadap perceraian.

Temuan ini memiliki implikasi signifikan bagi kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan keluarga di DIY. Program pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya persiapan pernikahan dan dukungan bagi pasangan suami istri dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Selain itu, layanan konseling pernikahan dan dukungan bagi individu yang bercerai juga penting untuk memastikan kesejahteraan emosional dan sosial penduduk. Kebijakan yang mendukung keseimbangan

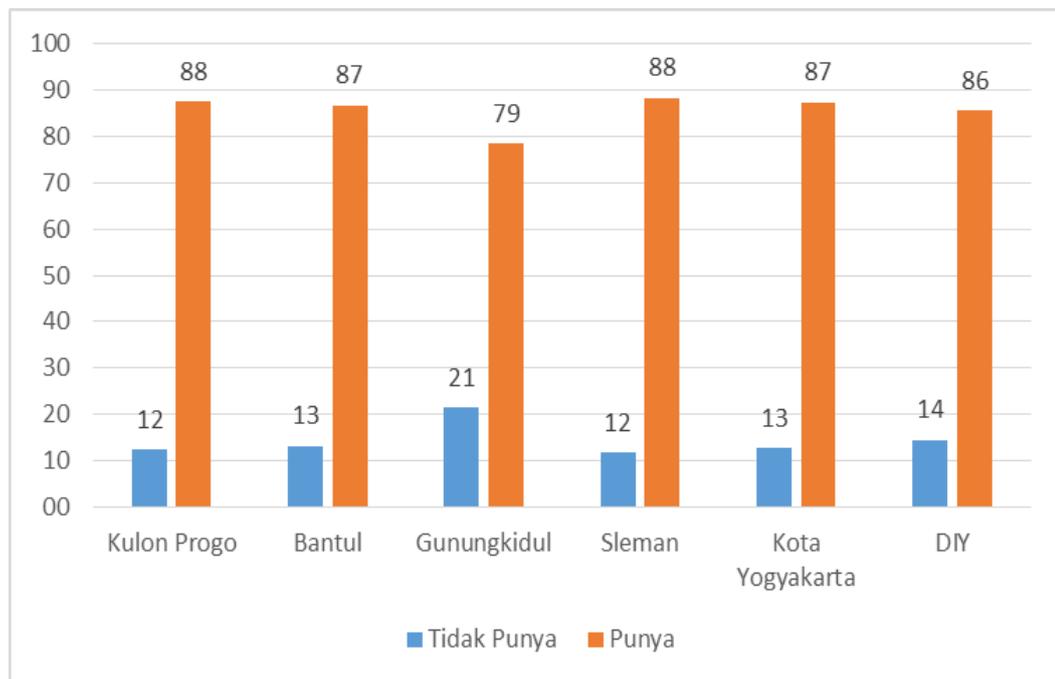
antara kehidupan kerja dan keluarga juga menjadi penting untuk memungkinkan individu menjalani kehidupan keluarga yang harmonis dan produktif.

4. Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta perkawinan adalah pengakuan negara atas pernikahan yang berlangsung antara suami dan istri menurut agama dan kepercayaan. Dokumen ini diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah seorang pria dan seorang perempuan melangsungkan perkawinan yang sah. Menurut Biro Tapem Setda DIY (2020), akta perkawinan berfungsi sebagai pembuktian formal dan material yang mengikat kedua belah pihak. Ini memainkan peran penting dalam memverifikasi legalitas dan kewajiban hukum hubungan perkawinan seseorang.

Gambar 3.7 menunjukkan persentase kepemilikan akta pernikahan di Kabupaten/Kota se-DIY tahun 2023. Data ini diambil dari Kemendagri, berdasarkan hasil olahan DKB semester II tahun 2023. Kepemilikan akta pernikahan adalah indikator penting yang menunjukkan legalitas pernikahan dan akses penduduk terhadap layanan administrasi kependudukan.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa kepemilikan akta pernikahan bervariasi antara kabupaten dan kota di DIY. Kabupaten Sleman mencatat persentase kepemilikan akta pernikahan tertinggi (88%), diikuti oleh Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Tingginya persentase kepemilikan akta pernikahan di Sleman dan Kota Yogyakarta bisa dihubungkan dengan akses yang lebih baik terhadap layanan administrasi dan tingkat pendidikan penduduk yang lebih tinggi. Di sisi lain, Kabupaten Gunungkidul yang memiliki persentase kepemilikan akta pernikahan terendah, menunjukkan adanya tantangan dalam penyediaan layanan administrasi kependudukan atau tingkat kesadaran yang masih perlu ditingkatkan di kalangan penduduk.



Gambar 3.7 Persentase Kepemilikan Akta Pernikahan di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Sumber: Kemendagri. hasil olahan DKB semester II tahun 2023

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun DIY secara umum memiliki kesadaran yang baik terhadap pentingnya akta pernikahan, masih terdapat disparitas antara daerah yang perlu diperhatikan. Tingginya persentase kepemilikan akta pernikahan di beberapa daerah mencerminkan keberhasilan program-program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan akses terhadap layanan administrasi kependudukan.

Jika dibandingkan dengan literatur, variasi dalam kepemilikan akta pernikahan ini konsisten dengan temuan sebelumnya, di mana daerah dengan akses lebih baik terhadap pendidikan dan layanan administrasi cenderung memiliki tingkat kepemilikan dokumen legal yang lebih tinggi (Resmini *et al.*, 2020). Literasi dan kesadaran hukum juga memainkan peran penting dalam hal ini. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan dokumen legal seperti akta perkawinan berkorelasi dengan stabilitas sosial dan ekonomi keluarga, serta akses terhadap layanan publik lainnya.

Pentingnya kepemilikan akta perkawinan ini terletak pada keabsahan hukum status pernikahan serta perlindungan dan hak-hak yang diberikan kepada pasangan yang sah secara hukum. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta perkawinan melalui sosialisasi serta mempermudah aksesibilitas dan proses administrasi dalam mendapatkan akta perkawinan. Dengan meningkatnya capaian kepemilikan akta perkawinan, diharapkan pasangan dapat lebih mudah mendapatkan hak-hak dan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.

5. Struktur Agama Penduduk

Struktur agama penduduk mengacu kepada komposisi dan organisasi agama yang dianut oleh penduduk dalam suatu wilayah. Struktur agama penduduk dapat berubah seiring waktu karena perubahan demografi, migrasi, perubahan sikap dan keyakinan individu, serta pengaruh budaya atau globalisasi. Oleh karena itu, struktur agama penduduk merupakan konsep yang dinamis dan selalu berubah sejalan dengan perkembangan masyarakat dan dunia modern.

Tabel 3.12 menunjukkan distribusi agama di Kabupaten/Kota se-DIY. Mayoritas penduduk DIY menganut agama Islam, dengan persentase tertinggi tercatat di Kabupaten Gunungkidul (96,5%) dan terendah di Kota Yogyakarta (83,7%). Persentase penganut Kristen bervariasi, dengan angka tertinggi di Kota Yogyakarta (6,2%) dan terendah di Kabupaten Kulon Progo dan Bantul (1,3%). Agama Katolik juga menunjukkan variasi serupa, dengan persentase tertinggi di Kota Yogyakarta (9,7%) dan terendah di Kabupaten Gunungkidul (1,6%). Agama Hindu, Buddha, dan Konghuchu memiliki penganut dalam jumlah kecil di semua wilayah, dengan persentase tidak melebihi 0,1%. Aliran kepercayaan juga memiliki penganut yang sangat sedikit, dengan persentase tertinggi di Kabupaten Gunungkidul (0,030%).

Hasil ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama mayoritas di DIY, dengan lebih dari 90% penduduk menganut agama ini di sebagian besar kabupaten/kota. Keberadaan penganut Kristen dan Katolik menunjukkan keragaman agama yang lebih signifikan di Kota Yogyakarta dibandingkan dengan daerah lain. Persentase kecil penganut agama Hindu, Buddha, Konghuchu, dan aliran kepercayaan menunjukkan adanya keberagaman agama minoritas di DIY.

DIY merupakan daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, namun juga memiliki tradisi toleransi beragama yang kuat. Keberagaman agama ini sering kali mencerminkan sejarah migrasi dan dinamika sosial di wilayah tersebut. Daerah dengan urbanisasi tinggi seperti Kota Yogyakarta cenderung memiliki keragaman agama yang lebih besar dibandingkan dengan daerah pedesaan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga harmoni antarumat beragama.

Tabel 3.8.
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan di Kabupaten/Kota se-DIY
Tahun 2023

Agama	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
Islam	423.156	933.601	749.499	1.007.630	347.017	3.460.903
Kristen	5.625	12.777	12.780	32.935	25.839	89.956
Katholik	16.791	24.759	12.797	70.118	40.225	164.690
Hindu	25	773	946	1.162	464	3.370
Budha	580	207	364	713	1.105	2.969
Konghuchu	-	1	2	32	25	60
Aliran Kepercayaan	15	43	234	26	30	348
N	446.192	972.161	776.622	1.112.616	414.705	3.722.296

Sumber: Kemendagri. hasil olah DKB semester II tahun 2023

H. Disabilitas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Tabel 3.9 menunjukkan jumlah penduduk dengan disabilitas di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berdasarkan jenis kelamin dan jenis disabilitas. Data ini mencakup berbagai jenis disabilitas termasuk fisik, netra/buta, rungu/wicara, mental/jiwa, fisik dan mental, serta kategori lainnya.

Secara keseluruhan di DIY, jumlah penduduk laki-laki dengan disabilitas fisik adalah yang paling banyak di Kabupaten Sleman, sedangkan disabilitas mental/jiwa juga paling banyak di Sleman. Data ini menunjukkan bahwa disabilitas mental/jiwa adalah jenis disabilitas yang paling dominan di DIY, yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Hasil ini menunjukkan bahwa ada variasi yang signifikan dalam jumlah dan jenis disabilitas di setiap kabupaten/kota di DIY. Literatur menunjukkan bahwa penduduk dengan disabilitas sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Studi juga menunjukkan pentingnya dukungan keluarga dan komunitas dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan disabilitas.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pemerintah daerah. Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk menyediakan layanan yang komprehensif dan inklusif bagi penduduk dengan disabilitas. Program rehabilitasi, pendidikan khusus, dan pelatihan keterampilan kerja harus diperluas untuk mencakup semua jenis disabilitas. Selain itu, peningkatan

kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kebutuhan penduduk dengan disabilitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas di DIY.

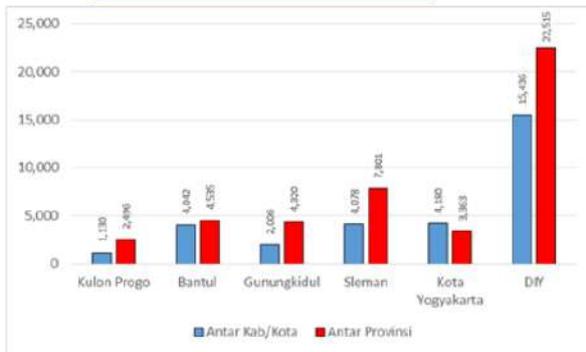
Tabel 3.9.
Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas
di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

WILAYAH	KAB. KULON PROGO	KAB. BANTUL	KAB. GUNUNGGIDUL	KAB. SLEMAN	KOTA YOGYAKARTA
DISABILITAS FISIK L	158	260	246	1711	172
DISABILITAS FISIK P	132	193	195	1337	160
DISABILITAS NETRA/BUTA L	82	121	113	245	88
DISABILITAS NETRA/BUTA P	55	113	116	206	76
DISABILITAS RUNGU/WICARA L	151	312	241	437	172
DISABILITAS RUNGU/WICARA P	133	275	209	396	161
DISABILITAS MENTAL/JIWA L	714	1468	1180	1925	720
DISABILITAS MENTAL/JIWA P	450	844	734	1287	420
DISABILITAS FISIK DAN MENTAL L	48	80	100	175	49
DISABILITAS FISIK DAN MENTAL P	44	78	73	161	35
DISABILITAS LAINNYA L	57	126	51	488	182
DISABILITAS LAINNYA P	47	131	41	365	155

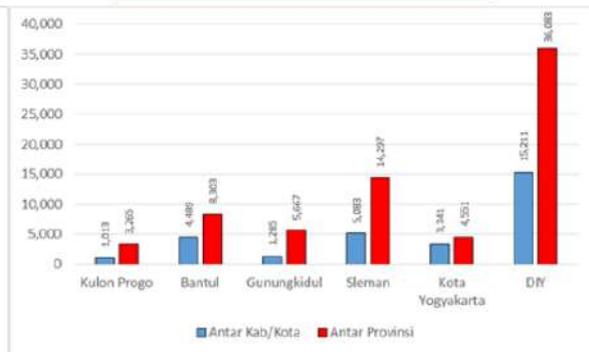
Sumber: Kemendagri. Hasil Olah DKB Semester II Tahun 2023

BAB. 04 Kelahiran, Kematian, Penduduk Datang dan Pergi

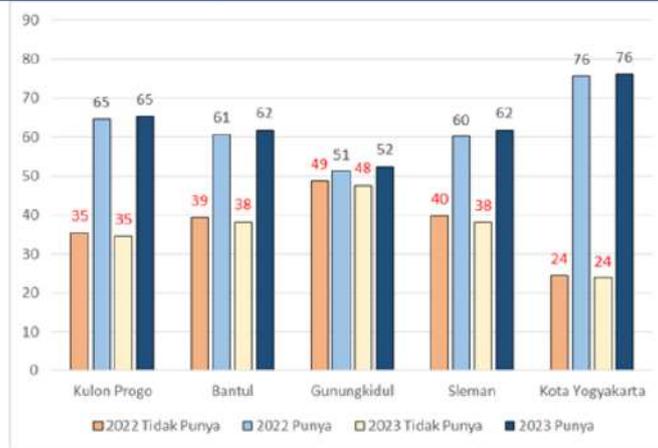
Penduduk Pergi



Penduduk Datang



Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran





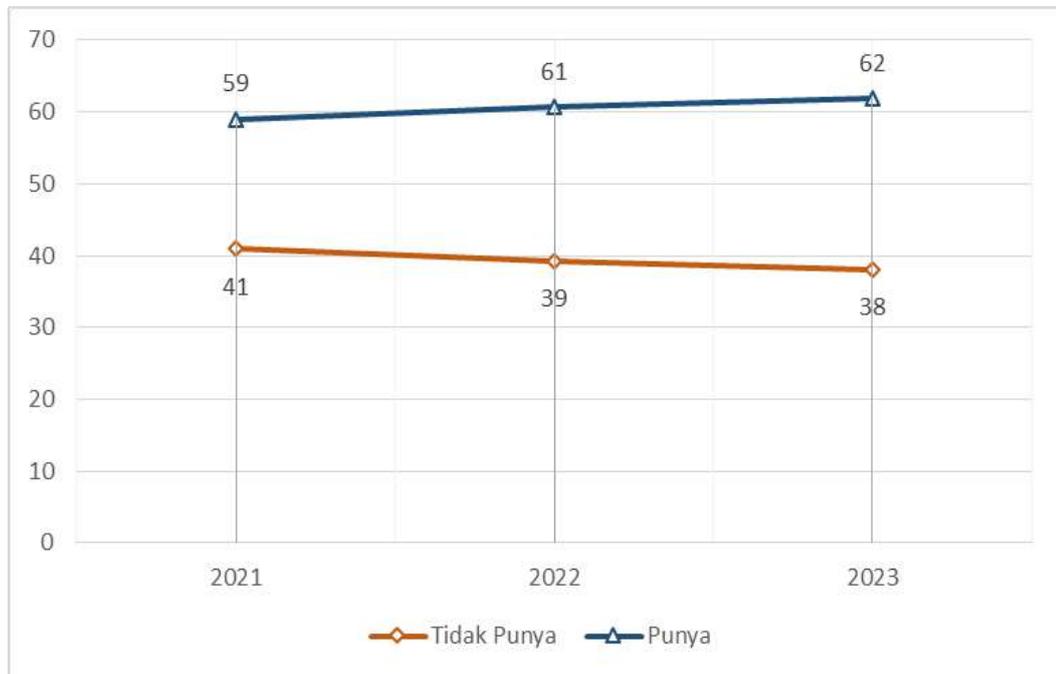
1. Jumlah Penduduk

Akta kelahiran adalah dokumen yang berisi pengakuan dan perlindungan negara berupa identitas awal penduduk, yang membuatnya sangat penting. Salah satu indikator keberhasilan dalam SDGs adalah capaian akta kelahiran, sehingga ditargetkan pada tahun 2030 semua penduduk sudah memiliki dokumen ini. Terlepas dari itu, ada beberapa hambatan yang menghalangi cakupan akta kelahiran untuk menjadi optimal, seperti tidak tahu cara mengurus akta kelahiran, tidak tahu apakah akta kelahiran penting, dan lokasi pengurusan yang jauh (Alfana, Wahyudi dan Aulia, 2018). Oleh karena itu, untuk mencapai target SDGs di 2030 untuk kepemilikan akta kelahiran, hambatan ini harus dihilangkan.



Pada Gambar 2.1, terlihat persentase kepemilikan akta kelahiran antara dua kelompok yaitu "Punya" dan "Tidak Punya" dari tahun 2021 hingga 2023 di DIY. Data ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam kepemilikan akta kelahiran selama periode tiga tahun. Tren peningkatan ini dapat dihubungkan dengan berbagai inisiatif pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang berfokus pada pentingnya memiliki akta kelahiran sebagai dokumen identitas dasar. Menurut literatur, akta kelahiran memiliki peran penting dalam akses ke layanan publik, pendidikan, dan perlindungan hukum (Badan Pusat Statistik, 2020).



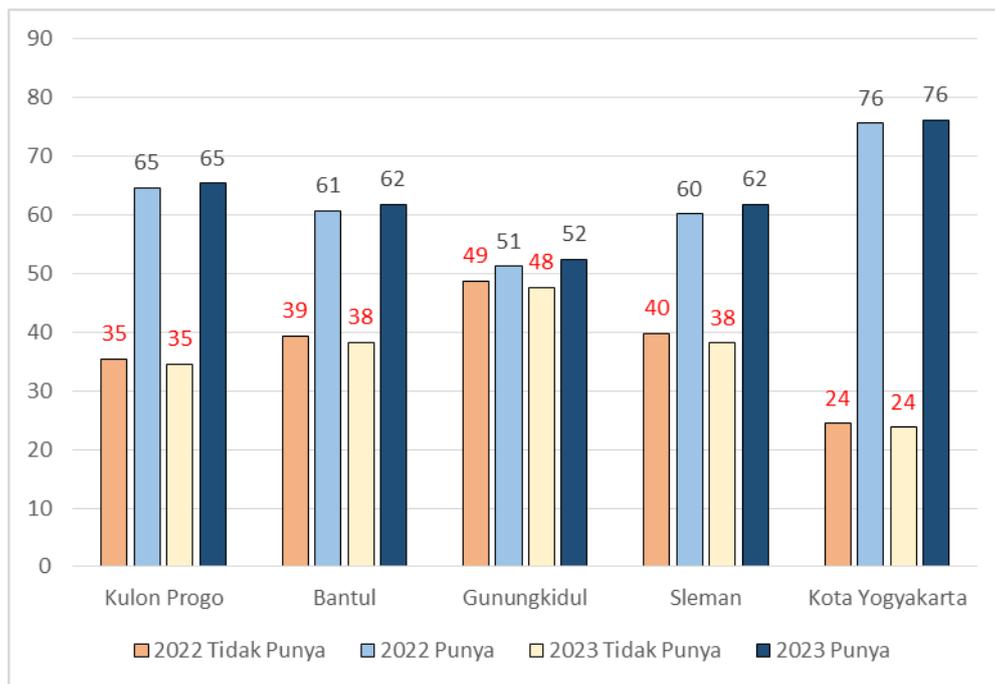


Gambar 4.1 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di DIY Tahun 2021-2023
 Sumber: Kemendagri. hasil olah DKB semester II tahun 2021-2023

Gambar 4.2 menunjukkan pola umum peningkatan persentase kepemilikan akta kelahiran di berbagai kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun 2022 hingga 2023. Secara keseluruhan, terdapat tren peningkatan persentase individu yang memiliki akta kelahiran di setiap wilayah yang dianalisis, yakni Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Pada saat yang sama, persentase individu yang tidak memiliki akta kelahiran cenderung menurun, menunjukkan peningkatan kesadaran dan aksesibilitas terhadap pembuatan akta kelahiran di kalangan masyarakat.

Secara khusus, meskipun beberapa wilayah seperti Kulon Progo dan Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang stabil, daerah lain seperti Bantul, Gunungkidul, dan Sleman memperlihatkan peningkatan yang lebih jelas dalam kepemilikan akta kelahiran. Peningkatan ini mungkin mencerminkan keberhasilan program dan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan pentingnya dokumen identitas bagi warga

negara. Selain itu, pola umum yang terlihat pada grafik ini sejalan dengan tren nasional yang berupaya untuk meningkatkan kepemilikan dokumen legal dasar sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas data kependudukan dan layanan publik.



Gambar 4.2 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2022 dan 2023

(Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2022 dan 2023)

Berdasarkan golongan usia, Pada kelompok usia 0-4 tahun, hampir seluruh anak memiliki akta kelahiran dengan capaian DIY mencapai 99,88% (Tabel 4.1). Hanya 0,12% anak yang belum memiliki akta kelahiran. Untuk kelompok usia 5-17 tahun, persentase kepemilikan akta kelahiran juga sangat tinggi, yaitu 98,91%, dengan hanya 1,09% anak yang belum memiliki akta kelahiran. Secara keseluruhan, pada kelompok usia 0-17 tahun, 99,19% anak telah memiliki akta kelahiran, sementara 0,81% masih belum memiliki akta kelahiran.

Tabel 4.1

Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-4, 5-17, dan 0-17

di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Usia	Kepemilikan	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY	Capaian DIY (%)
Usia 0-4 Tahunan	Tidak Punya	90	14	119	75	10	308	0,12
	Punya	30.174	70.440	50.681	80.272	28.155	259.722	99,88
	Total	30.264	70.454	50.800	80.347	28.165	260.030	100,00
Usia 5-17 Tahunan	Tidak Punya	795	172	2105	3339	511	6.922	1,09
	Punya	74.139	168.406	118.784	191.491	72.549	625.369	98,91
	Total	74.934	168.578	120.889	194.830	73.060	632.291	100,00
Usia 0-17 Tahunan	Tidak Punya	885	186	2224	3414	521	7.230	0,81
	Punya	104.313	238.846	169.465	271.763	100.704	885.091	99,19
	Total	105.198	239.032	171.689	275.177	101.225	892.321	100,00

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2023

B. ASFR (Age Spesific Fertility Rates) dan TFR (Total Fertility Rates)

Untuk perencanaan pembangunan, indikator fertilitas dapat dibuat dengan menggunakan data kelahiran. Dengan data kelahiran, ASFR dan TFR dapat dihitung. ASFR dihitung sebagai jumlah kelahiran tahunan untuk perempuan pada kelompok usia tertentu per 1.000 perempuan dalam kelompok usia tersebut. Nilai ASFR diperoleh dengan membagi jumlah perempuan pada kelompok usia tertentu dibagi jumlah perempuan pada kelompok usia yang sama pada periode waktu yang sama.

Nilai ASFR DIY diperoleh dengan menggunakan perhitungan langsung. Hal ini dapat dilakukan karena data kelahiran tersedia. Pola ASFR di DIY membentuk pola huruf U terbalik dengan puncak berada pada usia 25-29 tahun (Lihat Tabel 4.2). Pola ini terjadi di seluruh kabupaten kota di DIY dengan puncak nilai berada di kelompok usia tersebut.

Tabel 4.2

Jumlah Perempuan Usia 10-64 Tahun, Jumlah Kelahiran Hidup dan ASFR di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Golongan Usia	Kulon Progo			Bantul			Gunungkidul			Sleman			Kota Yogyakarta			DIY		
	Jumlah Perempuan	Bayi Lahir Hidup	ASFR	Jumlah Perempuan	Bayi Lahir Hidup	ASFR	Jumlah Perempuan	Bayi Lahir Hidup	ASFR	Jumlah Perempuan	Bayi Lahir Hidup	ASFR	Jumlah Perempuan	Bayi Lahir Hidup	ASFR	Jumlah Perempuan	Bayi Lahir Hidup	ASFR
10-14	15.376	0	0,0	35.255	3	0,1	24.812	2	0,1	41.348	4	0,1	15.294	0	0,0	132.085	9	0,1
15-19	15.476	67	4,3	33.583	164	4,9	24.727	171	6,9	38.517	179	4,6	15.897	77	4,8	128.200	658	5,1
20-24	15.593	784	50,3	33.490	1.614	48,2	26.158	1.738	66,4	39.734	1.601	40,3	15.632	477	30,5	130.607	6.214	47,6
25-29	15.389	1.639	106,5	34.096	3.663	107,4	25.590	2.448	95,7	39.543	4.347	109,9	15.173	1.360	89,6	129.791	13.457	103,7
30-34	14.630	1.209	82,6	34.260	2.792	81,5	24.867	1.698	68,3	38.715	3.279	84,7	14.581	1.126	77,2	127.053	10.104	79,5
35-39	14.448	617	42,7	34.836	1.436	41,2	23.758	878	37,0	38.994	1.780	45,6	14.829	633	42,7	126.865	5.344	42,1
40-44	16.178	188	11,6	37.981	418	11,0	27.373	317	11,6	44.714	598	13,4	16.644	215	12,9	142.890	1.736	12,1
45-49	15.416	11	0,7	34.890	27	0,8	26.253	29	1,1	42.183	43	1,0	15.563	12	0,8	134.305	122	0,9
50-54	15.512	1	0,1	34.462	2	0,1	29.260	2	0,1	40.843	7	0,2	15.210	4	0,3	135.287	16	0,1
55-59	15.675	0	0,0	32.585	0	0,0	26.637	0	0,0	36.589	0	0,0	14.330	0	0,0	125.816	0	0,0
60-64	14.018	0	0,0	28.866	0	0,0	24.776	0	0,0	30.474	0	0,0	12.458	0	0,0	110.592	0	0,0

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2022 dan Data SIAK Kab/Kota se-DIY tahun 2023

Dugaan puncak nilai berada pada usia 25-29 tahun karena sering kali merupakan periode di mana perempuan mencapai stabilitas dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Banyak perempuan yang menyelesaikan pendidikan tinggi dan memasuki pasar kerja pada awal usia 20-an, sehingga mereka cenderung menunda pernikahan dan kelahiran anak hingga mereka merasa lebih stabil secara ekonomi dan siap untuk memulai keluarga. Hal ini menyebabkan peningkatan tingkat kesuburan pada usia 25-29 tahun, menjadikan kelompok usia ini sebagai puncak dari pola ASFR.

Pemanfaatan data kelahiran dapat digunakan untuk menghitung nilai TFR. Nilai TFR diperoleh dengan menghitung hasil dari ASFR yang tersedia. Nilai TFR di DIY pada 2023 adalah sebesar 1,5 (Tabel 4.3). Nilai ini mengalami penurunan dibanding capaian di tahun 2022 di mana nilainya hanya sebesar 1,9. Nilai TFR 1,5 memiliki arti bahwa rata-rata anak yang dimiliki perempuan usia subur di DIY pada 2023 adalah sebanyak 1-2 anak. Berdasarkan kabupaten/kota, nilai TFR tertinggi disumbang oleh Kabupaten Sleman, sedangkan terendah ada di Kota Yogyakarta.

Tabel 4.3
Jumlah Perempuan Usia 10-64 Tahun, Jumlah Kelahiran Hidup, ASFR dan TFR di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Usia 10-64 Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	ASFR (Per1000)	TFR=5 x ASR/1000
Kulon Progo	155.383	4.516	298,9	1,49
Bantul	339.195	10.119	295,1	1,48
Gunungkidul	271.020	7.283	287,1	1,44
Sleman	390.621	11.838	299,9	1,50
Kota Yogyakarta	149.910	3.904	258,9	1,29
DIY	1.306.129	37.660	291,3	1,46

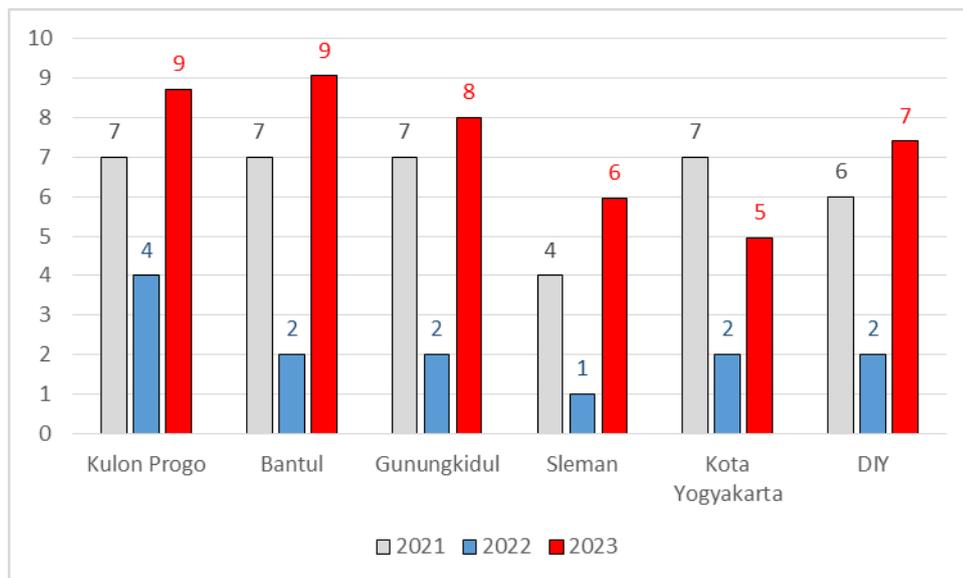
Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2023

C. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dihitung dengan membagi jumlah kematian di antara bayi di bawah usia satu tahun, per-1000 kelahiran hidup pada tahun

yang sama²⁰ (Swanson dan Siegel, 2004; Lundquist, Anderton, dan Yaukey, 2015). Indikator ini dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bayi baru lahir sangat terkait dengan status sosial orang tuanya dan sangat peka terhadap lingkungan tempat mereka dibesarkan. Semakin rendah nilainya, semakin baik kesehatannya.

Menggunakan data dari Dinas Kesehatan DIY, pada tahun 2023, angka kematian bayi di DIY tercatat sebesar 7 dari 1.000 kelahiran hidup. Lonjakan nilai pada 2023 ini terjadi karena kejadian kematian bayi di seluruh kabupaten kota terjadi. Dibandingkan pada tahun 2022, jumlah kematian bayi mengalami kenaikan mencapai 3 kali lipatnya. Kenaikan kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman, di mana naiknya mencapai 6 kali lipat dibanding jumlah kematian di 2022.



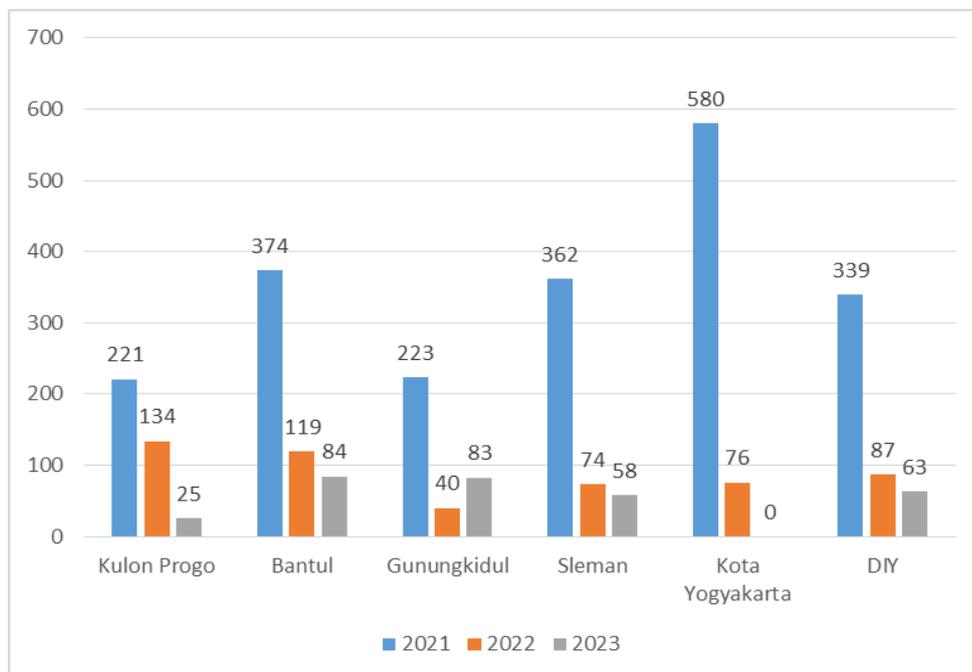
Gambar 4.3 Angka Kematian Bayi (IMR) di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021-2023

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, pencatatan data RSUD dan Puskesmas akhir tahun 2021-2023

²⁰ https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=deskripsi_ind&Istilah_page=4

D. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu di DIY mengalami pola penurunan pada 2023 jika dibandingkan nilai pada tahun sebelumnya. Gambar 4.4 menunjukkan pola umum penurunan angka kematian ibu (AKI) di kabupaten/kota se-DIY selama periode 2021-2023. Pada tahun 2021, AKI di seluruh wilayah DIY cenderung tinggi dengan Kota Yogyakarta mencatat angka tertinggi, yaitu 580 kasus. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terlihat penurunan yang signifikan. Tahun 2022 menunjukkan penurunan drastis di hampir semua daerah, dan tren ini berlanjut hingga 2023 dengan beberapa daerah mencatatkan angka kematian yang sangat rendah atau bahkan nol. Penurunan paling signifikan terjadi di Kota Yogyakarta, dari 580 kasus pada 2021 menjadi 76 pada 2022, dan nol pada 2023. Tren serupa terlihat di Sleman, Bantul, dan Kulon Progo, dengan masing-masing daerah mengalami penurunan yang konsisten. Sedangkan di Gunungkidul nilainya naik 2 kali lipat



Gambar 4.5 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021-2023

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, pencatatan data RSUD dan Puskesmas akhir tahun 2021-2023

Pola penurunan AKI ini dapat dikaitkan dengan berbagai upaya intervensi kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu, edukasi kesehatan, serta program pemeriksaan kehamilan yang lebih terstruktur dan intensif berperan penting dalam menurunkan AKI. Selain itu, adanya kebijakan dan program khusus dari pemerintah yang difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu di daerah-daerah yang sebelumnya memiliki angka kematian tinggi juga memberikan dampak positif yang signifikan. Hasil ini tertuang dalam dokumen LKPJ Gubernur DIY Tahun 2023 (Pemerintah Daerah DIY, 2024). Berdasarkan penyebab kematiannya, pada 2023 penyebab kematian ibu didominasi oleh pendarahan dan gangguan hipertensi (Tabel 4.4).

Tabel 4.4

Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Kabupaten/ Kota	PENYEBAB KEMATIAN IBU						Jumlah Kematian Ibu
	Perdarahan	Gangguan Hipertensi	Infeksi	Kelainan Jantung Dan Pembuluh Darah*	Gangguan Cerebro vaskular***	COVID-19	
Kulon Progo	0	1	0	0	0	0	1
Bantul	3	0	4	1	1	0	9
Gunungkidul	1	4	0	0	0	0	5
Sleman	4	2	0	0	0	1	7
Kota Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0
DIY	8	7	4	1	1	1	22

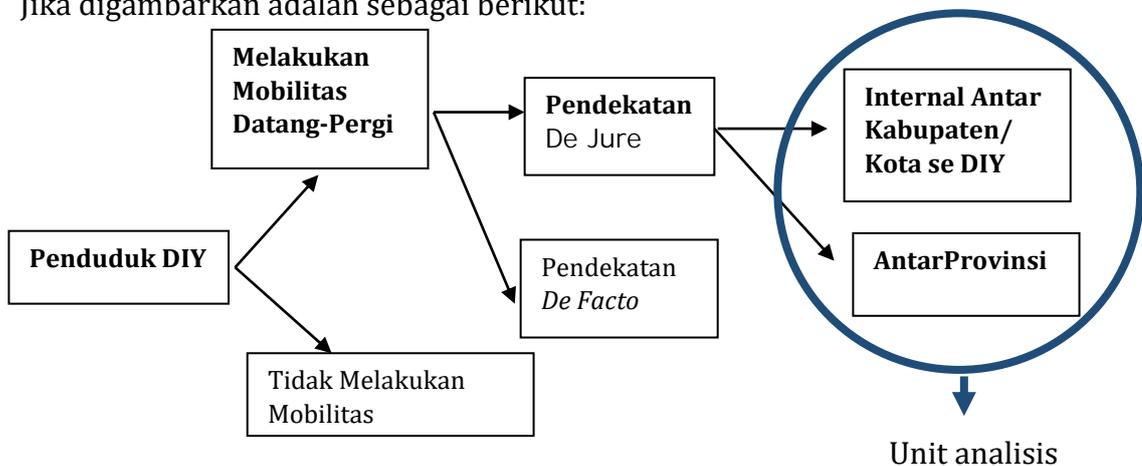
Sumber: Dinkes DIY pencatatan data RSUD dan Puskesmas akhir tahun 2023

E. Penduduk Datang dan Pergi

Pembahasan penduduk datang dan pergi dalam bahasan ini memiliki definisi yang spesifik mengikuti batasan operasional yang disebutkan dalam Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (2020). Batasan tersebut antara lain:

- Pendataan terkait penduduk datang dan pergi atau pindah yaitu penduduk yang telah melapor dan dicatat di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-DIY. Dicatat datang adalah penduduk yang memperoleh kartu keluarga di tiap kabupaten/kota. Dicatat pindah adalah penduduk yang menyerahkan kartu keluarga karena berdomisili di luar kabupaten/kota. Jadi, bukan definisi migrasi dalam artian pindah menurut batasan waktu dan jarak tertentu atau datang dan pindah dengan maksud untuk menetap di suatu daerah seperti yang lazim digunakan dalam studi migrasi.
- Pencatatan penduduk datang dan pindah ini bisa dikatakan lebih mengarah ke pendekatan *de jure* daripada *de facto*. Pendataan yang dilakukan dibagi menjadi 4 yaitu penduduk datang antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, penduduk datang antarprovinsi, penduduk pergi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, dan penduduk pergi antar provinsi.

Jika digambarkan adalah sebagai berikut:

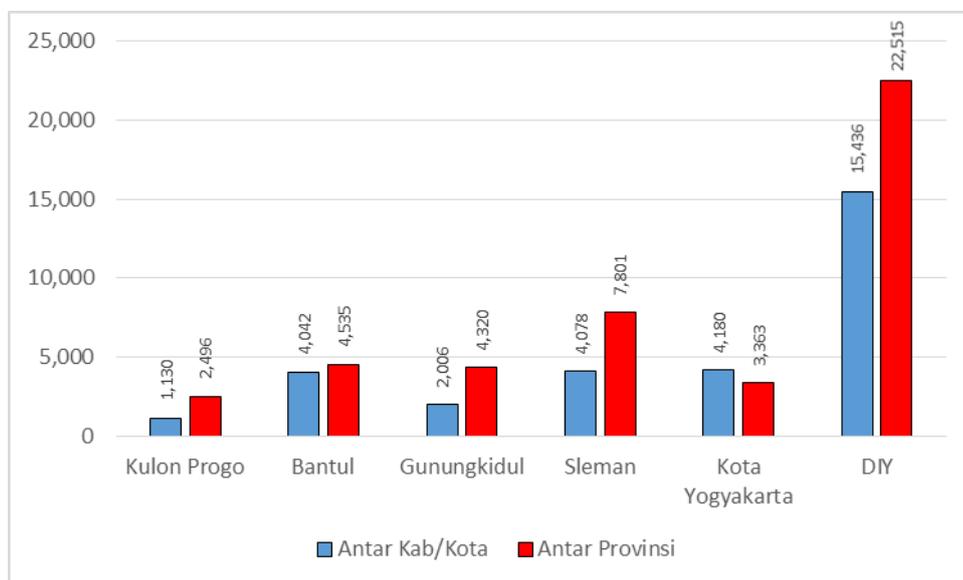


*Gambar disalin dari publikasi Biro Tapem Setda DIY (2021)

Gambaran penduduk pergi di DIY dibedakan menjadi penduduk yang pergi antarkabupaten/kota dan pergi antarprovinsi bervariasi, dengan melihat perubahannya dalam dua tahun terakhir. Gambar 4.5 menunjukkan data penduduk yang melakukan perpindahan antarkabupaten/kota dan

antarprovinsi dari DIY pada tahun 2023. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk yang pindah antar provinsi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang pindah antarkabupaten/kota dalam provinsi. Sleman dan DIY secara keseluruhan mencatat angka perpindahan tertinggi untuk kategori antarkabupaten/kota, masing-masing sebesar 7.801 dan 15.436. Di sisi lain, jumlah penduduk yang pindah antarprovinsi mencapai puncaknya di DIY dengan 22.515 orang, diikuti oleh Sleman dengan 4.078 orang.

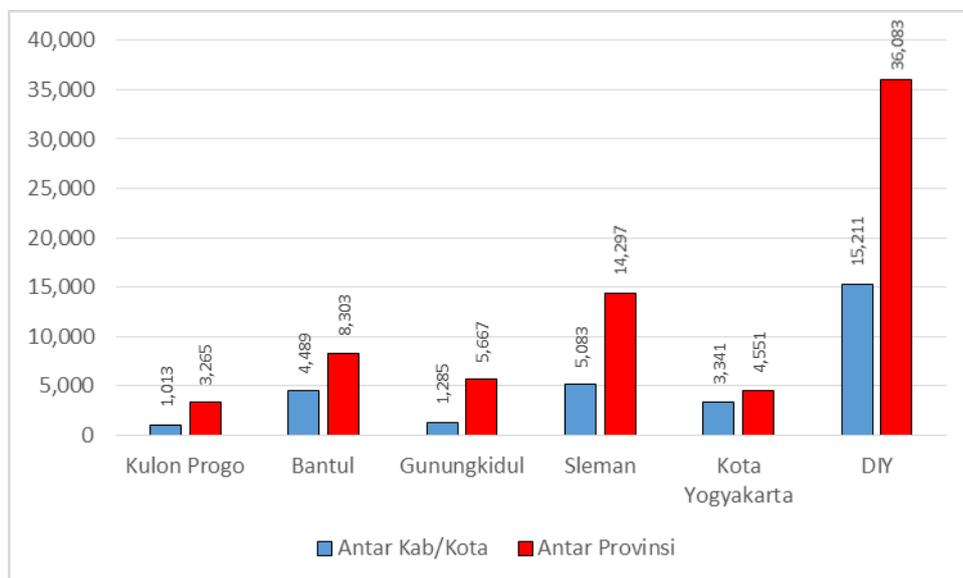
Analisis pola ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat mobilitas yang cukup signifikan antarkabupaten/kota dalam DIY, perpindahan antarprovinsi menunjukkan tren yang lebih dominan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peluang ekonomi yang lebih baik, pendidikan, dan alasan keluarga yang mendorong penduduk untuk mencari peluang di luar provinsi. Perpindahan antar provinsi yang tinggi mungkin juga mencerminkan keterkaitan ekonomi dan sosial antara DIY dengan provinsi lainnya di Indonesia.



Gambar 4.5 Penduduk Pergi Antarkabupaten/Kota dan Antarprovinsi Dari DIY Tahun 2023

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, hasil olahan data SIAK semester II tahun 2023

Gambar 4.6 menunjukkan data penduduk yang datang ke DIY, baik antarkabupaten/kota maupun antarprovinsi, pada tahun 2023. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk yang datang dari antarprovinsi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang datang antarkabupaten/kota. DIY secara keseluruhan mencatat angka kedatangan tertinggi untuk kategori antarprovinsi dengan 36.083 orang, diikuti oleh Sleman dengan 14.297 orang. Sebaliknya, jumlah penduduk yang datang antarkabupaten/kota tertinggi tercatat di DIY dengan 15.211 orang, diikuti oleh Sleman dengan 5.083 orang.



Gambar 4.6 Penduduk Datang Antarkabupaten/Kota dan Antarprovinsi Dari DIY Tahun 2023

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, hasil olahan data SIAK semester II tahun 2023

Analisis pola ini menunjukkan bahwa DIY, khususnya daerah Sleman, merupakan tujuan utama bagi penduduk dari luar provinsi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh daya tarik DIY sebagai pusat pendidikan dan budaya, dengan keberadaan banyak universitas ternama dan destinasi wisata. Kedatangan penduduk dari antarprovinsi yang tinggi juga mengindikasikan adanya pergerakan penduduk yang mencari peluang

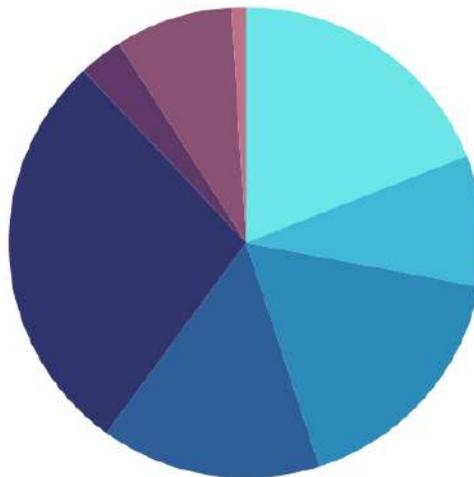
ekonomi, pendidikan, dan sosial di DIY. Sementara itu, mobilitas antarkabupaten/kota dalam DIY sendiri juga signifikan, yang menunjukkan dinamika internal yang kuat dalam provinsi ini.

Implikasi dari pola kedatangan ini cukup signifikan bagi perencanaan dan pengelolaan wilayah DIY. Pemerintah DIY perlu mempertimbangkan kebijakan yang dapat mengakomodasi peningkatan populasi ini, termasuk pengembangan infrastruktur, perumahan, dan layanan publik untuk memastikan kualitas hidup yang baik bagi penduduk baru.

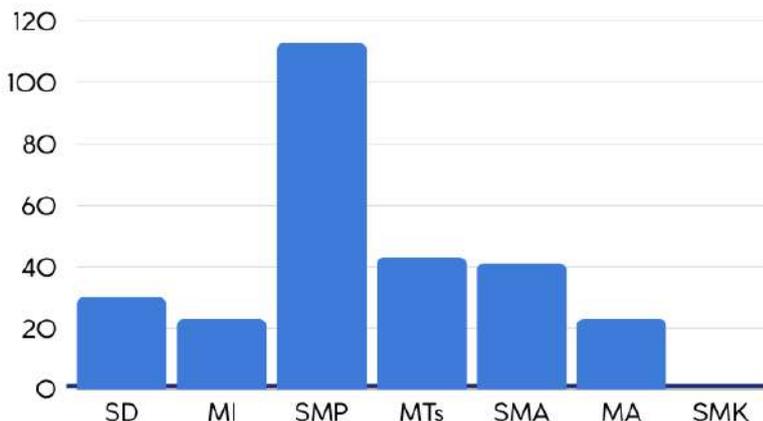
Angka Partisipasi Kasar DIY diatas 80%



Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir



Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan



BAB. 05 | Pendidikan



1. Struktur Pendidikan Terakhir Penduduk

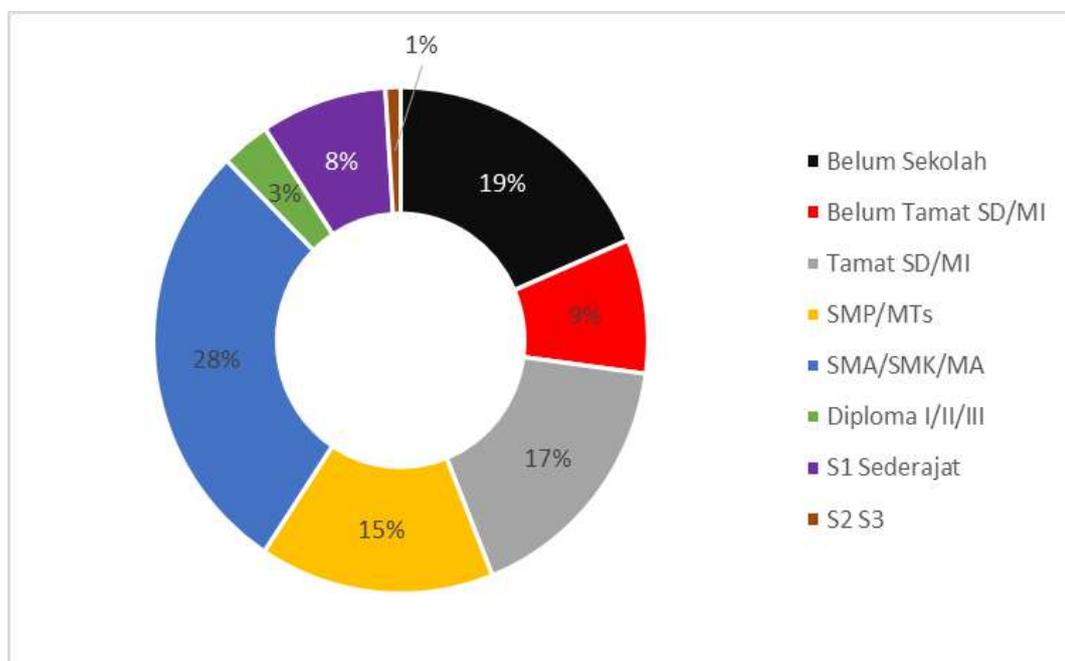


Pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia, seperti yang disorot dalam berbagai makalah penelitian. Kualitas pendidikan secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan menghasilkan sumber daya manusia yang terampil. Selain itu, pendidikan sangat penting untuk mempersiapkan individu untuk memahami peran mereka dalam pembangunan berkelanjutan. Berinvestasi dalam pendidikan sebagai bentuk modal dapat secara signifikan berkontribusi pada tujuan pembangunan suatu negara, pada akhirnya meningkatkan indeks pembangunan manusia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pendidikan terakhir yang ditempuh penduduk dibagi menjadi sepuluh klasifikasi level jenjang pendidikan formal terakhir ditamatkan, yaitu belum sekolah, belum tamat SD/MI, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Diploma I/II, Akademi/DIII/S.Muda, Diploma IV/Strata I, Strata II, Strata III. Untuk melihat struktur pendidikan ini, digunakan indikator pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh penduduk DIY. Indikator ini diketahui melalui sertifikat atau ijazah yang dimiliki. Semakin besar persentase penduduk yang tamat pada jenjang pendidikan tertinggi, makin tinggi kualitas pendidikan penduduk. Gambar 5.1 menunjukkan distribusi penduduk DIY pada tahun 2023 berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang diselesaikan.



Sebagian besar penduduk, sebesar 28%, merupakan lulusan SMA/SMK/MA. Ini diikuti oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan SMP/MTs dengan persentase sebesar 17%. Selain itu, terdapat 19% penduduk yang belum pernah bersekolah sama sekali, menunjukkan masih adanya sejumlah besar anak usia sekolah yang belum terjangkau oleh sistem pendidikan. Lulusan SD/MI mencakup 15% dari populasi, sementara 9% belum tamat SD/MI.



Gambar 5.1 Diagram Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir di DIY Tahun 2023
Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2023

Persentase penduduk dengan jenjang pendidikan S1 ke atas di DIY masih perlu ditingkatkan kembali, yakni hanya mencapai 9% (8% untuk S1 dan 1% untuk S2/S3). Literasi pendidikan menunjukkan bahwa peningkatan akses dan partisipasi dalam pendidikan tinggi merupakan faktor kunci untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut studi oleh Yilin et al. (2021); Rosele et al (2023; Li & Pu (2023)), wilayah dengan persentase lulusan perguruan tinggi yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat

produktivitas yang lebih besar dan kemampuan inovasi yang lebih baik, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penduduk yang memiliki jenjang pendidikan S1 ke atas dapat menjadi modal berharga bagi pembangunan DIY. Mereka berpotensi memainkan peran penting dalam sektor-sektor strategis seperti teknologi, kesehatan, dan pendidikan. Peningkatan jumlah penduduk yang mengejar pendidikan tinggi harus menjadi prioritas kebijakan untuk memastikan tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi, yang esensial dalam menghadapi tantangan global dan lokal di era modern ini.

Tabel 5.1 menggambarkan jumlah penduduk di Kabupaten/Kota se-DIY berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang diselesaikan pada tahun 2023. Pola umum yang dapat diamati dari data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di setiap kabupaten/kota berada pada tingkat pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) dan menengah pertama (SMP/MTs). Ini terlihat konsisten di seluruh wilayah, dengan jumlah terbesar berada di tingkat SMA/SMK/MA, diikuti oleh SMP/MTs.

Tabel 5.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan Terakhir
di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
Belum Sekolah	75.759	186.443	186.880	172.059	68.727
Belum Tamat SD/MI	38.994	73.680	62.349	103.333	40.823
Tamat SD/MI	87.068	174.384	199.516	127.300	38.618
SMP/MTs	74.109	146.211	153.896	147.601	49.931
SMA/SMK/MA	134.940	282.891	142.307	370.654	121.298
Diploma I/II	2.412	6.670	3.346	9.782	2.965
Akademi/DIII/S. Muda	7.710	22.516	6.162	37.912	19.362
Diploma IV/Strata I	23.844	72.171	20.823	125.393	64.528
Strata II	1.305	6.656	1.254	16.131	7.568
Strata III	51	539	89	2.451	885
Jumlah	446.192	972.161	776.622	1.112.616	414.705

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2023

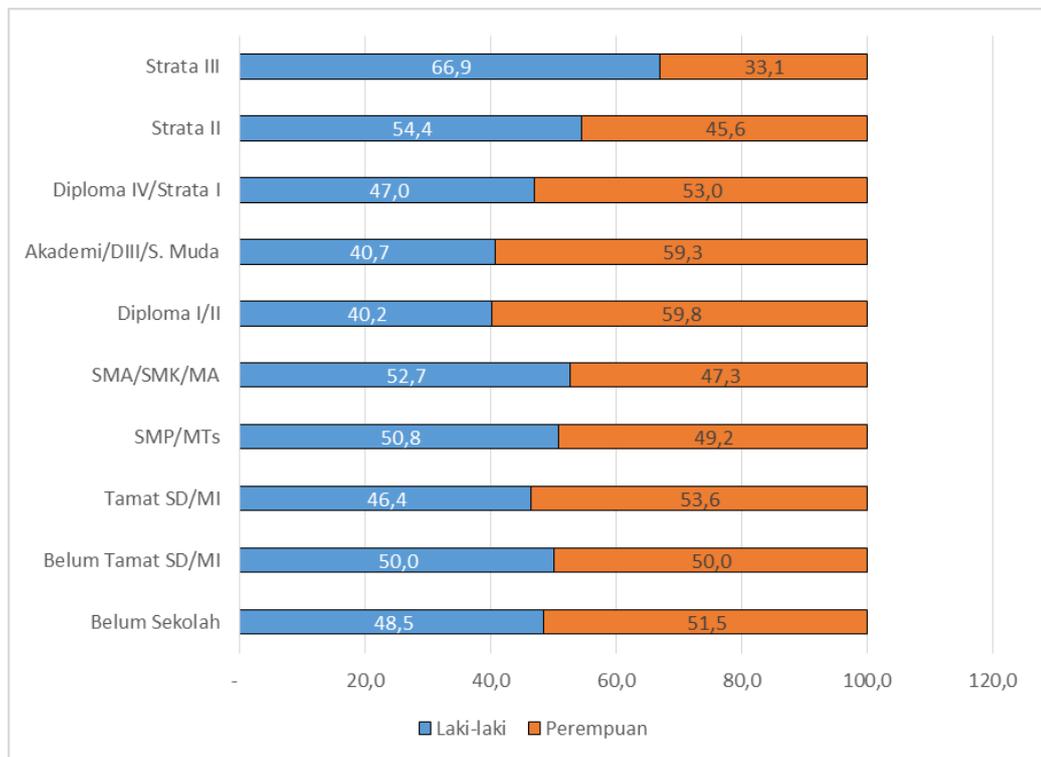
Di Kabupaten Sleman, terdapat konsentrasi yang cukup tinggi pada tingkat pendidikan menengah atas, yang mungkin mencerminkan keberadaan institusi pendidikan yang lebih banyak dan akses yang lebih baik ke fasilitas pendidikan. Bantul dan Gunungkidul juga menunjukkan pola serupa dengan proporsi besar penduduk di tingkat menengah atas. Kota Yogyakarta, meskipun memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan kabupaten lain, menunjukkan distribusi yang signifikan pada tingkat pendidikan tinggi (S1/Diploma IV dan di atasnya), mencerminkan keberadaan banyak perguruan tinggi di kota ini.

Implikasi ke depan dari pola ini adalah perlunya peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi di wilayah DIY untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih kompetitif. Meskipun sudah ada konsentrasi yang signifikan pada tingkat pendidikan menengah, upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan jumlah penduduk yang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Hal ini penting untuk mendorong inovasi dan produktivitas ekonomi yang berkelanjutan pada masa depan.

B. Struktur Pendidikan Penduduk Menurut Gender

Pembahasan struktur pendidikan penduduk menurut gender sangat penting karena memberikan wawasan mendalam mengenai kesetaraan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Data ini dapat mengungkapkan adanya kesenjangan gender dalam berbagai jenjang pendidikan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi peluang karier dan partisipasi dalam pembangunan ekonomi. Dengan memahami distribusi pendidikan berdasarkan gender, pembuat kebijakan dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi hambatan spesifik yang dihadapi oleh perempuan atau laki-laki dalam mengakses pendidikan. Misalnya, program beasiswa khusus bagi perempuan di daerah yang menunjukkan rendahnya partisipasi mereka di tingkat pendidikan tinggi dapat menjadi langkah efektif untuk meningkatkan keterwakilan mereka di bidang profesional.

Data yang ditampilkan pada Gambar 5.2 menunjukkan struktur pendidikan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang akan dibedakan berdasarkan gender di berbagai jenjang pendidikan, yaitu dasar, menengah, dan tinggi. Pada tingkat pendidikan dasar, terdapat persentase yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan pada kategori "Belum Sekolah," dengan laki-laki sebesar 48,5% dan perempuan 51,5%. Di tingkat "Belum Tamat SD/MI," distribusi gender juga seimbang, masing-masing sebesar 50,0%. Namun, pada tingkat "Tamat SD/MI," terdapat perbedaan di mana persentase laki-laki (46,4%) lebih rendah dibandingkan perempuan (53,6%).



Gambar 5.2 Diagram Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir Berdasarkan Gender di DIY Tahun 2023

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2023

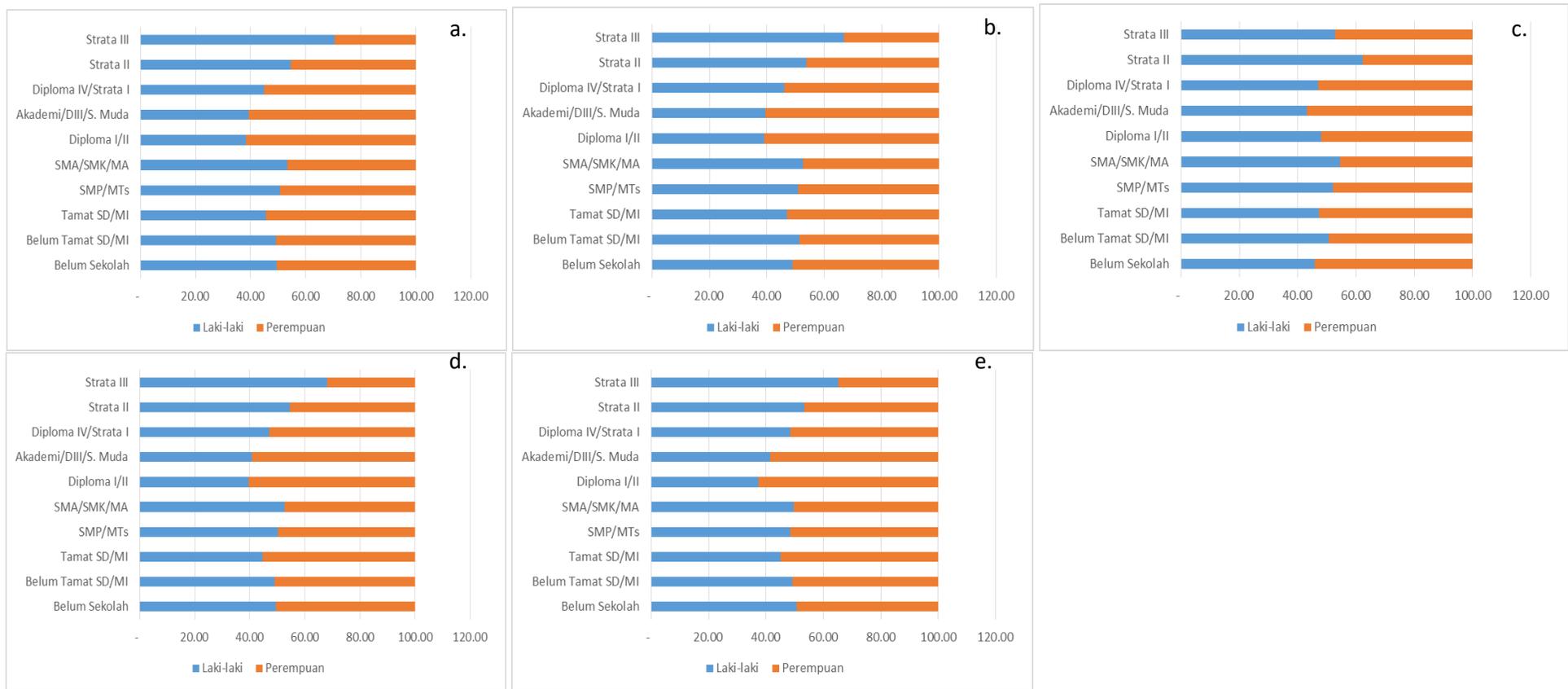
Pada jenjang pendidikan menengah, perbedaan gender mulai terlihat lebih jelas. Pada tingkat "SMP/MTs," persentase laki-laki yang mencapai tingkat ini adalah 50,8%, sedangkan perempuan 49,2%. Di tingkat

"SMA/SMK/MA," jumlah laki-laki yang menyelesaikan pendidikan ini lebih tinggi (52,7%) dibandingkan perempuan (47,3%).

Pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat variasi yang signifikan dalam distribusi gender. Di tingkat "Diploma I/II," persentase laki-laki adalah 40,2% dan perempuan 59,8%. Untuk tingkat "Akademi/DIII/S. Muda," laki-laki hanya 40,7%, sedangkan perempuan mencapai 59,3%. Perbedaan makin mengecil pada tingkat "Diploma IV/Strata I," dengan laki-laki sebesar 47,0% dan perempuan 53,0%. Pada tingkat "Strata II," persentase laki-laki kembali lebih tinggi yaitu 54,4%, dibandingkan perempuan yang 45,6%. Di puncak pendidikan yaitu "Strata III," terdapat perbedaan signifikan di mana laki-laki mencapai 66,9%, sedangkan perempuan hanya 33,1%.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, distribusi gender relatif seimbang dengan beberapa variasi kecil. Namun, pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat ketimpangan yang lebih besar, terutama pada tingkat diploma dan strata tertentu. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan akses atau preferensi gender dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di DIY.

Pada Gambar 5.3, Secara keseluruhan, pola yang terlihat di lima kabupaten/kota di DIY menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, distribusi gender relatif seimbang dengan variasi kecil. Namun, pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat kecenderungan yang konsisten di mana perempuan lebih banyak memilih jenjang diploma, sementara laki-laki mendominasi pada jenjang strata II dan strata III. Hal ini mencerminkan perbedaan preferensi dan mungkin juga aksesibilitas antara laki-laki dan perempuan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di DIY.



Gambar 5.3. Proporsi Jumlah Pendidikan Terakhir Menurut Gender di Kabupaten (a) Kulon Progo, (b) Bantul, (c) Gunungkidul, (d) Sleman, (e) Kota Yogyakarta, Tahun 2023

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II Tahun 2023

C. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam suatu jenjang pendidikan tertentu. APK dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah total penduduk dalam kelompok umur yang seharusnya menempuh jenjang tersebut, kemudian dikalikan dengan 100%. Grafik 5.4 menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat (termasuk Paket A), SMP/Sederajat (termasuk Paket B), dan SMA/Sederajat (termasuk Paket C) di berbagai kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2023.

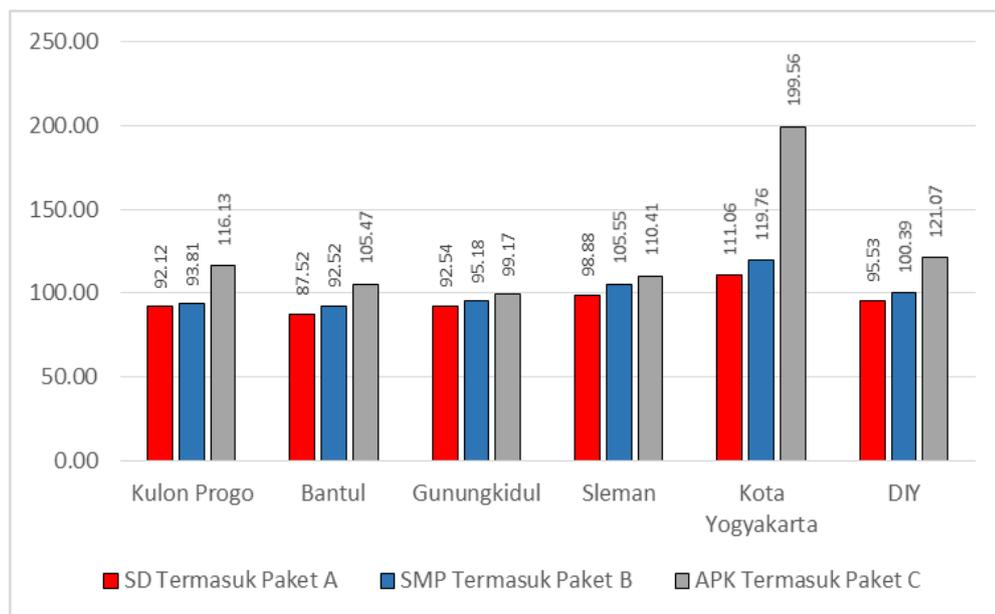
Secara umum, partisipasi pendidikan di DIY tergolong tinggi di semua jenjang pendidikan. APK untuk jenjang SD, SMP, dan SMA semuanya berada di atas 80%, menunjukkan bahwa sebagian besar anak di DIY berpartisipasi dalam pendidikan pada jenjang yang sesuai dengan kelompok umur mereka. Terdapat kecenderungan peningkatan APK pada jenjang SMP dan SMA dibandingkan dengan jenjang SD. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam mempertahankan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang sangat penting untuk perkembangan pendidikan di DIY.

Kota Yogyakarta menonjol dengan APK yang sangat tinggi di semua jenjang pendidikan. APK untuk jenjang SD di Kota Yogyakarta mencapai 111,76%, untuk jenjang SMP sebesar 119,76%, dan jenjang SMA mencapai 199,56%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki partisipasi pendidikan yang sangat tinggi, yang mungkin disebabkan oleh fasilitas pendidikan yang lebih baik dan akses yang lebih mudah dibandingkan dengan daerah lain di DIY.

Meskipun partisipasi pendidikan secara keseluruhan tinggi, terdapat variasi antarkabupaten/kota. Di Kulon Progo, APK untuk jenjang SMP sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jenjang SD dan SMA. Di Bantul, terdapat peningkatan APK dari jenjang SD ke SMP, dan peningkatan lebih lanjut pada jenjang SMA. Gunungkidul menunjukkan pola yang stabil dengan partisipasi

yang cukup merata di semua jenjang pendidikan. Sleman menunjukkan peningkatan signifikan pada jenjang SMP dan SMA dibandingkan dengan jenjang SD.

Pola-pola ini penting untuk memahami distribusi dan akses pendidikan di DIY. Mengetahui variasi antarkabupaten/kota dapat membantu dalam merencanakan intervensi yang tepat guna meningkatkan partisipasi di daerah-daerah dengan APK yang relatif lebih rendah, sehingga semua anak di DIY memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.



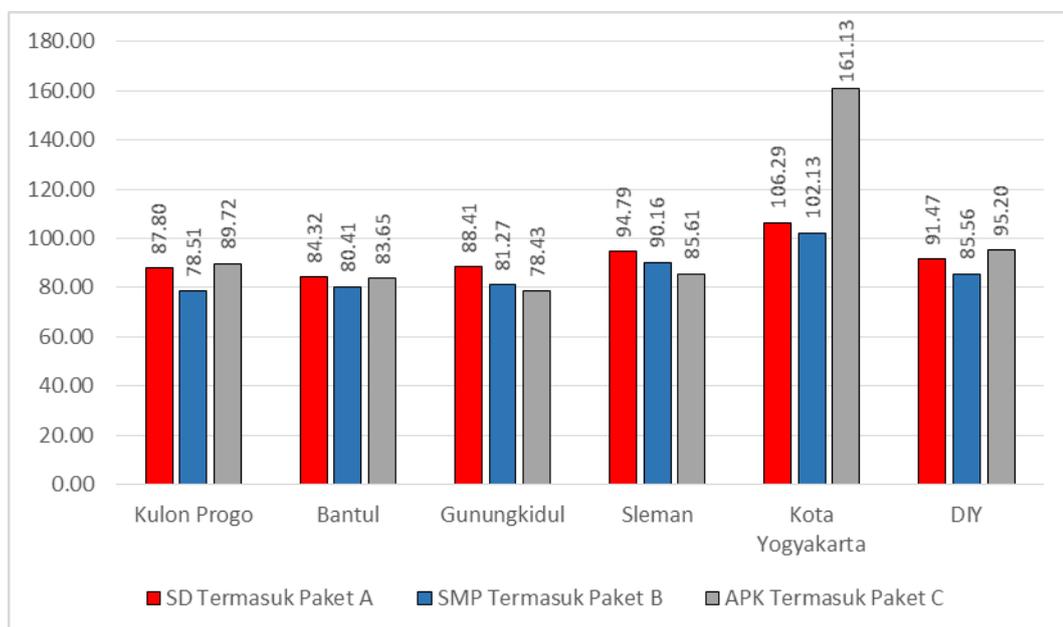
Gambar 5.4 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, data akhir tahun 2023

D. Angka Partisipasi Murni

Selain angka partisipasi kasar, Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai tingkat keberhasilan program pendidikan (Safira dan Wibowo, 2021). Secara umum, APM di DIY menunjukkan pola yang cukup stabil dan tinggi pada

jenjang pendidikan dasar hingga menengah, namun terdapat variasi yang signifikan pada jenjang pendidikan atas (Gambar 5.5). Gambar tersebut sekaligus menunjukkan bahwa DIY secara keseluruhan memiliki partisipasi pendidikan yang tinggi di semua jenjang pendidikan, meskipun terdapat variasi antarkabupaten/kota. Pola umum yang terlihat adalah tingginya partisipasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dengan beberapa daerah menunjukkan partisipasi yang luar biasa pada jenjang pendidikan atas, terutama di Kota Yogyakarta dan Sleman.



Gambar 5.5 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat di Kabupaten/Kota se-DIY tahun 2023
 Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, data akhir tahun 2023

Berdasarkan nilai APM, kita ketahui bahwa terdapat perbedaan nilai jika dibandingkan dengan APK. Perbedaan antara Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di DIY dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama. APK mencakup semua siswa yang terdaftar pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa memperhatikan usia mereka, sedangkan APM hanya menghitung siswa yang berada dalam kelompok usia resmi untuk jenjang tersebut. Sebagai akibatnya, APK seringkali lebih tinggi dibandingkan

dengan APM karena menyertakan siswa yang mungkin berusia lebih tua atau lebih muda dari kelompok usia resmi. Misalnya, di beberapa kabupaten/kota, seperti Kota Yogyakarta, APK untuk jenjang SMA sangat tinggi (161,13%) dibandingkan dengan APM karena banyak siswa yang mungkin mengulang tahun atau terlambat masuk sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi pendidikan tinggi, tidak semua siswa berada dalam kelompok usia yang sesuai, yang dapat mengindikasikan tantangan dalam sistem pendidikan, seperti keterlambatan masuk sekolah atau pengulangan kelas.

Selain itu, perbedaan geografis, ekonomi, dan sosial budaya juga berkontribusi terhadap variasi APK dan APM di DIY. Kabupaten/kota dengan akses yang lebih baik ke fasilitas pendidikan, dukungan ekonomi yang lebih kuat, dan kesadaran pendidikan yang tinggi cenderung memiliki APK dan APM yang lebih tinggi dan lebih seimbang. Misalnya, Sleman dan Kota Yogyakarta, yang memiliki infrastruktur pendidikan yang lebih baik dan akses yang lebih mudah, menunjukkan angka partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang mungkin lebih terpencil atau kurang berkembang seperti Kulon Progo. Faktor ekonomi juga berperan penting; keluarga dengan kondisi ekonomi lebih baik cenderung mampu mendukung pendidikan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi tanpa kendala signifikan. Perbedaan dalam kesadaran dan prioritas pendidikan di antara komunitas lokal juga memengaruhi partisipasi, di mana beberapa daerah mungkin lebih menekankan pentingnya pendidikan formal daripada yang lain.

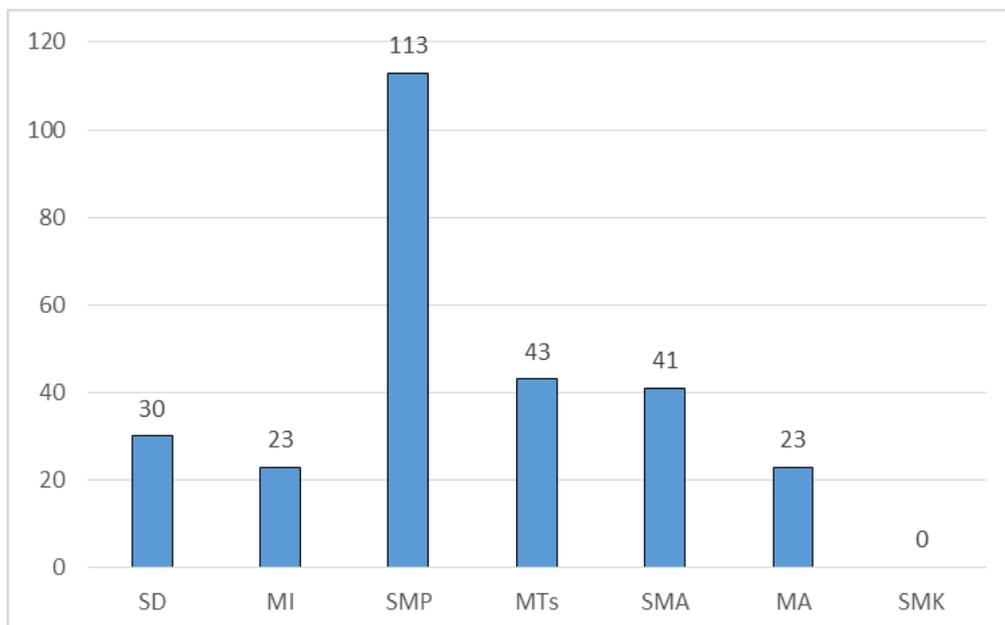
E. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS)⁶ adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Kegunaan Angka Putus Sekolah adalah untuk mengukur kemajuan pendidikan di suatu wilayah

⁶ <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/12>

dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Makin tinggi angka putus sekolah menunjukkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Demikian juga sebaliknya makin rendah angka putus sekolah, makin baik kondisi pendidikan di suatu wilayah.

Data yang tersedia dalam pembahasan di bagian ini adalah jumlah siswa putus sekolah. Data yang ditampilkan dalam Gambar 5.6 menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah di DIY pada tahun 2023, menurut jenjang pendidikan. Grafik ini mengindikasikan bahwa jenjang pendidikan SMP memiliki jumlah siswa putus sekolah tertinggi dengan 113 siswa, yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Jumlah ini mengindikasikan adanya masalah yang serius pada jenjang pendidikan menengah pertama di DIY, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tantangan ekonomi, kurangnya minat siswa, lingkungan pergaulan atau masalah keluarga yang memaksa siswa untuk meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan mereka.



Gambar 5.6 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di DIY tahun 2023

Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, data akhir tahun 2023

Pada jenjang pendidikan dasar, yaitu SD dan MI, jumlah siswa yang putus sekolah masing-masing adalah 30 dan 23 siswa. Meskipun jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan SMP, hal ini tetap menunjukkan adanya masalah pada tingkat pendidikan dasar. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan putus sekolah pada jenjang ini termasuk ketidakmampuan ekonomi keluarga untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka, jarak ke sekolah yang mungkin terlalu jauh bagi beberapa siswa, atau kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dasar.

Untuk jenjang pendidikan menengah atas, jumlah siswa putus sekolah di SMA dan MA masing-masing adalah 41 dan 23 siswa. Meskipun jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan SMP, tetap penting untuk dicermati. Siswa pada jenjang ini mungkin menghadapi tekanan untuk segera bekerja dan membantu ekonomi keluarga, atau mungkin ada masalah dengan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang membuat mereka kurang termotivasi untuk melanjutkan sekolah. Selain itu, kurikulum yang mungkin dianggap tidak relevan dengan kebutuhan mereka bisa menjadi salah satu alasan putus sekolah di jenjang ini.

Yang menarik adalah tidak adanya siswa putus sekolah di jenjang SMK. Hal ini bisa menunjukkan bahwa program pendidikan kejuruan mungkin lebih menarik atau relevan bagi siswa yang lebih fokus pada keterampilan praktis dan kesiapan kerja. Ini bisa mencerminkan keberhasilan SMK dalam menyediakan pendidikan yang lebih terarah pada pasar kerja dan lebih sesuai dengan kebutuhan siswa yang ingin segera bekerja setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Perbedaan jumlah siswa putus sekolah antara jenjang pendidikan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk kebijakan yang lebih terfokus dan intervensi yang sesuai untuk masing-masing jenjang pendidikan, guna mengurangi angka putus sekolah secara keseluruhan di DIY.

Tabel 5.2 menunjukkan jumlah murid yang putus sekolah di kabupaten/kota se-DIY pada tahun 2023, berdasarkan jenjang pendidikan

dan gender. Secara umum, pola yang terlihat adalah bahwa angka putus sekolah tertinggi terjadi pada jenjang SMP, terutama di Kabupaten Kulon Progo dan Bantul. SMP di Kulon Progo mencatat jumlah siswa putus sekolah tertinggi, yaitu 21 siswa (13 laki-laki dan 8 perempuan), diikuti oleh Bantul dengan 13 siswa (8 laki-laki dan 5 perempuan). Di jenjang pendidikan dasar (SD dan MI), jumlah siswa putus sekolah relatif lebih rendah, dengan beberapa pengecualian di Bantul dan Gunungkidul. Untuk jenjang pendidikan menengah atas (SMA dan MA), angka putus sekolah tersebar lebih merata tetapi cenderung lebih rendah dibandingkan jenjang SMP.

Tabel 5.2
Jumlah Murid Putus Sekolah di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Tingkat	Gender	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
SD	Laki-Laki	5	8	5	0	6
	Perempuan	1	0	2	3	0
	Total	6	8	7	3	6
MI	Laki-Laki	0	20	2	0	0
	Perempuan	0	0	1	0	0
	Total	0	20	3	0	0
SMP	Laki-Laki	1	4	23	16	2
	Perempuan	10	9	4	36	8
	Total	11	13	27	52	10
MTs	Laki-Laki	0	2	8	0	0
	Perempuan	0	23	4	6	0
	Total	0	25	12	6	0
SMA	Laki-Laki	5	4	7	0	5
	Perempuan	1	2	2	13	2
	Total	6	6	9	13	7
MA	Laki-Laki	1	4	1	0	0
	Perempuan	3	12	0	2	0
	Total	4	16	1	2	0
SMK	Laki-Laki	0	0	0	0	0
	Perempuan	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0

Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2023

Ketika dilihat berdasarkan gender, terlihat bahwa pada sebagian besar jenjang pendidikan, laki-laki cenderung memiliki angka putus sekolah yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Contohnya, pada jenjang SMP di Kulon Progo dan Bantul, jumlah laki-laki yang putus sekolah lebih tinggi daripada perempuan. Ini menunjukkan bahwa anak laki-laki mungkin lebih rentan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan putus sekolah, seperti tekanan untuk bekerja atau kurangnya minat dalam pendidikan formal. Namun, terdapat beberapa pengecualian, seperti pada jenjang MA di Kulon Progo, di mana jumlah perempuan yang putus sekolah sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

F. Rasio Sekolah Negeri / Swasta

Rasio sekolah negeri/swasta adalah perbandingan jumlah sekolah negeri dengan jumlah sekolah swasta di suatu daerah. Perhitungan rasio sekolah negeri/swasta dapat dilakukan dengan cara membagi jumlah sekolah negeri dengan jumlah sekolah swasta. Dilihat dari jenis sekolah di Provinsi DIY didominasi oleh jenis sekolah swasta di tiap jenjang pendidikan sekolah kecuali pada tingkat sekolah dasar (Tabel 5.3). Kebijakan pemerintah sebelumnya pada tahun 1980an berkontribusi pada peningkatan jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) dibandingkan dengan Sekolah Dasar Swasta (SDS), menurut Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (2019). Setiap kelurahan atau desa memiliki kebijakan untuk membangun sekolah negeri, bahkan di daerah dengan populasi yang tinggi dibangun dua sekolah negeri. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar di Provinsi DIY dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar.

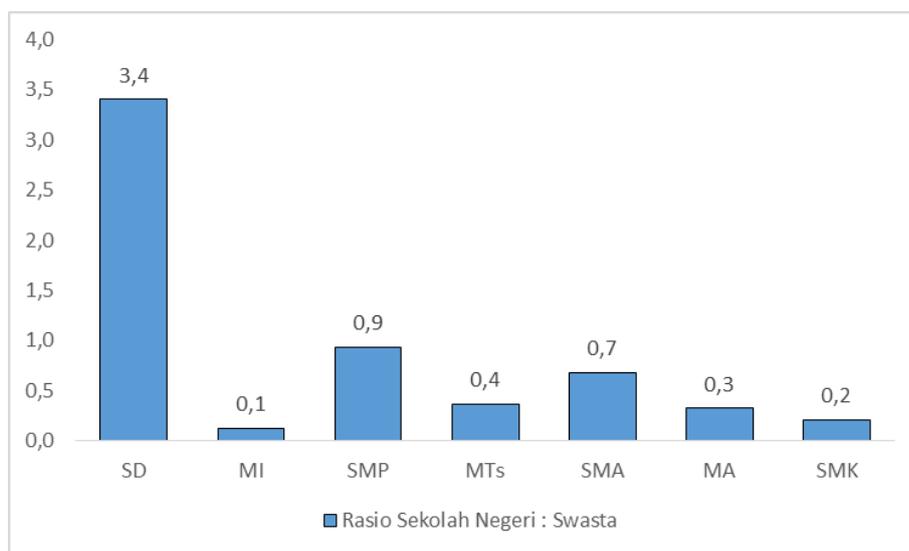
Tabel 5.3
Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Tingkat Sekolah	Jenis Sekolah	Kabupaten/Kota					DIY
		Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	
SD	Negeri	274	281	404	379	89	1427
	Swasta	61	86	60	135	77	419
	Jumlah	335	367	464	514	166	1846
MI	Negeri	3	4	12	2	1	22
	Swasta	28	37	71	40	3	179
	Jumlah	31	41	83	42	4	201
SMP	Negeri	36	47	62	56	16	217
	Swasta	31	48	42	69	42	232
	Jumlah	67	95	104	125	58	449
MTs	Negeri	5	9	8	10	1	33
	Swasta	10	23	19	32	6	90
	Jumlah	15	32	27	42	7	123
SMA	Negeri	11	19	11	17	11	69
	Swasta	3	18	13	36	31	101
	Jumlah	14	37	24	53	42	170
MA	Negeri	7	13	13	8	8	49
	Swasta	19	32	32	50	19	152
	Jumlah	26	45	45	58	27	201
SMK	Negeri	3	3	1	5	2	14
	Swasta	5	19	11	26	5	66
	Jumlah	8	22	12	31	7	80

Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2023

Gambar 5.7 menunjukkan rasio sekolah negeri dan swasta di berbagai jenjang pendidikan di DIY pada tahun 2023. Gambar tersebut menjelaskan pula bahwa pada jenjang pendidikan dasar lebih didominasi oleh sektor publik/ milik pemerintah, sedangkan pendidikan menengah dan vokasional menunjukkan kontribusi sektor swasta yang lebih besar, dengan organisasi di bawah yayasan keagamaan. Menurut laporan Biro Tapem DIY (2020), kondisi ini disebabkan oleh banyak organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah atau Kanisius, yang melakukan pendidikan selain pemerintah. Sekolah swasta berusaha untuk

memperbaiki semua aspek. Mereka melakukannya dengan memperoleh dana yang lebih besar untuk membiayai semua kebutuhan sekolah, memperbaiki struktur silabus dan kurikulum, dan melakukan apa pun yang dapat membantu perkembangan siswa, terutama dengan penekanan pada nilai-nilai agama. Hal ini menarik perhatian orang tua yang ingin anak-anak mereka dididik sesuai dengan keyakinan agama mereka (Perwita dan Widuri, 2023).



Gambar 5.7 Rasio Sekolah Negeri dengan Swasta di DIY Tahun 2023

Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2023

G. Rasio Guru – Murid

Rasio guru terhadap murid merupakan ukuran perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ideal antara guru dengan murid didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 yang ditunjukkan pada Tabel 5.4. Pada jenjang pendidikan SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat memiliki rasio ideal guru dan murid sebesar 1:20. Sedangkan pada jenjang MI sederajat, MTs sederajat, MA sederajat, dan SMK sederajat memiliki rasio ideal guru dan murid sebesar 1:15.

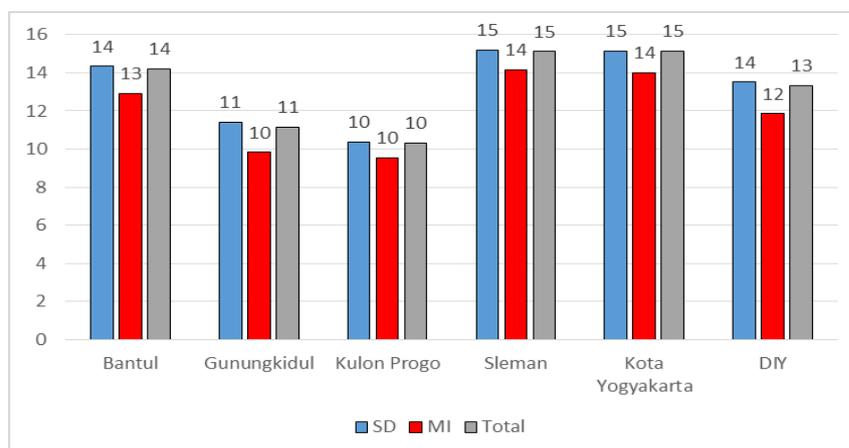
Tabel 5.4
Rasio Ideal Guru - Murid di Setiap Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Rasio Ideal Guru-Murid
SD sederajat	1:20
MI sederajat	1:15
SMP sederajat	1:20
MTs sederajat	1:15
SMA sederajat	1:20
MA sederajat	1:15
SMK sederajat	1:15

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17

1. Rasio Guru - Murid di SD dan MI

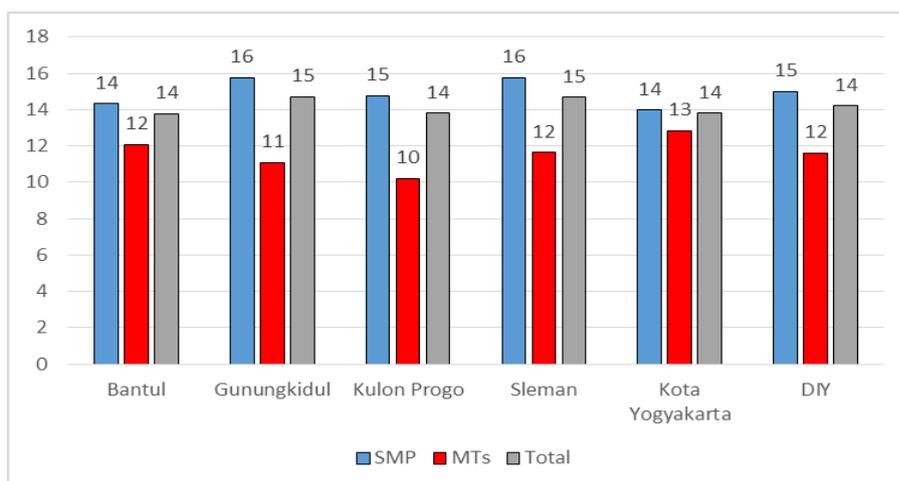
Pada jenjang pendidikan SD dan MI rata-rata rasio guru-murid tahun 2023 masing-masing sebesar 14 dan 12 (Gambar 5.8). Rasio guru-murid di Provinsi DIY bahkan hingga tingkat kabupaten/kota pada tahun 2023 menunjukkan nilai lebih rendah dibandingkan nilai rasio ideal yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Hasil yang sama ditunjukkan pada penelitian oleh Choi (2012) bahwa di bawah rasio siswa-guru yang lebih rendah, siswa menghabiskan lebih banyak waktu dalam tanggapan akademik aktif dan waktu keterlibatan akademik serta guru lebih sering memeriksa pemahaman siswa dan memberikan relevansi tugas yang lebih besar, lebih banyak umpan balik, instruksi yang lebih adaptif dan meningkatkan hasil prestasi siswa.



Gambar 5.8 Rasio Guru - Murid di SD dan MI di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023
Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, 2021 dan 2023

2. Rasio Guru - Murid di SMP dan MTs

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, standar ideal rasio guru-murid untuk jenjang pendidikan SMP dan MTS masing-masing sebesar 1:20 dan 1:15. Terlihat dari Gambar 5.9 rasio guru-murid pada jenjang pendidikan SMP dan MTs di Provinsi DIY pada tahun 2022 masing-masing sebesar 1:15 dan 1:12. Angka yang lebih rendah menunjukkan bahwa ada lebih sedikit murid untuk setiap guru, yang berarti bahwa setiap murid memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan perhatian dari guru yang dapat membantu memahami materi pelajaran, meningkatkan hasil belajar murid, dan meningkatkan kepuasan murid.



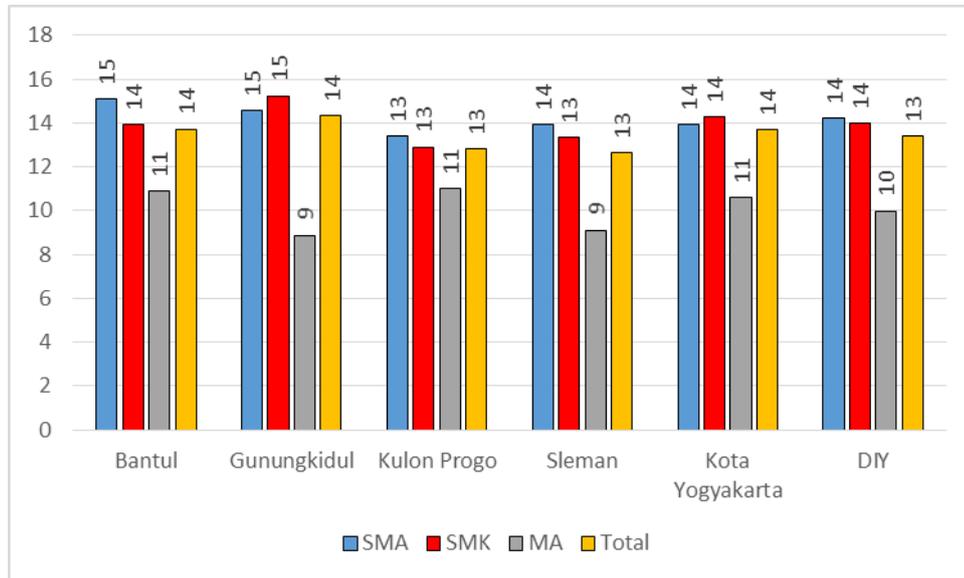
Gambar 5.9 Rasio Guru - Murid di SMP dan MTs di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2023

3. Rasio Guru - Murid di SMA dan MA

Berdasarkan data dari Gambar 5.10, rasio guru-murid di jenjang pendidikan SMA, SMK dan MA pada tahun 2023 masing-masing sebesar 1:14, 1:14 dan 1:10. Dibandingkan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, nilainya berada di bawah standar. Rasio yang lebih rendah memungkinkan guru untuk memberikan lebih banyak perhatian individual kepada setiap murid. Tetapi di sisi lain hal ini membuat sekolah

lebih mahal untuk dioperasikan. Ini karena sekolah harus membayar gaji lebih banyak kepada guru dan menyediakan lebih banyak fasilitas bagi murid.



Gambar 5.10 Rasio Guru - Murid di SMA, SMK dan MA di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2023

H. Jumlah Ruang Sekolah

Jumlah ruang sekolah merupakan salah satu sarana prasarana untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di suatu wilayah. Berdasarkan data dari Tabel 5.5 Tabel ini menunjukkan bahwa jumlah ruang kelas terbesar ada pada tingkat pendidikan SD di seluruh kabupaten/kota di DIY. Sleman memiliki jumlah ruang kelas terbanyak untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sedangkan untuk MI, Bantul memiliki jumlah ruang kelas yang paling banyak. Data ini penting untuk perencanaan dan evaluasi kapasitas fasilitas pendidikan di setiap kabupaten/kota di DIY, serta untuk memastikan bahwa infrastruktur pendidikan mencukupi untuk kebutuhan siswa di berbagai jenjang pendidikan.

Tabel 5.5
Jumlah Ruang Kelas Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Sekolah
di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Kabupaten/Kota					DIY
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	
SD	6.769	3.282	8.374	11.382	5.164	34971
MI	186	339	514	388	41	1468
SMP	2.308	1.177	3.378	5.086	2.567	14516
MTs	121	328	196	386	113	1144
SMA	222	547	274	595	656	2294
MA	74	242	98	273	115	802
SMK	405	722	780	965	537	3409

Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 20223

I. Perbandingan Siswa Per Kelas

Perbandingan siswa per kelas adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan jumlah siswa dengan jumlah kelas pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Standar yang digunakan untuk batas ideal jumlah maksimal siswa per rombongan belajar didasarkan pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Jenjang pendidikan yang digunakan dari peraturan ini hanya pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK. Jumlah maksimal siswa yang ideal dalam satu rombongan belajar pada masing-masing jenjang pendidikan sebanyak 28, 32, 36, dan 36. Berikutnya akan dideskripsikan kondisinya di DIY pada berbagai jenjang pendidikan.

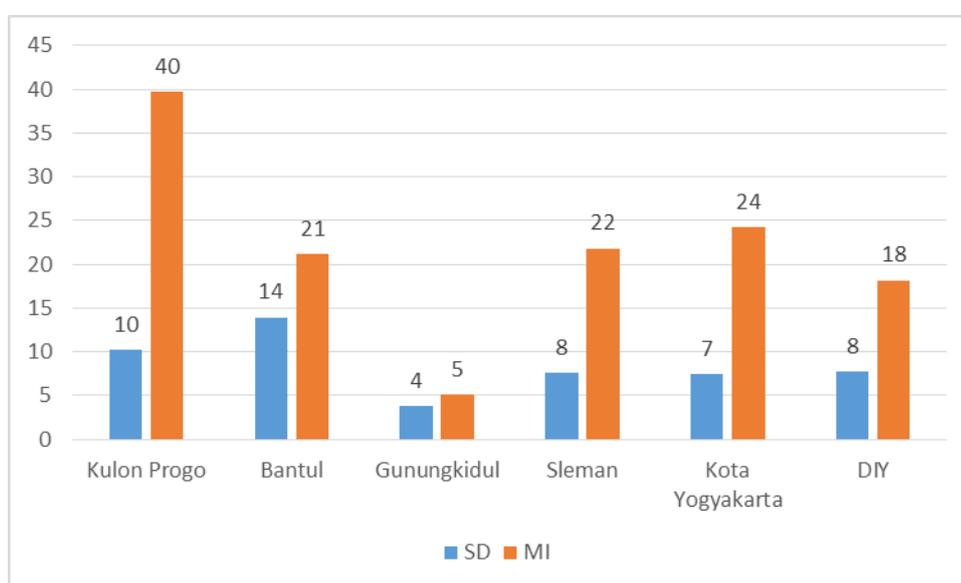
Tabel 5.6
Standar Jumlah Rombongan Belajar dan Maksimal Siswa per
Rombongan Belajar di Setiap Satuan Pendidikan

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Maksimal Siswa per Rombongan Belajar
1.	SD/MI	6-24	28
2.	SMP/MTs	3-33	32
3.	SMA/MA	3-36	36
4.	SMK	3-27	36
5.	SDLB	6	5
6.	SMPLB	3	8
7.	SMALB	3	8

Sumber: Permendikbud No. 22 Tahun 2016

1. Jumlah Siswa Per Kelas di SD/MI

Jumlah siswa per kelas di SD/MI di Provinsi DIY pada tahun 2022 masih pada standar jumlah maksimal per rombongan belajar. Berdasarkan Gambar 5.11 menunjukkan bahwa minat orang tua siswa lebih tinggi menyekolahkan di SD dibandingkan MI. Minat paling tinggi ditunjukkan di Kabupaten Kulon Progo.



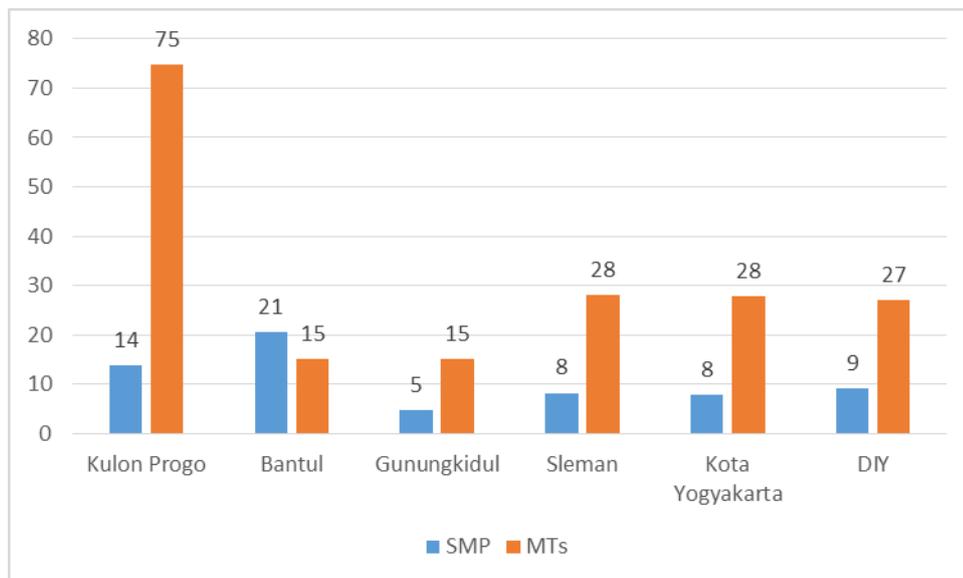
Gambar 5.11 Jumlah Siswa/Ruang SD/MI di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023
Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2023

2. Jumlah Siswa Per Kelas di SMP/MTs

Berdasarkan Gambar 5.12 bahwa jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP dan MTs di Provinsi DIY rata-rata sebesar 9 dan 27. Sama seperti di jenjang SD, nilai tertinggi lebih besar ke MTs dibandingkan SMP. Dampak dari jumlah siswa MTs yang lebih tinggi dibandingkan dengan SMP ini cukup signifikan. Pertama, dari segi kapasitas dan fasilitas pendidikan, sekolah-sekolah MTs harus menghadapi kebutuhan yang lebih besar untuk ruang kelas, peralatan, dan sumber daya pengajaran. Mereka harus memastikan bahwa infrastruktur yang ada mampu menampung jumlah siswa

yang banyak dan tetap menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Kedua, kualitas pengajaran dapat terpengaruh karena rasio siswa per guru yang lebih tinggi di MTs. Guru mungkin kesulitan memberikan perhatian individu kepada setiap siswa, yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.

Selain itu, kesejahteraan guru juga dapat terdampak oleh tingginya jumlah siswa di MTs. Beban kerja yang meningkat dapat menyebabkan stres dan kelelahan, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja mereka di kelas. Pengelolaan kelas dengan jumlah siswa yang besar juga menjadi tantangan, terutama dalam menjaga disiplin dan memastikan keterlibatan semua siswa dalam proses belajar. Lingkungan belajar yang terlalu padat dapat mengurangi efektivitas pembelajaran dan menciptakan suasana yang kurang kondusif.

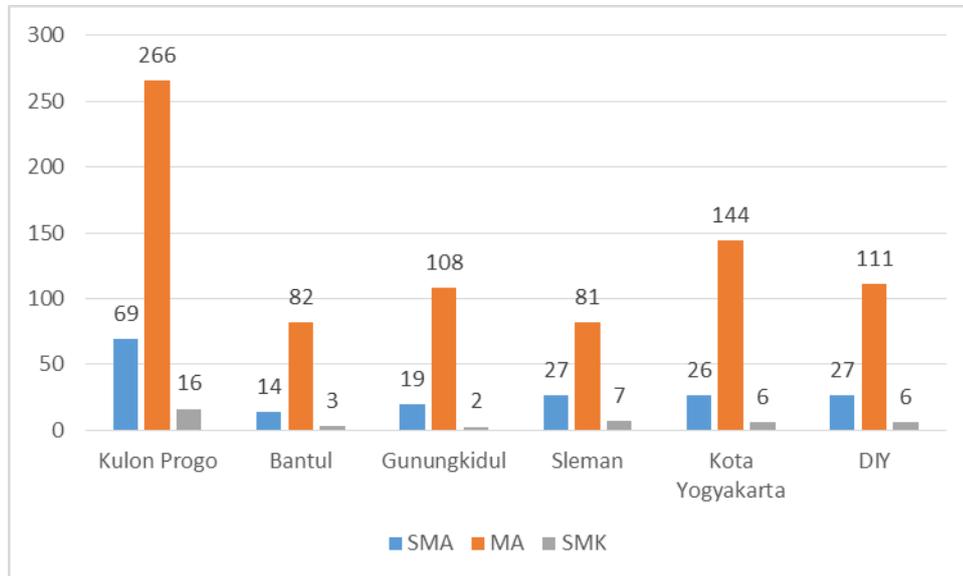


Gambar 5.12 Jumlah Siswa/Ruang SMP/MTs di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023
Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2023

3. Jumlah Siswa Per Kelas di SMA/MA/SMK

Jumlah siswa per kelas di DIY pada 2023 pada jenjang pendidikan SMA dan MA telah berada pada standar jumlah maksimal siswa per rombel

yakni sebesar 36. Sedangkan untuk SMK nilainya masih jauh di atas standar jumlah maksimal siswa per rombel.



Gambar 5.13 Jumlah Siswa/Ruang SMA/MA/SMK di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Sumber: Pencatatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2023

Jumlah siswa yang melebihi batas rombongan belajar (rombel) di SMA dan MA memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, kapasitas ruang kelas akan terlampaui, yang dapat menyebabkan lingkungan belajar menjadi padat dan tidak nyaman. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi siswa dan efektivitas pengajaran guru. Kedua, dengan jumlah siswa yang lebih banyak dari batas rombel, rasio guru-siswa menjadi tidak ideal, sehingga guru mungkin kesulitan memberikan perhatian individual kepada setiap siswa. Ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Selain itu, tekanan dan beban kerja yang meningkat pada guru dapat menyebabkan stres dan kelelahan, yang berdampak negatif pada kinerja dan kesejahteraan mereka. Sedangkan jumlah siswa yang jauh di bawah standar rombel di SMK juga memiliki implikasi yang signifikan. Pertama, fasilitas dan sumber daya yang tersedia di SMK mungkin tidak termanfaatkan secara optimal. Ruang kelas yang kurang terisi bisa berarti bahwa investasi dalam infrastruktur dan peralatan tidak

digunakan secara efisien. Kedua, dengan jumlah siswa yang sedikit, interaksi dan dinamika kelas mungkin kurang berkembang, yang dapat mengurangi kesempatan untuk diskusi kelompok dan pembelajaran kolaboratif. Selain itu, rendahnya jumlah siswa dapat memengaruhi suasana sosial di sekolah, membuat siswa merasa kurang termotivasi atau kurang bersemangat.



1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja^[1] merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan menganggur. Jumlah angkatan kerja berdasarkan gender di Kabupaten/Kota se-DIY tahun 2023 menunjukkan variasi yang signifikan antara laki-laki dan perempuan di berbagai daerah. Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 6.1, jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kulon Progo adalah masing-masing 176.762 dan 183.806, dengan total jumlah angkatan kerja mencapai 360.568. Di Kabupaten Bantul, jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan masing-masing adalah 382.768 dan 392.979, dengan total 775.747. Kabupaten Gunungkidul mencatat jumlah angkatan kerja laki-laki sebanyak 312.169 dan perempuan sebanyak 324.375, totalnya 636.544. Kabupaten Sleman memiliki jumlah angkatan kerja laki-laki sebanyak 434.180 dan perempuan sebanyak 451.066, dengan total 885.246. Di Kota Yogyakarta, jumlah angkatan kerja laki-laki adalah 160.371 dan perempuan 172.883, totalnya mencapai 333.254. Secara keseluruhan, di DIY terdapat 1.466.250 laki-laki dan 1.525.109 perempuan yang tergabung dalam angkatan kerja, dengan jumlah total 2.991.359.

[7] <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/47>



Tabel 6.1
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Gender di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

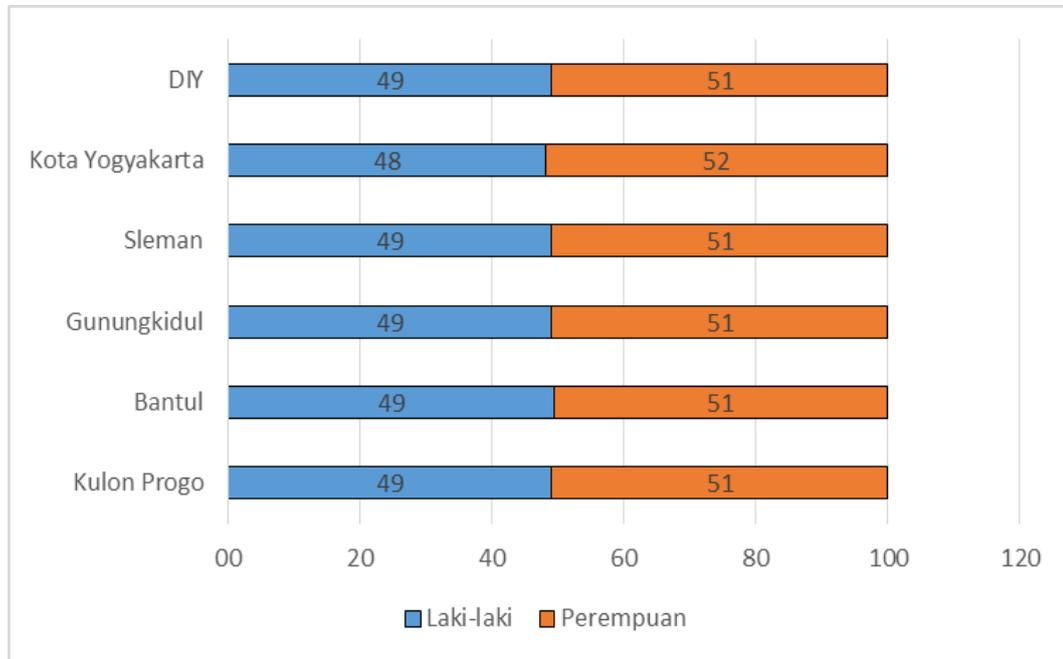
Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kulon Progo	176.762	183.806	360.568
Bantul	382.768	392.979	775.747
Gunungkidul	312.169	324.375	636.544
Sleman	434.180	451.066	885.246
Kota Yogyakarta	160.371	172.883	333.254
DIY	1.466.250	1.525.109	2.991.359

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II Tahun 2023

Temuan ini mengindikasikan bahwa jumlah angkatan kerja perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki di setiap kabupaten/kota di DIY. Hal ini mungkin mencerminkan perubahan sosial dan ekonomi, di mana partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkat. Jika dibandingkan dengan literatur, hasil ini menunjukkan bahwa DIY mengikuti tren global peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Signifikansi temuan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan daerah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan inklusi gender dalam berbagai sektor pekerjaan. Implikasi dari temuan ini penting untuk perencanaan kebijakan pada masa depan, terutama dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan setara bagi semua gender. Temuan ini juga menekankan pentingnya terus mendorong pendidikan dan pelatihan bagi perempuan agar mereka dapat berkontribusi lebih signifikan dalam angkatan kerja.

Persentase angkatan kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada tahun 2023 (Gambar 6.1). Persentase angkatan kerja perempuan yang lebih besar dibandingkan laki-laki di DIY dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, akses pendidikan yang lebih baik bagi perempuan telah meningkatkan keterampilan dan kualifikasi mereka, sehingga lebih banyak perempuan yang mampu dan mau memasuki pasar kerja. Kebijakan pemerintah yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan juga berperan signifikan dalam mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.



Gambar 6.1. Persentase Angkatan Kerja Laki-laki dengan Perempuan di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2023

Kedua, perubahan sosial dan normatif mengenai peran gender telah menggeser persepsi tradisional tentang perempuan hanya sebagai pengurus rumah tangga. Banyak keluarga sekarang melihat pentingnya kontribusi ekonomi dari perempuan, sehingga mendorong mereka untuk bekerja. Selain itu, industri dan sektor pekerjaan di DIY mungkin menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan yang sesuai atau menarik bagi perempuan, seperti sektor jasa, pendidikan, dan kesehatan.

Ketiga, kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor pendorong. Keluarga mungkin membutuhkan pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga baik laki-laki maupun perempuan terpaksa bekerja. Dalam beberapa kasus, perempuan mungkin lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau lebih fleksibel dalam menyesuaikan pekerjaan dengan tanggung jawab rumah tangga.

Faktor demografis juga dapat berpengaruh. Jika populasi perempuan usia kerja lebih besar dibandingkan laki-laki, hal ini secara alami akan meningkatkan persentase angkatan kerja perempuan. Semua faktor ini, baik secara individu maupun gabungan, berkontribusi pada persentase angkatan kerja perempuan yang lebih tinggi di DIY.

B. Jenis Pekerjaan Angkatan Kerja

Angkatan kerja terdiri dari penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja dan belum bekerja. Kondisi umum angkatan kerja di DIY tahun 2023 menunjukkan distribusi yang bervariasi berdasarkan jenis pekerjaan dan gender. Dari data yang ada pada Tabel 6.2, terlihat bahwa terdapat beberapa sektor pekerjaan yang mendominasi jumlah angkatan kerja, baik laki-laki maupun perempuan. Tiga jenis pekerjaan dengan jumlah pekerja tertinggi di DIY adalah karyawan swasta, buruh, dan wiraswasta.

Pertama, kategori karyawan swasta adalah yang tertinggi dengan total 442.019 orang. Dari jumlah ini, 263.452 adalah laki-laki dan 178.567 adalah perempuan. Dominasi kategori ini mencerminkan tingginya permintaan tenaga kerja di sektor swasta, yang mencakup berbagai industri seperti manufaktur, jasa, dan perdagangan. Karyawan swasta seringkali menawarkan kesempatan kerja yang luas dengan variasi pekerjaan yang beragam, sehingga menarik banyak angkatan kerja.

Kedua, kategori buruh menempati urutan kedua dengan total 409.561 orang, terdiri dari 278.274 laki-laki dan 131.287 perempuan. Pekerjaan sebagai buruh banyak ditemukan di sektor-sektor seperti konstruksi, pertanian, dan manufaktur. Tingginya jumlah pekerja buruh menunjukkan adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja manual dan semi-terampil di DIY.

Ketiga, kategori wiraswasta memiliki total 311.512 orang, dengan 194.976 laki-laki dan 116.536 perempuan. Tingginya jumlah wiraswasta mencerminkan budaya kewirausahaan yang kuat di DIY, di mana banyak

individu yang memilih untuk menjalankan usaha sendiri. Jenis usaha yang dijalankan oleh wiraswasta bisa sangat bervariasi, mulai dari usaha kecil menengah, perdagangan, hingga industri kreatif.

Tabel 6.2
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Gender
di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

Wilayah		Kab. Kulon Progo	Kab. Bantul	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta
Belum/Tidak Bekerja	L	8.662	1.019	14.983	1.536	8.428	57.623
	P	6.632	1.077	11.531	11.405	7.214	47.552
	Jml	15.294	2.096	26.514	12.941	15.642	105.175
Pegawai Negeri Sipil	L	3.791	9.009	4.566	12.035	4.638	34.039
	P	3.496	921	3.685	11.727	4.492	3.261
	Jml	7.287	9.930	8.251	23.762	9.130	37.300
Tni/Polri	L	2.153	3.123	1.345	7.505	1.197	18.212
	P	87	357	51	452	106	1.053
	Jml	2.240	3.480	1.396	7.957	1.303	19.265
Pejabat Tinggi Negara	L	28	28	28	35	15	134
	P	9	6	7	13	5	40
	Jml	37	34	35	48	20	174
Buruh	L	15.281	106.264	54.813	85.585	14.207	278.274
	P	5.008	76.835	3.907	24.965	4.120	131.287
	Jml	20.289	183.099	58.720	110.550	18.327	409.561
Karyawan Swasta	L	29.681	5.839	37.934	9.785	39.597	263.452
	P	21.576	44.244	21.809	62.535	28.403	178.567
	Jml	51.257	50.083	59.743	72.320	68.000	442.019
Wiraswasta	L	29.387	52.426	38.901	44.593	29.669	194.976
	P	18.186	41.301	18.869	21.802	16.378	116.536
	Jml	47.573	93.727	57.770	66.395	46.047	311.512
Dosen Dan Guru	L	1.283	2.699	1.071	5.066	1.721	11.840
	P	2.946	6.060	2.216	9.448	2.938	5.662
	Jml	4.229	8.759	3.287	14.514	4.659	17.502
Tenaga Kesehatan	L	191	536	137	1.208	567	2.639
	P	939	2.320	556	2.715	1.492	6.807
	Jml	1.130	2.856	693	3.923	2.059	9.446
Sektor Pertanian/Peternakan/Perikanan	L	2.888	4.857	51.871	10.561	153	94.576
	P	26.003	5.480	63.569	6.303	108	101.463
	Jml	28.891	10.337	115.440	16.864	261	196.039
Pedagang	L	2.378	2.913	2.619	5.006	1.927	14.843
	P	3.568	4.069	1.954	6.511	1.750	17.852
	Jml	5.946	6.982	4.573	11.517	3.677	32.695
Pekerjaan Lainnya	L	4.407	10.814	7.046	14.148	4.425	42.271
	P	1.557	6.681	3.029	6.560	2.697	20.524
	Jml	6.871	20.138	11.141	27.767	11.502	78.850

Sumber: Kemendagri, hasil olah DKB semester II Tahun 2023

Secara umum, ketiga jenis pekerjaan ini menunjukkan dinamika ekonomi DIY yang didorong oleh sektor swasta, buruh, dan kewirausahaan. Kondisi ini mencerminkan struktur ekonomi yang beragam dan fleksibel, yang memungkinkan berbagai macam pekerjaan dan usaha berkembang di daerah ini. Ini juga menunjukkan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan di sektor-sektor utama ini.

Di sisi lainnya, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan tetap menjadi bagian penting dari perekonomian DIY. Peran signifikan perempuan dalam sektor ini menunjukkan perlunya kebijakan dan program yang mendukung keberlanjutan serta peningkatan kesejahteraan pekerja di sektor agraris. Hal ini termasuk akses terhadap teknologi pertanian modern, pendidikan dan pelatihan, serta perlindungan sosial yang lebih baik bagi pekerja pertanian.

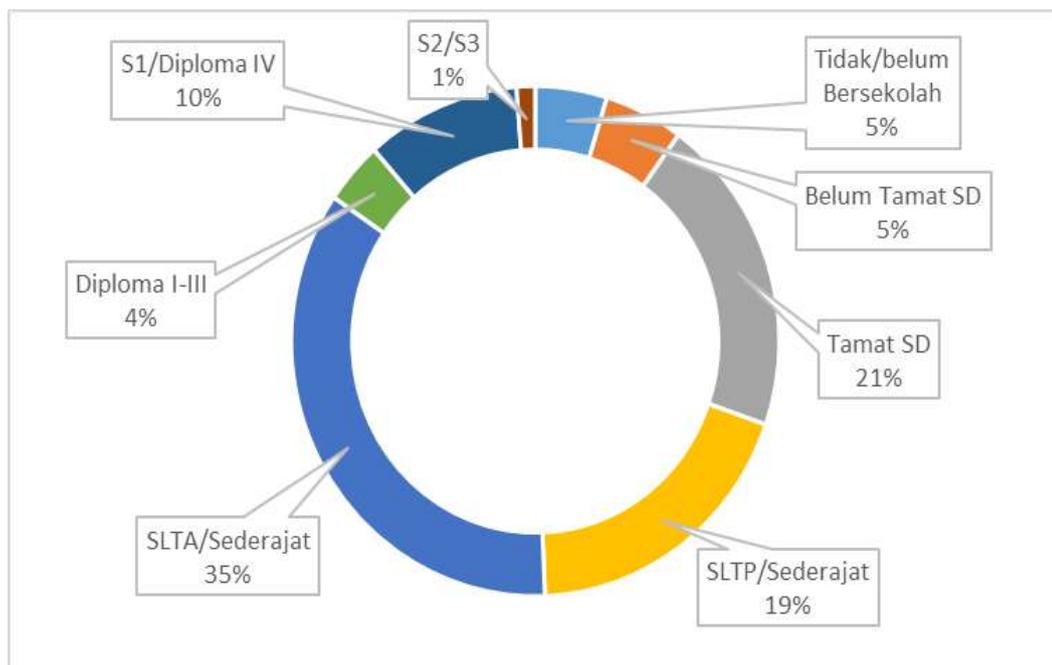
C. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja

Tingkat pendidikan angkatan kerja menggambarkan kondisi angkatan kerja yang berada di pasar kerja berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya. Kondisi di DIY, angkatan kerja didominasi oleh angkatan kerja dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Persentasenya sebesar 34,3 persen dari total seluruh angkatan kerja yang tersedia. Diduga kuat hal ini berkaitan dengan gambaran banyaknya penduduk yang bekerja di jenis pekerjaan karyawan swasta atau wiraswasta.

Gambar 6.2 menunjukkan persentase angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan di DIY tahun 2023. Data ini memberikan gambaran tentang bagaimana tingkat pendidikan memengaruhi partisipasi angkatan kerja di wilayah tersebut.

Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa sebagian besar angkatan kerja memiliki pendidikan hingga tingkat menengah atas (SMA/SMK), yang mencakup lebih dari separuh populasi angkatan kerja. Ini

menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kerja di DIY memiliki kualifikasi pendidikan yang memungkinkan mereka untuk memasuki berbagai sektor pekerjaan, baik formal maupun informal. Pendidikan menengah atas memberikan dasar yang cukup kuat untuk keterampilan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan di pasar kerja.



Gambar 6.2. Persentase Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan di DIY Tahun 2023
Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2023

Selanjutnya, angkatan kerja dengan pendidikan tinggi (D3, S1, atau lebih tinggi) juga menunjukkan persentase yang signifikan. Ini mencerminkan peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi di DIY, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan peluang kerja. Angkatan kerja dengan pendidikan tinggi cenderung mengisi posisi yang membutuhkan keahlian khusus dan berkontribusi pada sektor-sektor yang lebih maju seperti teknologi, kesehatan, dan pendidikan.

Sebaliknya, persentase angkatan kerja dengan pendidikan rendah (tidak tamat SD, SD, dan SMP) lebih kecil. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan kesadaran akan pentingnya

pendidikan dan program pemerintah yang mendukung pendidikan dasar bagi semua warga. Namun, angkatan kerja dengan pendidikan rendah biasanya masih terlibat dalam sektor-sektor yang tidak memerlukan keterampilan tinggi, seperti pertanian, konstruksi, dan pekerjaan informal lainnya.

Justifikasi dari temuan ini dapat dilihat dari literatur yang menunjukkan korelasi positif antara tingkat pendidikan dan partisipasi angkatan kerja. Pendidikan yang lebih tinggi tidak hanya meningkatkan peluang kerja tetapi juga kualitas pekerjaan yang tersedia. Pendidikan menengah dan tinggi memberikan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan yang lebih produktif dan berpenghasilan lebih tinggi, sementara pendidikan rendah cenderung membatasi pilihan pekerjaan dan potensi penghasilan. Hasil ini sekaligus menunjukkan tren yang konsisten di mana peningkatan akses dan kualitas pendidikan berdampak positif pada struktur angkatan kerja. Peningkatan persentase angkatan kerja dengan pendidikan menengah dan tinggi juga mencerminkan kebijakan pemerintah daerah yang efektif dalam mendukung pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Tabel 6.3 menunjukkan jumlah angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan dan gender di Kabupaten/Kota se-DIY tahun 2023. Data ini memberikan wawasan tentang bagaimana distribusi angkatan kerja laki-laki dan perempuan bervariasi berdasarkan tingkat pendidikan di DIY.

Perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan terlihat dalam beberapa kategori pendidikan. Misalnya, pada kategori "Tidak/Belum Sekolah," jumlah perempuan (90.538) jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki (51.566), dengan total 142.104. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan yang tidak atau belum sekolah dibandingkan laki-laki, yang bisa mencerminkan kendala akses pendidikan bagi perempuan di tingkat dasar.

Tabel 6.3.
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Gender di
Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

WILAYAH		KAB. KULON PROGO	KAB. BANTUL	KAB. GUNUNGGIDUL	KAB. SLEMAN	KOTA YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA
TIDAK/ BELUM SEKOLAH	L	4.511	11.509	26.804	6.418	2.324	51.566
	P	8.059	19.898	46.348	13.000	3.233	90.538
	JML	12.570	31.407	73.152	19.418	5.557	142.104
BELUM TAMAT SD/ SEDERAJAT	L	8.870	19.042	19.230	17.549	11.906	76.597
	P	9.986	17.930	19.152	20.854	12.498	80.420
	JML	18.856	36.972	38.382	38.403	24.404	157.017
TAMAT SD/ SEDERAJAT	L	38.556	80.098	93.524	52.472	16.628	281.278
	P	46.257	90.072	103.779	65.900	20.255	326.263
	JML	84.813	170.170	197.303	118.372	36.883	607.541
SLTP/ SEDERAJAT	L	37.546	74.266	80.037	73.627	24.137	289.613
	P	36.522	71.498	73.689	73.113	25.667	280.489
	JML	74.068	145.764	153.726	146.740	49.804	570.102
SLTA/ SEDERAJAT	L	71.889	149.195	77.664	195.142	60.315	554.205
	P	63.050	133.688	64.642	175.502	60.983	497.865
	JML	134.939	282.883	142.306	370.644	121.298	1.052.070
DIPLOMA I/II	L	923	2.613	1.607	3.867	1.107	10.117
	P	1.489	4.057	1.739	5.915	1.858	15.058
	JML	2.412	6.670	3.346	9.782	2.965	25.175
AKADEMI/ DIPLOMA III/ S.MUDA	L	3.024	8.896	2.665	15.485	8.049	38.119
	P	4.686	13.620	3.497	22.427	11.313	55.543
	JML	7.710	22.516	6.162	37.912	19.362	93.662
DIPLOMA IV/ STRATA I	L	10.694	33.197	9.810	59.167	31.286	144.154
	P	13.150	38.973	11.013	66.226	33.242	162.604
	JML	23.844	72.170	20.823	125.393	64.528	306.758
STRATA II	L	713	3.591	780	8.786	4.043	17.913
	P	592	3.065	474	7.345	3.525	15.001
	JML	1.305	6.656	1.254	16.131	7.568	32.914
STRATA III	L	36	361	47	1.667	576	2.687
	P	15	178	42	784	309	1.328
	JML	51	539	89	2.451	885	4.015
Jumlah	L	176.762	382.768	312.168	434.180	160.371	1.466.249
	P	183.806	392.979	324.375	451.066	172.883	1.525.109
	JML	360.568	775.747	636.543	885.246	333.254	2.991.358

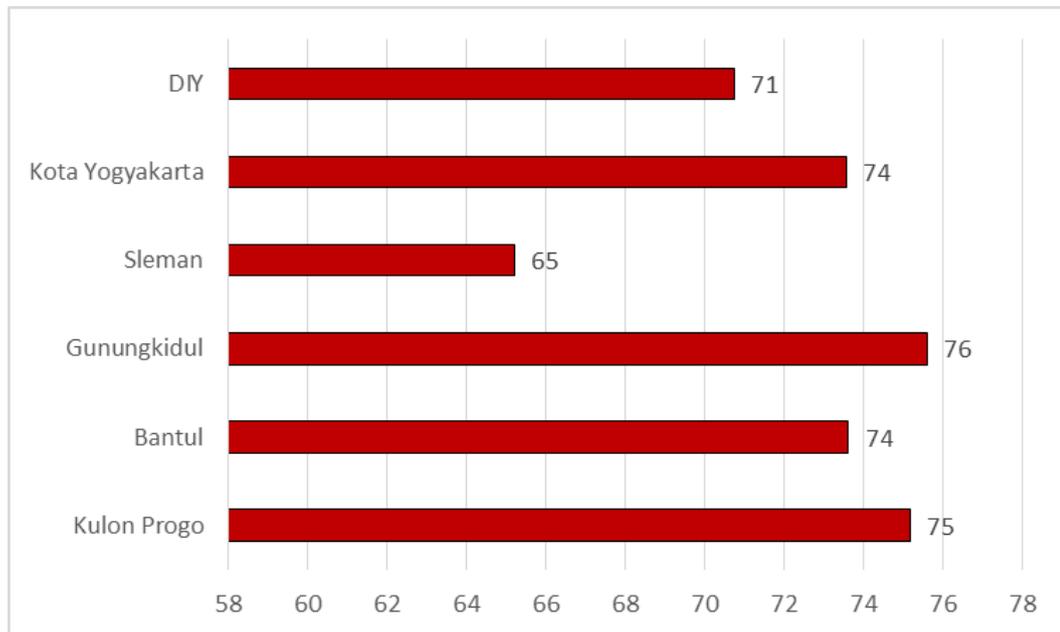
Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2023

Kondisi umum angkatan kerja perempuan di DIY untuk jenjang pendidikan Diploma III (D3) ke atas menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi dan signifikan. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Akademi/Diploma

III/S.Muda mencapai 55.543 orang. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berjumlah 38.119 orang. Tren ini berlanjut pada jenjang pendidikan Diploma IV/Strata I, di mana terdapat 162.604 perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan tersebut, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berjumlah 144.154. Pada jenjang pendidikan Strata II, terdapat 15.001 perempuan dibandingkan 17.913 laki-laki. Meskipun terdapat penurunan jumlah dibandingkan jenjang sebelumnya, partisipasi perempuan tetap signifikan. Untuk jenjang Strata III, jumlah perempuan adalah 1.328, lebih rendah dibandingkan laki-laki yang berjumlah 2.687. Partisipasi tinggi perempuan dalam pendidikan jenjang D3 ke atas mencerminkan peningkatan akses dan peluang pendidikan tinggi bagi perempuan di DIY. Faktor-faktor seperti kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi, dukungan keluarga, serta kebijakan pemerintah yang mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan berperan penting dalam pencapaian ini.

D. Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diperoleh dengan membandingkan angkatan kerja dengan usia kerja. Berdasarkan Gambar 6.3, TPAK per kabupaten/kota di DIY pada tahun 2023 menunjukkan variasi yang signifikan. Kabupaten Gunungkidul mencatatkan TPAK tertinggi sebesar 76%, diikuti oleh Kulon Progo sebesar 75%, dan Kota Yogyakarta serta Bantul masing-masing sebesar 74%. Sementara itu, Kabupaten Sleman memiliki TPAK terendah sebesar 65%, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata DIY yang mencapai 71%. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam partisipasi angkatan kerja di berbagai wilayah DIY, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat urbanisasi, peluang kerja, dan program pemerintah setempat.



Gambar 6.3 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja per Kabupaten Kota se-DIY Tahun 2023

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II Tahun 2023

Penemuan ini dapat dijustifikasi dengan literatur yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor demografis dan ekonomi. Menurut penelitian oleh Kemal & Naci (2009); Sen (2017); Fan (2019), daerah dengan tingkat urbanisasi yang lebih tinggi cenderung memiliki TPAK yang lebih rendah karena adanya peluang pendidikan yang lebih besar dan kecenderungan untuk melanjutkan studi daripada segera memasuki pasar kerja. Hal ini mungkin menjelaskan TPAK yang lebih rendah di Sleman, yang memiliki banyak institusi pendidikan tinggi. Sebaliknya, daerah dengan akses pekerjaan yang lebih mudah, seperti Gunungkidul dengan sektor pariwisatanya yang berkembang, menunjukkan TPAK yang lebih tinggi.

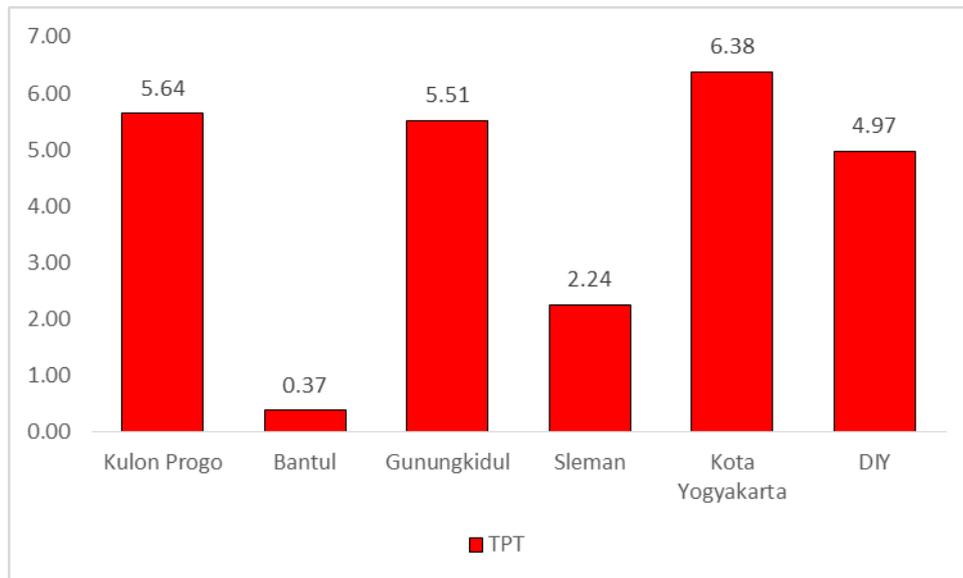
E. Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)⁸ didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada 2023 pengangguran terbuka di DIY sebesar 4,97% (Gambar 6.4). Artinya bahwa dari 100 angkatan kerja ada sekitar 5 orang yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Berdasarkan grafik TPT DIY tahun 2023, terlihat bahwa terdapat variasi yang cukup signifikan antarkabupaten/kota di DIY. Kota Yogyakarta mencatat TPT tertinggi sebesar 6,38%, diikuti oleh Kulon Progo sebesar 5,64% dan Gunungkidul sebesar 5,51%. Sleman menunjukkan angka yang lebih rendah dengan TPT sebesar 2,24%, sementara Bantul memiliki TPT terendah sebesar 0,37%. Secara keseluruhan, TPT DIY berada pada angka 4,97%. Variasi ini menunjukkan perbedaan dalam kondisi ekonomi dan peluang kerja di setiap daerah.

Penemuan ini dapat dijustifikasi dengan literatur yang menyebutkan bahwa TPT dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan. Menurut studi oleh Susanto & Pratama (2019); Dewi (2020); Wulandari & Dariah (2022), daerah perkotaan dengan konsentrasi penduduk yang tinggi seperti Kota Yogyakarta cenderung memiliki TPT yang lebih tinggi karena persaingan kerja yang lebih ketat dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Sebaliknya, daerah dengan sektor pertanian yang dominan dan kurang urban, seperti Bantul, mungkin memiliki TPT yang lebih rendah karena banyak penduduknya yang terlibat dalam sektor informal atau bekerja di pertanian keluarga.

⁸ <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/44>



Gambar 6.4 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Tahun 2023
 Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II Tahun 2023

F. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja⁹ didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Secara absolut jumlah bukan angkatan kerja di DIY sebesar 875.087 jiwa (Tabel 6.4). Jumlah tersebut didominasi oleh pelajar/mahasiswa.

Faktor demografis dan sosial memengaruhi komposisi bukan angkatan kerja. Studi oleh Devi et al. (2019); Setyono & Cahyono (2019) menunjukkan bahwa daerah dengan konsentrasi lembaga pendidikan tinggi yang tinggi, seperti Sleman dan Yogyakarta, cenderung memiliki jumlah pelajar/mahasiswa yang tinggi. Selain itu, budaya lokal dan struktur keluarga tradisional di beberapa daerah dapat menjelaskan tingginya jumlah orang yang mengurus rumah tangga, terutama di Bantul dan Gunungkidul.

⁹ <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>

Tabel 6.4.
Jumlah Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan dan Gender
Di Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2023

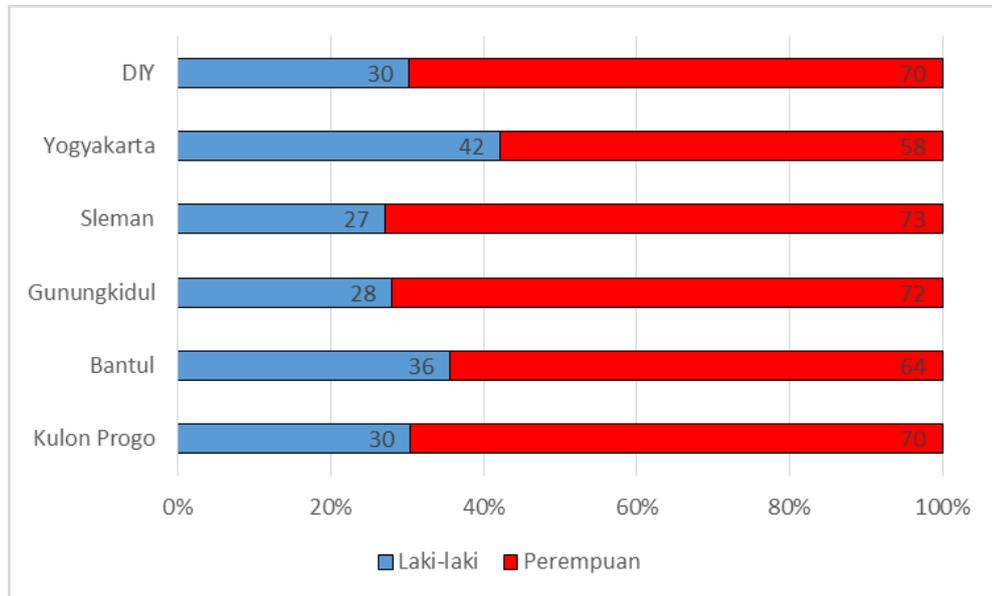
Status	Gender	Kabupaten/Kota					DIY
		Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	
Mengurus Rumah Tangga	L	1	36	18	46	3	104
	P	36.702	65.725	75.533	148.025	46.963	372.948
	L+P	36.703	65.761	75.551	148.071	46.966	373.052
Pelajar/Mahasiswa	L	25.706	69.936	42.187	78.199	36.038	252.066
	P	25.052	64.477	35.829	73.373	3.297	231.701
	L+P	50.758	134.413	78.016	151.572	39.335	483.767
Pensiunan	L	1.429	2.898	1.223	5.322	1.047	11.919
	P	577	1.536	403	3.119	714	6.349
	L+P	2.006	4.434	1.626	8.441	1.761	18.268
Jumlah	L	27.136	72.870	43.428	83.567	37.088	264.089
	P	62.331	131.738	111.765	224.517	50.974	610.998
	L+P	89.467	204.608	155.193	308.084	88.062	875.087

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2023

Pada aspek gender, berdasarkan Gambar 6.5, persentase bukan angkatan kerja laki-laki dan perempuan di kabupaten/kota se-DIY pada tahun 2023 menunjukkan perbedaan yang mencolok. Secara umum, persentase perempuan yang tidak termasuk dalam angkatan kerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki di semua wilayah. Kota Yogyakarta menunjukkan persentase tertinggi untuk perempuan bukan angkatan kerja, diikuti oleh Sleman dan Bantul. Sebaliknya, persentase laki-laki yang bukan angkatan kerja relatif lebih rendah, dengan perbedaan yang paling signifikan terlihat di Bantul dan Gunungkidul.

Penemuan ini dapat dijustifikasi dengan literatur yang menyatakan bahwa faktor gender memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi angkatan kerja. Menurut penelitian oleh Khotimah (2009); Rahmawati (2016); Subagja (2022), peran gender tradisional dan tanggung jawab rumah tangga seringkali menjadi alasan utama mengapa banyak perempuan tidak termasuk dalam angkatan kerja, terutama di daerah dengan budaya yang lebih konservatif. Selain itu, faktor lain seperti akses ke pendidikan dan

kesempatan kerja yang tidak setara juga berkontribusi pada tingginya persentase perempuan yang bukan angkatan kerja.

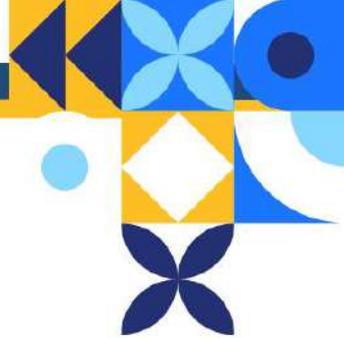


Gambar 6.5. Persentase Bukan Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten/Kota se-DIY di Tahun 2023

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2023

BAB. 07

Profil Demografi Wanita Kepala Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta



Bab VII merupakan bab khusus yang membahas isu penduduk di DIY. Pada tahun ini isu yang dibahas mengenai profil demografi perempuan kepala keluarga di DIY. Data dasar yang digunakan bersumber dari Administrasi Kependudukan (Admindex) Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2023. Pembahasan pada bab ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah mengenai pendahuluan, bagian kedua membahas profil demografi perempuan kepala keluarga di DIY dan ketiga membahas implikasi dan arah kebijakan ke depan.

1. Pendahuluan

Perubahan dinamika sosial dan ekonomi di Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap struktur keluarga. Salah satu fenomena yang semakin menonjol adalah meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga (Rohmiyati, 2017; Fadilah, 2018). Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah dengan karakteristik budaya dan sosial yang unik, seperti DIY.



DIY, dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, menghadapi tantangan sosial yang khas. Dalam konteks ini, perempuan kepala keluarga memainkan peran penting dalam mempertahankan kesejahteraan keluarga mereka (Dewi, 2017; Primayuni, 2019; Ikhwan & Suharyono, 2023). Peran ini mencakup tanggung jawab ekonomi, sosial, dan seringkali tanggung jawab sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga.

Kajian demografi yang berfokus pada profil perempuan kepala keluarga di DIY menjadi penting untuk memahami lebih dalam tentang kondisi dan tantangan yang mereka hadapi. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai distribusi usia, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan perempuan kepala keluarga di DIY. Informasi ini esensial untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan merumuskan kebijakan yang mendukung mereka.

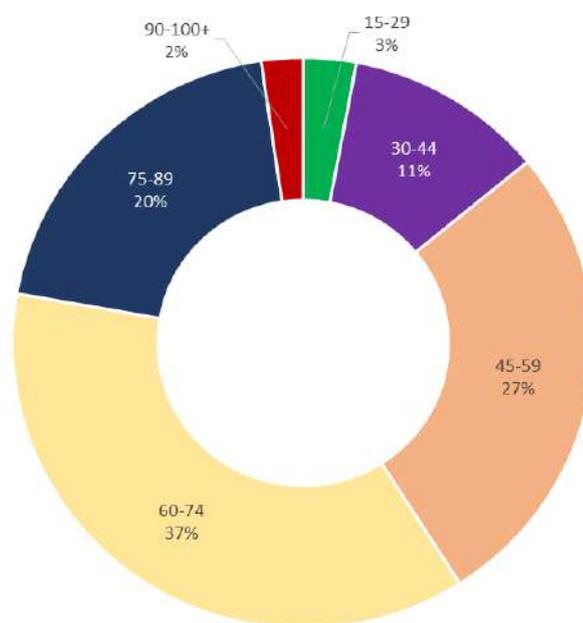
Dengan memahami profil ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di DIY. Pendekatan ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi sosial dalam merancang program-program yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji profil demografi perempuan kepala keluarga di DIY dengan fokus pada aspek usia, pendidikan, dan pekerjaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi dan sosial mereka, serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan perempuan kepala keluarga di daerah ini.

B. Profil Demografi Perempuan Kepala Keluarga di DIY

Profil demografi perempuan kepala keluarga di DIY akan dibahas menurut kelompok umur, pendidikan terakhir yang ditamatkan, jenis pekerjaan dan jumlah anggota keluarga. Berdasarkan kelompok umur,

distribusi kelompok umur perempuan kepala rumah tangga di DIY menunjukkan variasi yang signifikan dengan mayoritas berada pada rentang usia 60-74 tahun (37%) dan 45-59 tahun (27%). Kelompok usia 75-89 tahun juga memiliki proporsi yang cukup besar yaitu 20%, sementara kelompok usia 30-44 tahun hanya mencapai 11%. Kelompok usia yang lebih muda, yaitu 15-29 tahun, dan yang sangat lanjut usia, yaitu 90-100+ tahun, memiliki persentase yang paling kecil, masing-masing sebesar 3% dan 2%.



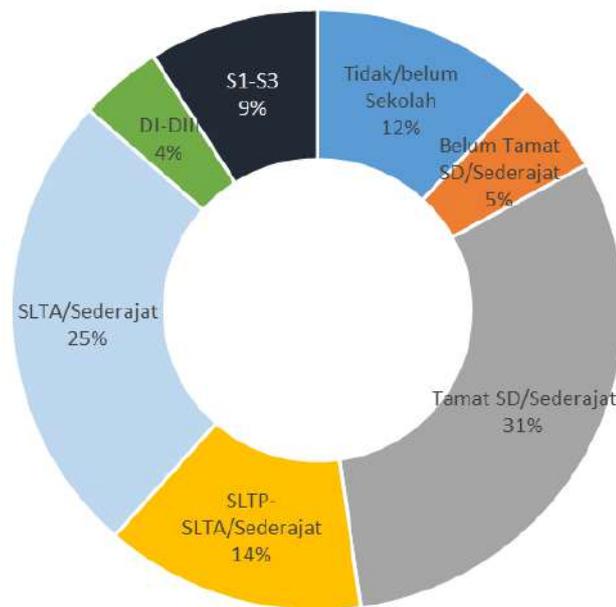
Gambar 7.1 Distribusi Kelompok Umur Perempuan Kepala Rumah Tangga di DIY

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2023

Distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan kepala rumah tangga di DIY berada pada usia yang lebih tua. Hal ini dapat diinterpretasikan dengan adanya faktor budaya dan ekonomi yang mendorong perempuan untuk mengambil peran kepala rumah tangga pada usia yang lebih lanjut, mungkin setelah anak-anak mereka dewasa atau setelah kehilangan pasangan hidup. Situasi ini sejalan dengan tren demografis di banyak daerah di Indonesia, di mana perempuan cenderung

hidup lebih lama daripada laki-laki dan sering kali mengambil peran sebagai kepala rumah tangga di usia lanjut karena kematian pasangan.

Distribusi tingkat pendidikan perempuan kepala rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sebagian besar perempuan kepala rumah tangga menamatkan pendidikan hingga tingkat SD atau sederajat, yang mencakup 31% dari populasi tersebut. Kelompok terbesar kedua adalah mereka yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SLTA atau sederajat (25%), diikuti oleh yang tamat SLTP atau sederajat (14%). Sementara itu, 12% perempuan kepala rumah tangga tidak/belum sekolah, dan 5% tidak menamatkan SD atau sederajat. Persentase yang menamatkan pendidikan tinggi seperti DI-DIII (4%) dan S1-S3 (9%) relatif kecil dibandingkan dengan kelompok lainnya.



Gambar 7.2 Perempuan Kepala Rumah Tangga di DIY Berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, 2023

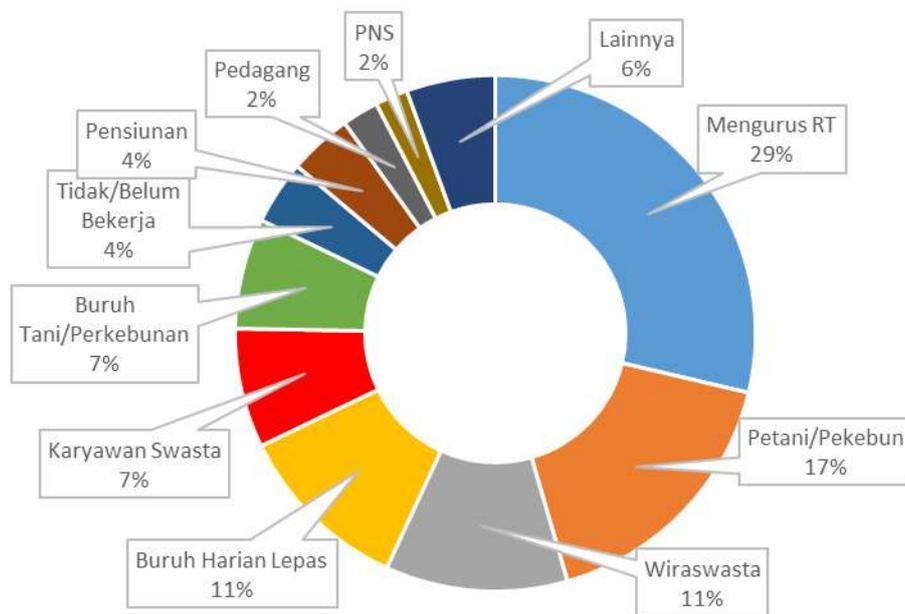
Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2023

Justifikasi temuan ini berdasarkan literatur menunjukkan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi perempuan kepala rumah tangga (Rini & Sugiharti, 2016; Telaumbanua & Nugraheni, 2018). Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap peluang pekerjaan, layanan kesehatan, dan informasi yang relevan dengan pengelolaan rumah tangga. Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan korelasi positif antara tingkat pendidikan dan kualitas hidup serta kemampuan untuk mengakses sumber daya yang mendukung kesejahteraan keluarga. Dalam konteks DIY, temuan ini menggarisbawahi pentingnya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan untuk memperbaiki status sosial dan ekonomi mereka.

Distribusi jenis pekerjaan perempuan kepala rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka terlibat dalam aktivitas rumah tangga, dengan 29% menyatakan mengurus rumah tangga sebagai pekerjaan utama mereka. Selain itu, 17% berprofesi sebagai petani/pekebun, mencerminkan karakteristik agraris wilayah tersebut. Profesi wiraswasta dan buruh harian lepas masing-masing mencakup 11% dari populasi ini, sementara karyawan swasta dan buruh tani/perkebunan masing-masing mencakup 7%. Kelompok lainnya termasuk pensiunan (4%), tidak/belum bekerja (4%), pedagang (2%), dan PNS (2%). Ada juga 6% yang terlibat dalam berbagai pekerjaan lain yang tidak disebutkan secara spesifik.

Justifikasi temuan ini mengindikasikan bahwa jenis pekerjaan yang diambil oleh perempuan kepala rumah tangga seringkali dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, keterampilan yang dimiliki, dan kondisi ekonomi setempat. Tingginya persentase perempuan yang mengurus rumah tangga menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang mungkin tidak memiliki akses atau peluang untuk pekerjaan formal atau lebih bergaji tinggi. Peran sebagai petani/pekebun dan buruh harian lepas menunjukkan ketergantungan pada

sektor informal dan agraris, yang seringkali kurang memberikan jaminan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Literatur juga menunjukkan bahwa pekerjaan di sektor informal sering kali tidak menyediakan perlindungan sosial atau hak-hak tenaga kerja yang memadai. Perbandingan dengan literatur menegaskan bahwa situasi yang dihadapi oleh perempuan kepala rumah tangga di DIY mencerminkan tren yang lebih luas di banyak daerah pedesaan dan semi-perkotaan di Indonesia, di mana sektor informal dan agraris mendominasi.



Gambar 7.3 Perempuan Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Pekerjaan di DIY, 2023

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2023

Berdasarkan data profil demografi perempuan kepala keluarga di DIY menurut jumlah anggota keluarga, terlihat pola umum yang menonjol di wilayah DIY. Jumlah perempuan kepala keluarga dengan 1 anggota keluarga mencapai 141.415, yang merupakan jumlah tertinggi dibandingkan dengan kategori jumlah anggota keluarga lainnya (Tabel 7.1). Ini menunjukkan bahwa banyak perempuan kepala keluarga yang hidup sendiri. Jumlah ini

kemudian diikuti oleh keluarga dengan 2 anggota sebanyak 72.838 dan 3 anggota sebanyak 33.364. Pola ini menandakan bahwa sebagian besar perempuan kepala keluarga di DIY mengelola keluarga dengan jumlah anggota yang relatif kecil. Meskipun demikian ditemukan bahwa banyak pula yang memiliki jumlah anggota keluarga di atas 5 orang. Dalam tabel tersebut juga ditemukan bahwa setiap kabupaten/kota menunjukkan pola yang konsisten dengan tren keseluruhan di DIY, dengan beberapa variasi kecil.

Tabel 7.1 Perempuan Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga*

Jumlah Anggota Keluarga	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
1 Anggota	17.280	38.241	24.086	44.927	16.881	141.415
2 Anggota	8.514	18.398	11.713	22.670	11.543	72.838
3 Anggota	3.880	8.920	5.236	11.545	7.049	36.630
4 Anggota	1.081	2.523	2.000	3.608	2.712	11.924
5 Anggota	264	545	657	830	777	3.073
6 Anggota	47	153	161	197	246	804
7 Anggota	7	35	24	57	64	187
8 Anggota	2	13	10	22	24	71
9 Anggota	0	2	1	6	3	12
10 Anggota	0	1	0	3	4	8
11 Anggota	4	5	1	15	3	28

* Kepala keluarga juga dihitung sebagai anggota keluarga

Sumber: Kemendagri, hasil olahan DKB semester II tahun 2023

Jumlah perempuan kepala keluarga yang memiliki anggota lebih dari 5 perlu mendapatkan perhatian. Perempuan kepala keluarga yang memiliki jumlah anggota lebih dari 5 orang menghadapi berbagai konsekuensi yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Tantangan ekonomi, permasalahan akses pendidikan dan kesehatan bagi anggota keluarga, kualitas hidup, peran gender dan beban ganda, keterbatasan sumber daya dan dukungan sosial, dan ancaman

kemiskinan antar generasi: menjadi beberapa ancaman bagi mereka dan keluarganya di masa depan.

Secara keseluruhan, perempuan kepala keluarga dengan lebih dari 5 anggota keluarga menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Penting bagi pemerintah dan organisasi sosial untuk memberikan dukungan yang memadai dalam bentuk bantuan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan program pengembangan kapasitas untuk membantu meringankan beban mereka dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

C. Implikasi dan Arah Kebijakan

Implikasi dan arah kebijakan dari temuan tersebut dirinci sebagai berikut. Implikasi dari temuan distribusi kelompok umur perempuan kepala rumah tangga di DIY mengindikasikan bahwa sebagian besar perempuan dalam peran ini berada pada usia yang lebih tua, terutama pada rentang usia 60-74 tahun dan 45-59 tahun. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang kesejahteraan mereka, karena perempuan pada usia ini mungkin menghadapi tantangan terkait kesehatan, akses terhadap layanan sosial, dan keamanan ekonomi. Selain itu, perempuan yang lebih tua cenderung memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari kelompok usia yang lebih muda, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan jangka panjang, dukungan psikososial, dan perlindungan finansial.

Arah kebijakan yang harus diambil sebagai respons terhadap temuan ini mencakup pengembangan program yang secara khusus menargetkan kesejahteraan perempuan kepala rumah tangga yang lebih tua. Kebijakan kesehatan harus memperluas akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, termasuk pemeriksaan rutin dan perawatan penyakit kronis. Program Kesejahteraan Sosial perlu meningkatkan dukungan finansial, seperti pensiun atau bantuan sosial, untuk memastikan keamanan ekonomi mereka. Selain itu, inisiatif yang mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan

sosial dan ekonomi dapat membantu mengurangi isolasi sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, kebijakan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan kepala rumah tangga di DIY dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi mereka.

Implikasi dari temuan bahwa mayoritas perempuan kepala rumah tangga di DIY memiliki tingkat pendidikan rendah sangat signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Pendidikan rendah mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mengakses layanan kesehatan yang memadai, dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Akibatnya, banyak dari mereka mungkin terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan. Selain itu, tingkat pendidikan rendah juga dapat berdampak pada kemampuan mereka dalam mendidik anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat memperpetuasi siklus pendidikan rendah dan kemiskinan di masa depan.

Arah kebijakan yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pemerintah perlu mengimplementasikan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang dapat membantu perempuan kepala rumah tangga memperoleh keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Selain itu, program literasi dan pendidikan orang dewasa harus diperkuat untuk membantu mereka yang telah keluar dari sistem pendidikan formal. Kebijakan ini juga harus mencakup dukungan ekonomi, seperti pemberian beasiswa dan bantuan keuangan bagi perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan mereka. Dengan demikian, kebijakan yang holistik dan inklusif dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan kepala rumah tangga di DIY dan mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa banyak perempuan kepala rumah tangga di DIY masih terlibat dalam pekerjaan sektor informal, seperti mengurus rumah tangga, pertanian, dan buruh harian lepas, yang sering kali tidak memberikan jaminan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Tingginya persentase perempuan yang mengurus rumah tangga (29%) dan bekerja sebagai petani/pekebun (17%) menandakan ketergantungan pada pekerjaan yang mungkin kurang memberikan perlindungan sosial dan hak-hak tenaga kerja yang memadai. Hal ini bisa memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan membatasi akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi yang lebih baik.

Arah kebijakan yang perlu diambil mencakup pengembangan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, guna meningkatkan kapasitas dan daya saing perempuan kepala rumah tangga dalam sektor formal. Selain itu, pemberdayaan ekonomi melalui akses ke modal usaha kecil, dukungan teknis untuk pertanian yang lebih produktif, dan peningkatan akses ke pasar bagi wiraswasta sangat diperlukan. Kebijakan ini harus diiringi dengan perlindungan sosial yang kuat, termasuk asuransi kesehatan dan program pensiun, untuk menjamin keamanan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, perempuan kepala rumah tangga di DIY dapat diberdayakan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pembangunan daerah.

Berdasarkan tabel profil demografi perempuan kepala keluarga di DIY, terlihat bahwa mayoritas keluarga terdiri dari 1 hingga 3 anggota. Hal ini menunjukkan tingginya jumlah keluarga inti dengan sedikit anggota, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa kebijakan pemerintah perlu difokuskan pada dukungan individual dan keluarga kecil, seperti program pemberdayaan ekonomi dan akses pendidikan yang lebih mudah dan terjangkau. Bantuan

langsung tunai atau program bantuan sosial lainnya juga bisa lebih efektif jika disesuaikan dengan kebutuhan keluarga beranggotakan sedikit.

Di sisi lain, jumlah keluarga dengan lebih dari 5 anggota yang relatif kecil menunjukkan tantangan tersendiri. Keluarga besar ini memerlukan perhatian khusus karena menghadapi beban ekonomi dan sosial yang lebih berat. Pemerintah dapat merancang kebijakan yang memberikan insentif khusus bagi keluarga besar, seperti subsidi untuk pendidikan dan kesehatan, program peningkatan keterampilan untuk perempuan kepala keluarga, serta akses yang lebih baik terhadap perumahan yang layak. Program-program ini akan membantu meringankan beban keluarga besar dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk anak-anak mereka.

Secara keseluruhan, kebijakan yang diambil harus bersifat inklusif dan memperhatikan variasi jumlah anggota keluarga di setiap kabupaten/kota. Peningkatan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, serta program pemberdayaan ekonomi yang difokuskan pada perempuan kepala keluarga, adalah langkah-langkah yang krusial. Dengan demikian, kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan demografi yang beragam akan membantu meningkatkan kesejahteraan perempuan kepala keluarga di DIY dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di wilayah tersebut.

BAB. 08 | Penutup



Kesimpulan

Profil Perkembangan Kependudukan DIY 2023 memuat lima pembahasan pokok. Profil ini menggunakan data dari Kemendagri, hasil olah DKB semester II tahun 2023 dan data dari instansi lain sebagai pendukungnya. Lima pembahasan pokok tersebut berisi 1.) jumlah komposisi penduduk dan struktur keluarga, 2.) kelahiran, kematian, penduduk datang dan pergi, 3.) kondisi pendidikan, d.) kondisi ketenagakerjaan, dan e.) isu khusus. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain dideskripsikan sebagai berikut.

Pertama tentang jumlah, komposisi penduduk dan struktur keluarga. Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 3.722.296 jiwa, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta bervariasi dengan rata-rata 0,77% per tahun. Kabupaten Sleman menunjukkan pertumbuhan signifikan, sementara Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan. Tren ini menegaskan pentingnya Yogyakarta sebagai magnet migrasi dan urbanisasi, yang memerlukan kebijakan proaktif dari pemerintah daerah untuk mengelola pertumbuhan ini dengan efektif. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan perencanaan kota yang berkelanjutan menjadi prioritas untuk menjaga kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk DIY yang terus meningkat.



Piramida penduduk DIY tahun 2023 menunjukkan struktur yang mencerminkan distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin. Piramida ini berbentuk stasioner menuju tua dengan proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) yang cukup besar, sementara kelompok usia produktif (15-64 tahun) mendominasi. Peningkatan populasi usia tua memerlukan perhatian lebih pada layanan kesehatan dan sosial. Dengan demikian, strategi kebijakan di DIY harus memanfaatkan potensi kelompok usia produktif sembari mempersiapkan diri untuk tantangan dari populasi yang menua.

Rasio beban tanggungan di DIY menunjukkan proporsi penduduk usia produktif yang tinggi, mencapai 69%, sementara rasio beban tanggungan keseluruhan adalah 44,93%. Kabupaten Gunungkidul memiliki rasio beban tanggungan tertinggi yaitu 49,27%, menunjukkan tantangan dalam penyediaan layanan sosial dan kesehatan. Sementara itu, Kota Yogyakarta memiliki rasio beban tanggungan terendah (41,08%) yang mencerminkan tingkat urbanisasi yang lebih tinggi dan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa DIY memiliki potensi ekonomi yang besar jika kebijakan pembangunan dapat mengoptimalkan bonus demografi ini. Namun, perlu ada fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja yang memadai untuk memanfaatkan potensi tersebut. Selain itu, kebijakan yang mendukung populasi yang menua perlu diprioritaskan agar kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Kedua membahas kelahiran, kematian, penduduk datang dan pindah, di mana membahas aspek komponen kualitas penduduk kelahiran (angka kelahiran total), kematian (bayi dan ibu), penduduk datang dan pindah dari dan ke DIY. Kelahiran, kematian, serta mobilitas penduduk masuk dan keluar dari DIY memainkan peran penting dalam memahami dinamika demografi suatu wilayah. Dalam hal kelahiran, Angka Kelahiran Total (TFR) di DIY

menunjukkan penurunan, yaitu 1,5 anak per perempuan pada tahun 2023, turun dari 1,9 pada tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan perubahan dalam pola keluarga, dengan banyak pasangan memilih untuk memiliki lebih sedikit anak. Secara umum, pola Angka Fertilitas Khusus Usia (ASFR) di DIY menunjukkan puncak pada kelompok usia 25-29 tahun. Hal ini dapat dikaitkan dengan penundaan usia pernikahan dan kelahiran anak yang sering terjadi setelah perempuan menyelesaikan pendidikan dan memasuki pasar kerja.

Angka kematian bayi di DIY mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2023, mencapai 7 per 1.000 kelahiran hidup, tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini, terutama di Kabupaten Sleman, menunjukkan adanya tantangan dalam layanan kesehatan bayi dan anak. Sementara itu, angka kematian ibu (AKI) menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan Kota Yogyakarta mencatatkan penurunan dari 580 kasus pada 2021 menjadi nol pada 2023. Penurunan ini dapat diatributkan pada peningkatan layanan kesehatan ibu, edukasi kesehatan, dan program pemeriksaan kehamilan yang lebih baik.

Mobilitas penduduk yang masuk dan keluar DIY menunjukkan tren yang menarik. Pada tahun 2023, DIY mencatat jumlah penduduk yang datang dari antarprovinsi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang datang antarkabupaten/kota. Kota Yogyakarta dan Sleman menjadi tujuan utama, didorong oleh status DIY sebagai pusat pendidikan dan budaya. Sebaliknya, jumlah penduduk yang pindah keluar antarprovinsi juga tinggi, menunjukkan adanya aliran penduduk yang signifikan untuk mencari peluang di luar DIY, terutama karena alasan ekonomi dan pendidikan.

Kedatangan dan perpindahan penduduk ini membawa implikasi penting bagi kebijakan perencanaan dan pengelolaan wilayah di DIY. Peningkatan jumlah penduduk yang masuk memerlukan pengembangan infrastruktur perumahan dan layanan publik untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi. Pemerintah DIY perlu memastikan bahwa fasilitas

yang ada dapat memenuhi kebutuhan penduduk baru dan mempertahankan kualitas hidup yang baik bagi semua penduduk.

Ketiga adalah profil pendidikan di DIY yang dapat dilihat dari struktur pendidikan terakhir penduduk. Profil pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggambarkan distribusi tingkat pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh penduduk di wilayah tersebut. Sebagian besar penduduk DIY pada tahun 2023 tercatat sebagai lulusan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA), mencapai 28% dari total populasi. Tingkat pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) juga memiliki proporsi yang signifikan yaitu 17%. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, yaitu 19% dari penduduk yang belum pernah bersekolah, menunjukkan bahwa ada anak-anak usia sekolah yang belum terjangkau oleh sistem pendidikan. Ini menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan akses dan kesadaran pendidikan di wilayah ini.

Meskipun DIY memiliki jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi yang rendah, hanya 9% dari total populasi yang memiliki gelar S1 ke atas. Ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk meningkatkan partisipasi dalam pendidikan tinggi, yang dapat menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah ini. Pendidikan tinggi tidak hanya meningkatkan kemampuan individu dalam hal keterampilan dan pengetahuan tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan inovasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan kebijakan yang mendukung peningkatan akses dan partisipasi dalam pendidikan tinggi.

Struktur pendidikan di DIY juga menunjukkan variasi berdasarkan lokasi geografis. Di Kabupaten Sleman, terdapat konsentrasi yang cukup tinggi pada tingkat pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. Ini mungkin disebabkan oleh keberadaan institusi pendidikan yang lebih banyak dan akses yang lebih baik ke fasilitas pendidikan. Kota Yogyakarta, meskipun memiliki populasi yang lebih sedikit, menunjukkan distribusi yang signifikan

pada tingkat pendidikan tinggi, mencerminkan keberadaan banyak perguruan tinggi di kota ini. Pola ini mengindikasikan bahwa akses dan kualitas pendidikan lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Analisis berdasarkan gender menunjukkan adanya perbedaan dalam partisipasi pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, distribusi gender relatif seimbang, namun pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat ketimpangan yang lebih besar. Perempuan cenderung lebih banyak memilih jenjang diploma, sementara laki-laki mendominasi pada jenjang strata II dan III. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih untuk mencapai kesetaraan gender dalam akses pendidikan tinggi, sehingga perempuan memiliki peluang yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) juga menggambarkan tingkat partisipasi pendidikan di DIY. Secara umum, partisipasi pendidikan di DIY tergolong tinggi di semua jenjang pendidikan. Namun, terdapat variasi antarkabupaten/kota, dengan Kota Yogyakarta menonjol dengan tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa semua anak, terutama di daerah yang lebih terpencil seperti Kulon Progo, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah DIY sangat penting untuk mencapai pemerataan pendidikan dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik.

Keempat adalah ketenagakerjaan di DIY yang menelaah kondisi ketenagakerjaan, mencakup angkatan kerja, angkatan kerja yang bekerja, partisipasi angkatan kerja dan pengangguran terbuka.. Kondisi ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2023 menunjukkan dinamika yang menarik dalam berbagai aspek, termasuk jumlah angkatan kerja, jenis pekerjaan, partisipasi angkatan kerja, dan

tingkat pengangguran terbuka. Angkatan kerja DIY, yang mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas, terdiri dari 2.991.359 orang, dengan jumlah perempuan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ini mencerminkan peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar kerja, yang dapat dikaitkan dengan akses pendidikan yang lebih baik, perubahan norma sosial, serta kebijakan pemerintah yang mendukung kesetaraan gender.

Jenis pekerjaan yang digeluti oleh angkatan kerja DIY bervariasi, dengan kategori karyawan swasta, buruh, dan wiraswasta sebagai tiga sektor utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Karyawan swasta mendominasi dengan total 442.019 orang, diikuti oleh buruh sebanyak 409.561 orang, dan wiraswasta sebanyak 311.512 orang. Distribusi pekerjaan ini mencerminkan struktur ekonomi DIY yang beragam, di mana sektor swasta dan kewirausahaan memiliki peran signifikan. Selain itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan tetap menjadi bagian penting dari perekonomian DIY, dengan jumlah pekerja yang cukup besar terutama di daerah pedesaan.

Partisipasi angkatan kerja di DIY menunjukkan variasi yang signifikan antarwilayah. Kabupaten Gunungkidul mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tertinggi sebesar 76%, sedangkan Sleman memiliki TPAK terendah sebesar 65%. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat urbanisasi, peluang kerja, dan program pemerintah setempat. Tingginya TPAK di Gunungkidul mungkin terkait dengan sektor pariwisata yang berkembang, sedangkan rendahnya TPAK di Sleman mungkin disebabkan oleh banyaknya institusi pendidikan yang mendorong penduduk untuk melanjutkan studi dibandingkan langsung masuk ke pasar kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY pada tahun 2023 mencapai 4,96%, dengan variasi yang signifikan antarkabupaten/kota. Kota Yogyakarta mencatat TPT tertinggi sebesar 6,37%, yang dapat dikaitkan dengan persaingan kerja yang ketat dan urbanisasi tinggi. Sementara itu, Kabupaten Bantul memiliki TPT terendah sebesar 0,36%, kemungkinan

karena banyaknya penduduk yang bekerja di sektor informal atau pertanian keluarga. Perbedaan TPT ini mencerminkan kondisi ekonomi dan peluang kerja yang bervariasi di setiap daerah.

Kondisi bukan angkatan kerja di DIY juga menarik untuk dibahas, di mana jumlahnya mencapai 875.087 orang, didominasi oleh pelajar/mahasiswa. Faktor demografis dan sosial, termasuk tingginya konsentrasi lembaga pendidikan di daerah seperti Sleman dan Yogyakarta, berkontribusi pada tingginya jumlah pelajar/mahasiswa. Selain itu, peran gender tradisional dan tanggung jawab rumah tangga masih memengaruhi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, terutama di daerah dengan budaya yang lebih konservatif. Temuan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan serta upaya untuk mengatasi kesenjangan gender di pasar kerja.

Terakhir adalah tentang profil demografi perempuan kepala keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Profil demografi perempuan kepala keluarga di DIY ini menunjukkan dinamika yang kompleks dan menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi oleh kelompok ini. Sebagian besar perempuan kepala keluarga di DIY berada pada usia yang lebih tua, dengan mayoritas berada dalam rentang usia 60-74 tahun (37%) dan 45-59 tahun (27%). Hal ini mencerminkan fenomena di mana perempuan cenderung mengambil peran sebagai kepala keluarga pada usia lanjut, kemungkinan setelah kehilangan pasangan atau ketika anak-anak mereka sudah dewasa. Ini menunjukkan bahwa perempuan di usia lanjut lebih rentan terhadap tantangan sosial dan ekonomi, serta mungkin memerlukan perhatian khusus dalam hal dukungan kesehatan dan sosial.

Tingkat pendidikan perempuan kepala keluarga di DIY cenderung rendah, dengan sebagian besar menamatkan pendidikan hanya hingga tingkat SD atau sederajat (31%), dan hanya 9% yang menyelesaikan pendidikan tinggi (S1-S3). Pendidikan yang rendah ini membatasi akses

mereka terhadap peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan risiko keterjebakan dalam kemiskinan. Perempuan kepala keluarga dengan pendidikan rendah memiliki akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup mereka dan keluarga. Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi penting untuk memperbaiki status sosial dan ekonomi mereka.

Jenis pekerjaan yang paling umum diambil oleh perempuan kepala keluarga di DIY adalah sebagai ibu rumah tangga (29%) dan petani/pekebun (17%). Tingginya ketergantungan pada sektor informal dan agraris menunjukkan kurangnya akses terhadap pekerjaan formal yang menawarkan perlindungan sosial dan hak-hak tenaga kerja yang memadai. Banyak dari mereka terlibat dalam pekerjaan yang tidak stabil dan berpenghasilan rendah, yang menambah kerentanan ekonomi keluarga. Ini menyoroti perlunya program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka di pasar kerja.

Struktur keluarga perempuan kepala keluarga di DIY didominasi oleh rumah tangga dengan 1 hingga 3 anggota. Pola ini mungkin mencerminkan tingginya jumlah keluarga inti dan individu yang tinggal sendiri, terutama di kalangan perempuan yang lebih tua. Namun, ada juga kelompok perempuan kepala keluarga dengan lebih dari 5 anggota keluarga, yang menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang mendukung keluarga besar ini dengan memberikan insentif khusus, seperti subsidi untuk pendidikan dan kesehatan, serta akses perumahan yang layak. Dengan demikian, kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan kepala keluarga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfa, F. R. (2019). pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49-56.
- Alfana, M. A. F., Wahyudi, T. P., & Aulia, D. N. (2018, April). Human Development in Civil Registration Aspect: Achievement of Birth Certificate Documents in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 145, No. 1, p. 012115). IOP Publishing.
- Anggit, N. B., & Putri, I. S. (2022, June). Identification of urban sprawl phenomenon and its implications in the City of Yogyakarta Province of Special Region of Yogyakarta. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1038, No. 1, p. 012052). IOP Publishing.
- Bappeda DIY. (2021). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY 2020*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Bappeda DIY
- Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. (2020). *Profil Perkembangan Kependudukan DIY Tahun 2019*. Yogyakarta: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
- BPS. (2023). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS. ISBN : 978-602-438-521-7
- Choi, S. (2012). The effects of student-teaching applied reflective journal writing on pre-service special education teachers' teacher efficacy. *Special Education Research*, 11(1), 107. <https://doi.org/10.18541/ser.2012.02.11.1.107>
- Devi, M. K., Fitria, L. M., Roychansyah, M. S., & Herwangi, Y. (2019, October). Making the connection between accessibility and travel behaviour in university setting (Case study: Babarsari Area, Yogyakarta). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 340, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.

- Dewi, A. P., Hartati, N. D., Alfiana, S., & Siregar, Y. E. Y. (2024). Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(1), 39-47.
- Dewi, L. (2017). Kehidupan keluarga single mother. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 2(3), 44-48.
- Dewi, S. (2020). Pengangguran Terbuka: Kasus Di Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).
- Dimeng, W., Ayu, I. W., & Wijayanti, N. (2024). Karakteristik Rumah Tangga Petani Lahan Kering Di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, 7(1), 169-180.
- Fadilah, S. (2018). Kesetaraan gender: Fenomena pergeseran peran ekonomi Perempuan dari tulang rusuk menjadi tulang punggung. *Mitra Gender (Jurnal Gender dan Anak)*, 1(1), 18-26.
- Fan, L. (2019). Urbanization and labor market segmentation. *Urbanization and Its Impact in Contemporary China*, 83-112.
- Fattakhov, R. V., Nizamutdinov, M. M., & Oreshnikov, V. V. (2020). Assessment of the development of the social infrastructure of Russian regions and its impact on demographic processes. *Finance: theory and practice*, 2(24), 104-119.
- Fosu, G. B. (2000). Evaluation of population census data through demographic analysis. In Symposium on Global Review of 2000 Round of Population and Housing Censuses: Mid-Decade Assessment and Future Prospects. Statistics Division Department of Economic and Social Affairs. United Nations Secretariat: New York, 7-10 August 2001
- Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), 19-32.
- Ikhwan, R., & Suharyono, S. (2023, December). Resiliensi Petani Perempuan Kepala Keluarga Menghadapi Krisis Pangan. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 41, No. 1, Pp. 31-44).

- Kemal, B., M. & Naci, G. (2009). Female labor force participation in urbanization process: the case of Turkey. University Library of Munich, Germany.
- Khairunnisa, I. N., Putranti, I. R., & Hanura, M. (2022). Partisipasi Perempuan Indonesia dalam Ekonomi Kreatif untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 8(3), 385-395.
- Khotimah, K. (2009). Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam sektor pekerjaan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 4(1), 158-180.
- Li, X., & Pu, R. (2023). Students' innovativeness and higher education for sustainable development: A bibliometric approach. *Humanities and Social Sciences Letters*, 11(1), 83-99.
- Long, Y., Chen, Q., Larsson, H., & Rzhetsky, A. (2021). Observable variations in human sex ratio at birth. *PLoS computational biology*, 17(12), e1009586.
- Lundquist, J. H., Anderton, D. L., and Yaukey, D. (2015). *DEMOGRAPHY The Study of Human Population (Fourth Edition)*. Illinois: Waveland Press, Inc.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (LKPJ AMJ Gubernur DIY Tahun 2017-2022)*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Pemerintah Daerah DIY. (2024). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun 2023*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Perwita, D dan Widuri, R. (2023). Telaah pendidikan: preferensi orang tua memilih sekolah swasta daripada sekolah Negeri. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan pembelajarannya*, 11 (1): 64-75
- Primayuni, S. (2019). Kondisi Kehidupan Perempuan Single Parent. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(4), 17-23.
- Putri, A. S., & Anzari, P. P. (2021). Dinamika peran ganda perempuan dalam keluarga petani di Indonesia. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 757-763.
- Rahajeng, A., Jaya, W. K., Pangaribowo, E., & Darwin, M. (2023). Transformation of yogyakarta regional development: a shifting perception of economic power among the regions. *GeoJournal*, 88(2), 1671-1686.
- Raharti, R., & Jebarus, B. (2022, June). Economic Analysis of Urban Land Use in Yogyakarta City. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1030, No. 1, p. 012012). IOP Publishing.
- Rahmawati, A. (2016). Harmoni dalam keluarga perempuan karir: upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 8(1), 1-34.

- Renie, E. (2020). Partisipasi Perempuan Dalam Ekonomi Inklusif. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 10-17.
- Resele, L., Libkowska, U., & Balode, I. K. (2023). Strategy For Retaining Graduates And Its Impact On The Region Sustainable Development. *International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Sgem*, 23(5.1), 461-468.
- Resmini, W., Sakban, A., & Resmayani, N. P. A. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), 700-705.
- Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2016). Faktor-faktor penentu kemiskinan di Indonesia: analisis rumah tangga. *JJET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan)*, 1(2), 88-104.
- Rohmiyati, Y. (2017). Studi Komparasi Kebutuhan Informasi Kepala Keluarga Pria dan Perempuan. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 1(2), 101-109.
- Samosir, B dan Rajagukguk, W. (2015). *Demografi Formal*. Penerbit UKI Press.
- Sen, S. (2017). Neo-liberal urbanization, work participation and women: Comparing the urban and peri-urban contexts of Delhi with Mumbai and Kolkata. *Marginalization in globalizing Delhi: Issues of land, livelihoods and health*, 129-151.
- Setyono, D. A., & Cahyono, D. D. (2019). Configuring Educational Facilities Services Pattern In Traditional Cities (A Case Study Of Yogyakarta And Surakarta City). *Geographia Technica*, 14.
- Skirbekk, V. (2022). Fertility, Population Growth, and Population Composition. In *Decline and Prosper! Changing Global Birth Rates and the Advantages of Fewer Children* (pp. 329-355). Cham: Springer International Publishing.
- Subagja, Y. H. (2022). Perspektif Kesetaraan Gender pada Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(4), 513-520.

- Susanto, J., & Pratama, M. A. W. (2019). Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di DI Yogyakarta. *Develop Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*, 5(1), 1-17.
- Swanson. D. A. and Siegel. J. S. (2004). *Introduction*. in Swanson. D. A. and Siegel. J. S. (eds). *The Methods and Materials of Demography*. 2nd Edition. California: Elsevier Academic Press.
- Syahrizan, M., & Siregar, A. H. (2024). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Hukum Islam. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 5(1), 118-131.
- Telaumbanua, M. M., & Nugraheni, M. (2018). Faktor yang memengaruhi upaya ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(3), 217-226.
- Tey, N. P., Talha, R., Rahman, E. N. A., & Ismail, M. F. (2021). Spatial demographic data for planning and research. *Planning Malaysia*, 19.
- Tukiran. (2010). *Kependudukan*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Wulandari, S., & Dariah, A. R. (2022, July). Analisis Pengangguran Perkotaan. In *Bandung Conference Series: Economics Studies* (Vol. 2, No. 2, pp. 234-243).
- Yilin, Z., Feng, H., & Ying, F. (2021, July). Research on the Employment Flow of College Graduates and Regional Economic Development: Analysis on the Flow Intensity of Graduates from 137 Colleges and Universities. In *2021 International Conference on Education, Information Management and Service Science (EIMSS)* (pp. 99-105). IEEE.
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia. *Murabbi*, 5(1).

Pemegang Kartu Identitas Anak di DIY dapat memanfaatkan keuntungan pada merchant berikut ini.



Kids Fun



Gardena
Dept. Store



Grand Puri
Resto



Hugo Violin
School



Grand Puri
Waterpark



Beringin Optik



Dapatkan manfaatnya sebelum 31 Desember 2024 untuk merchant berikut.



Wisata
Tebing Breksi

